



EKONOMI Demografi

Bonaraja Purba • Arfandi SN • Elidawaty Purba • Samsider Sitorus • Pauer Darasa Panjaitan • Darwin Damanik
Muhammad Iqbal Abdi Lubis • Maisyarah. M • Muhammad Fitri Rahmadana • Fastabiqul Khairad
Ari Mulianta Ginting • Akhmad Muhammadin • Hengki Mangiring Parulian Simarmata



EKONOMI Demografi



UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ekonomi Demografi

Bonaraja Purba, Arfandi SN, Elidawaty Purba, Samsider Sitorus
Pawer Darasa Panjaitan, Darwin Damanik
Muhammad Iqbal Abdi Lubis, Maisyarah.M
Muhammad Fitri Rahmadana, Fastabiqul Khairad
Ari Mulianta Ginting, Akhmad Muhammadin
Hengki Mangiring Parulian Simarmata



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Ekonomi Demografi

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2021

Penulis:

Bonaraja Purba, Arfandi SN, Elidawaty Purba, Samsider Sitorus
Pawer Darasa Panjaitan, Darwin Damanik
Muhammad Iqbal Abdi Lubis, Maisyarah M
Muhammad Fitri Rahmadana, Fastabiqul Khairad
Ari Mulianta Ginting, Akhmad Muhammadiyah
Hengki Mangiring Parulian Simarmata

Editor: Ronal Watrianthos

Desain Sampul: Devy Dian Pratama, S.Kom.

Sampul: unsplash.com

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

Anggota IKAPI: 044/SUT/2021

Bonaraja Purba, dkk.

Ekonomi Demografi

Yayasan Kita Menulis, 2021

xiv; 196 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-342-038-9

Cetakan 1, April 2021

- I. Ekonomi Demografi
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Sungguh besar anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan berkat dan rahmatNya, sehingga dengan tepat waktu Tim Penulis mampu menyusun buku yang berjudul Ekonomi Demografi.

Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk membantu para pembaca, memahami bahwa Ekonomi Demografi merupakan bagian tidak terpisahkan dan sangat penting dalam kelangsungan pembangunan ekonomi masa sekarang dan masa yang akan datang. Buku ini berisi materi yang dapat digunakan baik oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa, serta para pembaca umumnya untuk menambah wawasan berpikir dan ilmu yang berkenaan dengan ilmu ekonomi pembangunan.

Buku ini terdiri dari 13 Bab yang membahas tentang:

- Bab 1 Pendahuluan
- Bab 2 Sumber Data Demografi
- Bab 3 Pertumbuhan Penduduk beserta Variabel yang Memengaruhinya.
- Bab 4 Ukuran Dasar Demografi
- Bab 5 Komposisi Penduduk
- Bab 6 Angkatan Kerja
- Bab 7 Fertilitas
- Bab 8 Mortalitas
- Bab 9 Migrasi
- Bab 10 Mobilitas Penduduk
- Bab 11 Masalah Kependudukan
- Bab 12 Kaitan Demografi dengan Pembangunan Ekonomi
- Bab 13 Kebijakan Kependudukan

Dengan kolaborasi yang solid dan kompak dari beberapa penulis bidang ilmu ekonomi dari berbagai Perguruan Tinggi sehingga buku ini dapat terwujud dan terbit sesuai dengan target waktu. Penyusunan buku ini juga

merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tim Penulis sungguh merasakan bahwa dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Tim Penulis sungguh menyadari jika dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan, akan tetapi Tim Penulis berkenan menerima kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan buku ini di kemudian hari, semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata, Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta secara aktif dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada Pimpinan Penerbit Yayasan Kita Menulis yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa dalam segala tugas dan pekerjaan kita. Amin

Medan, 3 April 2021

Tim Penulis

Bonaraja Purba, dkk

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xiii

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Pengertian Ekonomi Demografi.....	1
1.1.1 Demografi Formal	4
1.1.2 Social Demography	4
1.2 Ruang Lingkup Ekonomi Demografi	5
1.2.1 Demografi Formal	7
1.2.2 Studi Demografi Tipe I.....	8
1.2.3 Studi Demografi Tipe II	9
1.3 Tujuan Mempelajari Ekonomi Demografi	9

Bab 2 Sumber Data Demografi

2.1 Pendahuluan.....	13
2.2 Pengertian Sumber Data Kependudukan.....	14
2.3 Analisis Data Kependudukan	19
2.4 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	21

Bab 3 Pertumbuhan Penduduk dan Variabel Pengaruhnya

3.1 Pendahuluan.....	23
3.2 Pengertian Penduduk.....	24
3.3 Perkembangan Penduduk	29
3.4 Komposisi Umur Penduduk	30
3.5 Variabel – Variabel yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	32

Bab 4 Ukuran Dasar Demografi

4.1 Pendahuluan.....	37
4.2 Rasio	39
4.3 Proporsi	42
4.4 Rate.....	47
4.5 Ukuran Dasar Teknik Analisa Kependudukan.....	55

Bab 5 Komposisi Penduduk

5.1 Pendahuluan.....	61
5.2 Komposisi Penduduk	62
5.2.1 Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin dan pekerjaan	64
5.2.2 Komposisi berdasarkan geografis.....	68
5.3 Piramida Penduduk	69
5.3.1 Piramida penduduk muda (expansive).....	70
5.3.2 Piramida penduduk tetap (stasioner)	71
5.3.3 Piramida penduduk tua (constrictive).....	72

Bab 6 Angkatan Kerja

6.1 Pendahuluan.....	75
6.2 Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan.....	76
6.2.1 Konsep ketenagakerjaan.....	76
6.2.2 Definisi ketenagakerjaan	80
6.3 Ukuran-Ukuran Dasar Angkatan Kerja	80
6.4 Kesempatan Kerja	82
6.5 Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia	85
6.5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	86
6.5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	86

Bab 7 Fertilitas

7.1 Pendahuluan.....	89
7.2 Kajian Fertilitas.....	91
7.3 Ukuran Dasar Fertilitas	93
7.4 Faktor Penentu Fertilitas	94
7.4.1 Pengaruh Jumlah Anak Ideal dan Preferensi Anak Terhadap Fertilitas.	94
7.4.2 Pengaruh Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Umur Menikah Pertama/Umur Wanita, dan Tempat Tinggal Terhadap Fertilitas..	95
7.4.3 Pengaruh Kegiatan Utama Terhadap Fertilitas.....	99
7.4.4 Pengaruh Keputusan Ber-KB, Indeks Kekayaan Rumah Tangga, dan Usia Persalinan Pertama Terhadap Fertilitas	100

Bab 8 Mortalitas/Kematian

8.1 Pengertian.....	101
8.1.1 Mortalitas/Kematian	101
8.1.2 Sumber Data Kematian	102
8.2 Faktor Penentu Kematian.....	105
8.3 Ukuran Dasar Kematian.....	108

Bab 9 Migrasi

9.1 Pendahuluan.....	113
9.2 Pengertian Migrasi.....	114
9.3 Pengambilan Keputusan Bermigrasi.....	116
9.4 Pull and Push Factor Theory.....	119
9.5 Teori Migrasi Lewis-Fei-Renis	120
9.6 Teori Migrasi Todaro	122
9.7 Teori Kebutuhan dan Tekanan	124
9.8 Pola Migrasi Kota-Desa.....	126
9.9 Instrumen Kebijakan Migrasi	126

Bab 10 Mobilitas Penduduk

10.1 Pendahuluan.....	129
10.2 Bentuk Mobilitas Penduduk	131
10.2.1 Transisi Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi	132
10.3 Faktor Mobilitas Penduduk	133
10.3.1 Faktor penarik	135
10.3.2 Faktor Pendorong	135
10.4 Pola Mobilitas Penduduk.....	136
10.4.1 Pola Mobilitas Penduduk Global	136
10.4.2 Pola Mobilitas Penduduk Nasional	137
10.5 Kasus Mobilitas Penduduk.....	137

Bab 11 Masalah Kependudukan di Indonesia

11.1 Pendahuluan.....	141
11.2 Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kependudukan di Indonesia.....	142
11.2.1 Peningkatan Jumlah Penduduk dan Tingkat Kualitas SDM	143
11.2.2 Kemiskinan	145
11.2.3 Kesehatan	147
11.2.4 Pangan	149

Bab 12 Kaitan Demografi Dengan Pembangunan Ekonomi

12.1 Pendahuluan.....	151
12.2 Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN.....	154
12.2.1 Produktivitas Tenaga Kerja.....	155
12.2.2 Pertumbuhan Penduduk dan Beban Ketergantungan	156
12.2.3 Kesempatan Kerja dan Pengangguran	156
12.2.4 Ketergantungan terhadap Pertanian dan Barang Ekspor Primer	157
12.2.5 Ketergantungan dan Kepekaan terhadap Luar Negeri.....	158

12.3 Sifat-sifat Umum Negara Berkembang	158
---	-----

Bab 13 Kebijakan Kependudukan

13.1 Pendahuluan.....	161
13.2 Pengertian Kebijakan Kependudukan.....	163
13.3 Tujuan Kebijakan Kependudukan	164
13.3.1 Kebijakan Tingkat Kelahiran.....	165
13.3.2 Kebijakan Tingkat Kematian.....	167
13.3.3 Kebijakan Mobilitas penduduk	168
13.4 Meningkatkan Kualitas Penduduk Indonesia.....	169
13.4.1 Kebijakan Pendidikan	170
13.4.2 Kebijakan Kesehatan.....	171
13.4.3 Kebijakan Tingkat Pendapatan.....	172
13.5 Evaluasi Kebijakan Kependudukan	172

Daftar Pustaka	175
Biodata Penulis	189

Daftar Gambar

Gambar 3.1: Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2020 (Umur / Juta)	37
Gambar 3.2: Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2025 (Umur / Juta)	38
Gambar 3.3: Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2030 (Umur / Juta)	38
Gambar 5.1: Struktur Komposisi Kependudukan	73
Gambar 5.2: Komposisi Umur Penduduk 1971 - 2020	75
Gambar 5.3: Struktur Penduduk Berdasarkan Generasi	76
Gambar 5.4: Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia	77
Gambar 5.5: Penduduk Indonesia Berdasarkan Pulau	78
Gambar 5.6: Piramida Penduduk Muda (Expansive)	81
Gambar 5.7: Piramida Penduduk Tetap (Stationer)(.....)	82
Gambar 5.8: Piramida Penduduk Tua (Constructive)	83
Gambar 6.1: Klasifikasi Penduduk dan Angkatan Kerja.....	89
Gambar 7.1: Kerangka Dasar Sederhana untuk Analisis Fertilitas.....	102
Gambar 7.2: Faktor-faktor yang Memengaruhi Fertilitas.....	103
Gambar 9.1: Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Bermigrasi.....	130
Gambar 9.2: Grafik Model Lewis-Fei-Ranis (L-F-R) Tentang Pertumbuhan Sektor Modern Dalam Perekonomian Dua Sektor yang Mengalami Surplus Tenaga Kerja	131
Gambar 9.3: Model Migrasi Todaro	132
Gambar 9.4: Hubungan Antara Kebutuhan Dan Pola Mobilitas Penduduk	135
Gambar 10.1: Skema Jenis-Jenis Mobilitas Penduduk	141
Gambar 11.1: Komposisi Penduduk Indonesia berdasarkan usia	153
Gambar 11.2: Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan ...	154
Gambar 11.3: Indeks Pembangunan Manusia Per Provinsi Tahun 2019.....	155
Gambar 11.4: Perkembangan Jumlah Orang Miskin dan Persentase Kemiskinan di Indonesia Periode Maret 2011 – Maret 2020	156
Gambar 11.5: Jumlah Puskesmas di Indonesia Periode Tahun 2013-2018 .	157
Gambar 11.6: Rasio Puskesmas per Kecamatan di Indonesia tahun 2019 ..	158
Gambar 11.7: Produksi Padi Menurut Provinsi Tahun 2018 – 2020 di Indonesia	160

Daftar Tabel

Tabel 1.1: Variabel Pengaruh dan Terpengaruh dalam Demografi Formal dan Studi Kependudukan	6
Tabel 3.1: Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin (BPS 2020) Tahun 2020 -2030 (x 1000).....	36
Tabel 3.2: Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (BPS 2020) Tahun 2020 -2030 (x 1000)	36
Tabel 3.3: Proyeksi Penduduk Indonesia (BPS 2020) Tahun 2010 – 2035 (Ribuan) Tahun Jlh Penduduk Jiwa % Pertumbuhan Penduduk 40	
Tabel 3.4: Proyeksi Umur Penduduk Indonesia (BPS) Tahun 2010 -2035	41
Tabel 3.5: Proyeksi Dependency Ratio Tahun 2010 – 2035 (BPS) (Ribuan)	41
Tabel 3.6: Proyeksi Angka Kelahiran Total (TFR) Indonesia Tahun 2010 - 2035	43
Tabel 3.7: Proyeksi Angka Kematian Bayi (IMR) Indonesia Tahun 2010 -2035 (BPS)	44
Tabel 6.1: Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2019 – 2020.....	95
Tabel 7.1: Angka Fertilitas Menurut Indeks Kekayaan di Kalimantan Selatan	110
Tabel 7.2: Angka Fertilitas Menurut Usia Persalinan di Kalimantan Selatan ..	110
Tabel 9.1: Bentuk-Bentuk Mobilitas Penduduk	126
Tabel 12.1: Laju Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Negara-negara ASEAN Tahun 2000-2018	169

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Pengertian Ekonomi Demografi

Istilah ekonomi berasal dari kata “oikos” yang berarti rumah tangga atau keluarga. ... Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi (Purba, Nainggolan, et al., 2020; Sari et al., 2020; Marit et al., 2021; Purba, Purba, et al., 2021; Purba, Rahmadana, et al., 2021). Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia (Purba, Sudarmanto, et al., 2020; Ashoer et al., 2021; Munthe et al., 2021).

Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya

yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi (Purba, Albra, et al., 2021; Suleman et al., 2021).

Sebelum makna tentang Demografi dapat dipahami, akan diawali dengan berbagai konsep yang terkait dengan hal tersebut. Pertama dijelaskan tentang konsep dan definisi demografi. Kata Demografi berasal dari Bahasa Yunani yang dapat dilihat dari asal katanya yaitu *demos* dan *graphein*. *Demos* dapat diartikan sebagai penduduk, dan *graphein* berarti menulis. Dengan menggabungkan kedua makna dari kata-kata tersebut maka dapat diartikan kata demografi berarti tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk suatu negara atau suatu daerah. Jika diperhatikan makna kata demografi tersebut, maka makna atau definisi tersebut belum jelas arahnya mengingat ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu sosiologi, antropologi sosial juga berbicara tentang penduduk atau berorientasi tentang penduduk atau manusia. Menyadari hal tersebut, maka beberapa ilmuwan atau ahli memberikan definisi tentang demografi agar dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya (Yasin and Adioetomo, 2010).

Definisi yang diberikan oleh Guillard (1855) melihat atau mempelajari manusia atau penduduk secara keseluruhan. Demografi didefinisikan sebagai ilmu mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya. Jika dilihat dari konsep atau definisi tersebut juga masih sangat umum yang menyangkut kondisi manusia atau penduduk, yang juga sulit dibedakan dengan ilmu sosial lainnya (Mantra, 2003).

Barclay (1970) menyatakan bahwa demografi merupakan gambaran secara numerik tentang penduduk. Penduduk/population adalah satu kesatuan dari manusia yang diwakili oleh suatu nilai statistik tertentu. Oleh karena itu demografi berhubungan dengan tingkah laku penduduk secara keseluruhan/ bukan perorangan. Lebih lanjut Hauser dan Duncan (1959); berpendapat bahwa demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, di mana sebab-sebab perubahan tersebut yang biasanya timbul karena natalitas/fertilitas, mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status) (Suharto, 2021).

Sedangkan Sussmilch (1762) menyatakan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan

pada umat manusia yang terlihat dari jumlah kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. Glass (1953) menekankan bahwa demografi terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Lebih lanjut Bogue (1969) mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik jumlah, komposisi, distribusi penduduk, dan perubahan-perubahannya sebagai akibat bekerjanya komponen-komponen pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial (Suharto, 2021).

Menurut United Nation (1958) dan International Union for the Scientific Study of Population/IUSSP (1982) bahwa demografi adalah studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya. Masalah demografi lebih ditekankan pada studi kuantitatif dari berbagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Merujuk pada definisi-definisi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu demografi merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi/strukturnya. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pada komponen-komponen utama pertumbuhan penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang pada gilirannya menyebabkan perubahan pada jumlah, struktur, dan persebaran penduduk.

Demografi memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku penduduk, baik secara agregat maupun kelompok. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, penyebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah dan perubahan-perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk.

Seperti ilmu-ilmu yang lain, ilmu demografi terus berkembang. Seiring dengan perkembangan timbul masalah mengenai definisi/pembagian ilmu ini. Sebelum membahas tentang ruang lingkup Ilmu Kependudukan, harus dapat dibedakan dengan lebih jelas konsep atau definisi tentang demografi dengan

Ilmu Kependudukan tersebut. Berikut disampaikan perbedaan-perbedaan tersebut dengan lebih jelas dan rinci (Mantra, 2003).

1.1.1 Demografi Formal

Demografi lebih menekankan studinya pada proses demografi. Ahli demografi mempelajari struktur penduduk untuk dapat lebih memahami proses demografi. Misalnya untuk menganalisis fertilitas penduduk di suatu daerah, ahli demografi perlu mengetahui jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di daerah tersebut. Demografi/ menghasilkan teknik-teknik untuk menghitung data kependudukan. Dengan teknik-teknik tersebut dapat diperoleh perkiraan keadaan penduduk pada masa depan atau pada masa lampau. Model-model formal kelihatan sangat menakutkan tetapi tidak mampu menjawab tentang mengapa hal tersebut terjadi. Apa yang menjadi penyebab kondisi tersebut terjadi tidak dapat diketahui melalui konsep demografi tersebut.

Demografi dapat diartikan secara sempit dan luas. Paling sempit adalah formal demografi/analisis demografi, berhubungan dengan jumlah, distribusi, struktur, dan perubahan penduduk. Jumlah yaitu banyaknya orang di dalam suatu daerah, distribusi dimaknai sebagai persebaran penduduk di dalam suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Struktur dalam arti yang paling sempit, penduduk menurut umur, dan jenis kelamin. Perubahannya yang dimaksud adalah tentang naik atau turun jumlah penduduk atau salah satu elemennya (Yasin and Adioetomo, 2010).

1.1.2 Social Demography

Untuk menjawab mengapa/apa yang menjadi penyebab suatu kondisi terjadi diperlukan suatu ilmu lain yang disebut Ilmu Kependudukan. Ilmu kependudukan ini merupakan penghubung antara penduduk dengan sistem sosial, dengan harapan dapat memecahkan pertanyaan dasar: bagaimana menambah pengertian atau pemahaman terhadap masyarakat melalui proses analisis kependudukan. Methorst & Sirks membagi ilmu tersebut menjadi secara kuantitatif yaitu demografi, sedangkan secara kualitatif dibahas tentang penduduk dari segi genetis dan biologis. Pandangan ini tidak mendapat dukungan karena formal demografi tidak hanya berhubungan dengan angka, namun angka-angka tersebut tetap harus diinterpretasikan, untuk dapat mengetahui makna yang lebih mendalam dibalik angka-angka tersebut (Hauser and Duncan, 1959a, 1959b; Mantra, 2003).

Perkembangan selanjutnya Adolphe Laundry di Paris tahun 1937 dalam kongres kependudukan, membuktikan adanya hubungan matematik antara komponen-komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, sex/gender. Beliau mengusulkan istilah yang berbeda satu dengan yang lainnya yaitu istilah pure demografi untuk cabang demografi yang bersifat analitik matematis yang menghasilkan angka-angka tertentu. *Pure demography/formal demography*, menghasilkan teknik-teknik untuk menghitung data kependudukan. Formal demography hanya berhubungan dengan pertanyaan tentang: apa, berapa, kapan, dan di mana angka-angka atau kondisi tersebut terjadi. Namun demikian Pure demography/ formal demography tidak dapat menjawab pertanyaan tentang mengapa angka-angka tersebut terjadi. Apa fenomena atau penyebab angka-angka yang telah dihitung secara matematik tersebut terjadi dapat dikatakan bukanlah bidang dari *Pure demography/formal demography* tersebut, tetapi bidang ilmu lainnya yaitu *Social Demography*. Dengan demikian dapat disimpulkan Social Demography akan dapat menjawab mengapa angka-angka tersebut terjadi (Yasin and Adioetomo, 2010).

Secara lebih rinci dapat dikatakan ilmu demografi yang sempit berkaitan dengan teknik menghitung angka-angka tentang kondisi penduduk, ilmu demografi dalam arti yang lebih luas membicarakan angka-angka termasuk karakteristik penduduk seperti karakteristik sosial, ekonomi, termasuk etnik. Karakteristik sosial antara lain meliputi status perkawinan penduduk, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan sebagainya. Karakteristik ekonomi antara lain meliputi status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, pendapatan, jam kerja dan sebagainya. Karakteristik etnik antara lain dapat menyangkut agama, ataupun suku. Ilmu Demografi yang paling luas yang disebut sebagai *Population studies* atau Studi Kependudukan berhubungan dengan analisis data kependudukan, dan hasilnya di dalam penerapannya untuk cabang ilmu yang lain, seperti urbanisasi, ketenagakerjaan, distribusi pendapatan (Jati, 2015).

1.2 Ruang Lingkup Ekonomi Demografi

Secara lebih rinci ruang lingkup Ekonomi Demografi dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu Analisis Demografi Formal lebih menekankan pada perubahan dan variasi penduduk dengan menggunakan teknik demografi

tertentu. Di sisi lain jika berbicara tentang Studi demografi, tidak saja berhubungan komponen/variabel penduduk tetapi juga berbicara tentang hubungan antara perubahan penduduk dengan variabel lain seperti perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologi, dan geografi (Hauser and Duncan, 1959a).

Dalam Analisis demografi, variabel yang memengaruhi (variabel independen) atau variabel pengaruh adalah variabel demografis, demikian pula variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) atau variabel terpengaruh juga merupakan variabel demografis. Dengan demikian dalam Analisis Demografi Formal, variabel yang dianalisis baik dependen dan independen variabelnya adalah variabel demografis. Di sisi lain jika berbicara tentang Studi Demografi variabel independen dan dependennya berbeda. Pada Studi Demografi Tipe I, variabel independennya adalah variabel non demografis sedangkan variabel dependennya adalah variabel demografis. Pada Studi Demografi Tipe II, variabel independennya adalah variabel demografis, sedangkan variabel dependennya adalah variabel non demografis. Berikut contoh tentang variabel-variabel yang dianalisis dalam Demografi Formal, dan Studi Demografi (Barclay et al., 2021). Keterkaitan antar variabel dalam Demografi formal dan Studi Kependudukan disampaikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1: Variabel Pengaruh dan Terpengaruh dalam Demografi Formal dan Studi Kependudukan (Yasin & Adioetomo, 2010; Mantra, 2003)

No	Tipe Studi	Variabel Pengaruh	Variabel Terpengaruh
1	Demografi Formal	Variabel Demografis	Variabel Demografis
		Komposisi umur	Tingkat kelahiran
		Tingkat kelahiran	Komposisi umur
		Komposisi umur migran masuk	Tingkat kelahiran seluruh penduduk
		Mortalitas	Komposisi umur penduduk
2	Studi Demografi (Contoh Tipe I)	Variabel Non demografis	Variabel Demografis
		Faktor sosiologis (misal: klas sosial, pendidikan)	Tingkat kelahiran
		Faktor Ekonomi (misal: kesempatan kerja, tingkat upah)	Migrasi keluar Tingkat kematian
3	Studi Demografi (Contoh Tipe II)	Variabel Demografis	Variabel Non Demografis
		Tingkat kelahiran	Kebutuhan pangan
		Migrasi masuk	Kemiskinan
		Tingkat kematian	Pertumbuhan ekonomi

1.2.1 Demografi formal

Komposisi umur penduduk di suatu daerah dapat memengaruhi tingkat kelahiran di daerah tersebut (misalnya penduduk perempuan). Jika sebagian besar umur penduduk di suatu daerah adalah umur muda misalnya 0-14 tahun dan 50 tahun + dan hanya sebagian kecil yang berumur produktif (15-49 tahun), misalnya untuk penduduk perempuan, maka fertilitas yang akan terjadi di daerah tersebut akan rendah, demikian sebaliknya. Di sisi lain jika tingkat kelahiran tinggi di wilayah tertentu, maka komposisi penduduk di wilayah yang bersangkutan akan terpengaruh di mana komposisi/proporsi penduduk muda khususnya 0-4 tahun akan menjadi tinggi di wilayah tersebut, demikian sebaliknya jika tingkat kelahiran rendah, maka proporsi/komposisi penduduk umur 0-4 tahun juga akan rendah.

Jika terjadi migrasi masuk yang tinggi di suatu daerah, maka komposisi penduduk juga akan terpengaruh, misalnya migrasi masuk didominasi oleh penduduk usia produktif misalnya 15-64 tahun, maka komposisi penduduk di daerah tersebut yaitu proporsi usia produktif juga akan terpengaruh yakni semakin meningkat. Demikian pula jika migrasi masuk ke suatu daerah sebagian besar adalah penduduk perempuan usia produktif 15-49 tahun, maka tingkat kelahiran di daerah tujuan akan terpengaruh yakni meningkat kondisinya. Tingkat mortalitas/kematian di suatu daerah juga memengaruhi komposisi penduduk di daerah yang bersangkutan, jika mortalitas penduduk lanjut usia tinggi misalnya 65 tahun +, maka proporsi/komposisi penduduk di wilayah yang bersangkutan juga terpengaruh, di mana komposisi penduduk 65 tahun + akan semakin menurun.

Demikian juga jika mortalitas dalam kondisi yang tinggi seperti mortalitas bayi, maka tingkat fertilitas akan meningkat sebagai cara untuk berjaga-jaga seandainya anak yang dilahirkan meninggal nantinya. Dengan demikian mortalitas bayi yang tinggi dapat menyebabkan fertilitas yang tinggi pula. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa mortalitas bayi secara menyeluruh dapat memengaruhi tingkat kelahiran seluruh penduduk. Beberapa contoh hubungan antar variabel tersebut adalah antar variabel demografis yang dipelajari dalam Ilmu Demografi Formal (Guillard, 1855; Hauser and Duncan, 1959b; Jati, 2015).

1.2.2 Studi Demografi Tipe I

Hubungan antar variabel dalam Studi Demografi Tipe I ini adalah variabel independen berasal dari variabel non demografis dan variabel dependen adalah variabel demografis. Contoh variabel sosial yaitu pendidikan terutama pendidikan perempuan akan memengaruhi tingkat fertilitas dari perempuan yang bersangkutan. Semakin tinggi pendidikan perempuan, maka semakin sedikit jumlah anak yang dimiliki, demikian sebaliknya semakin rendah pendidikan perempuan, maka semakin banyak jumlah anak yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Semakin tinggi pendidikan perempuan semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh perempuan untuk bersekolah, sehingga semakin pendek masa reproduksinya yang menurunkan jumlah anak yang dimiliki, demikian sebaliknya.

Selain itu dengan pendidikan perempuan yang semakin tinggi, maka perempuan juga mengetahui cara-cara untuk pembatasan kelahiran, sehingga jumlah anak/kelahiran akan semakin sedikit. Jika hal ini terjadi pada para perempuan di suatu negara di mana tingkat pendidikannya meningkat maka fertilitas atau tingkat kelahirannya di daerah tersebut akan menurun. Variabel ekonomi seperti ketersediaan kesempatan kerja, maupun tingkat upah yang berlaku di suatu daerah dapat memengaruhi variabel demografis seperti migrasi penduduk. Jika kesempatan kerja sangat terbatas dan tingkat upah yang rendah di suatu daerah dapat memengaruhi migrasi keluar dari daerah tersebut menuju daerah lainnya yang kondisinya lebih baik dibandingkan dengan daerah asalnya. Demikian sebaliknya, jika di suatu daerah tingkat upahnya tinggi atau lebih tinggi daripada tempat yang lainnya, maka dapat menyebabkan migrasi masuk yang tinggi ke wilayah tersebut (Mantra, 2003).

Tingkat pendidikan juga dapat memengaruhi tingkat kematian di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, maka akan semakin meningkat tingkat pemahaman mereka tentang kesehatan. Bagaimana cara hidup sehat secara umum akan dimiliki oleh penduduk yang memiliki pendidikan yang memadai atau pendidikan yang lebih tinggi, sehingga tingkat pendidikan akan dapat memengaruhi tingkat mortalitas. Senada dengan hal tersebut kelas sosial juga dapat memengaruhi tingkat mortalitas penduduk, dalam arti mereka yang memiliki kelas sosial yang lebih tinggi secara umum akan memiliki kelas ekonomi yang lebih tinggi pula, sehingga dapat memengaruhi tingkat mortalitasnya (Yasin and Adioetomo, 2010).

1.2.3 Studi Demografi Tipe II

Pada studi ini variabel demografis memengaruhi variabel non demografis. Sebagai contoh tingkat kelahiran di suatu daerah dapat memengaruhi kebutuhan pangan di daerah yang bersangkutan. Jika kelahiran tinggi, maka kebutuhan pangan akan meningkat demikian sebaliknya. Selain itu semakin tinggi kelahiran, maka kebutuhan akan sandang, pangan, papan akan semakin meningkat, demikian sebaliknya. Migrasi masuk yang tinggi ke suatu daerah, dan daerah yang bersangkutan tidak dapat menyediakan kesempatan kerja yang memadai, maka dapat menyebabkan kemiskinan meningkat di daerah yang bersangkutan, kriminalitas, kondisi perumahan yang kumuh juga dapat terpengaruh karena hal tersebut.

Demikian pula tingkat kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita wilayah yang bersangkutan. Migrasi masuk yang tinggi ke suatu daerah juga memengaruhi berbagai kondisi sosial ekonomi di daerah tujuan seperti kebutuhan pangan, dan kebutuhan hidup lainnya, demikian pula akan memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah atau daerah tujuan tersebut. Demikian juga migrasi masuk yang tinggi ke suatu daerah juga dapat memengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tujuan jika mereka yang masuk ke daerah tujuan memiliki kualitas yang rendah, maka dapat memengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dengan berbagai contoh keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen dapat lebih diperjelas perbedaan antara Demografi Formal/Analisis Kependudukan atau Analisis Demografi dengan Ekonomi Demografi (Achille, 1855; Guillard, 1855, 2013).

1.3 Tujuan Mempelajari Ekonomi Demografi

Berbagai hal dapat diidentifikasi sebagai tujuan mempelajari Ekonomi Demografi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Ilmu Kependudukan bahasanya jauh lebih luas dibandingkan dengan Demografi Formal, sehingga apa yang dipelajari dalam Ilmu Demografi Formal juga akan dipelajari dari Ilmu Kependudukan. Dengan demikian angka-angka secara kuantitatif yang

dipelajari dalam Demografi Formal, juga akan dipelajari dalam Ilmu Kependudukan (Suharto, 2021).

Secara ringkas dapat dikatakan beberapa tujuan mempelajari Ilmu Kependudukan antara lain sebagai berikut.

1. Mempelajari dan memahami kuantitas penduduk di suatu wilayah, kuantitas penduduk di suatu wilayah dapat dibandingkan dengan wilayah yang lain untuk dapat mengetahui berbagai kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya untuk wilayah yang bersangkutan
2. Mempelajari dan memahami perkembangan penduduk di suatu wilayah, dengan memperhatikan perkembangan kuantitas penduduk di suatu wilayah maka akan dapat diperkirakan atau dianalisis bagaimana kondisi perkembangan berbagai komponen demografi yang membentuk kuantitas atau jumlah penduduk tersebut.
3. Mempelajari dan memahami perbandingan dan perbedaan penduduk antar wilayah, dengan melakukan perbandingan jumlah penduduk antar wilayah, dapat diketahui perbedaan perkembangan berbagai komponen demografi di wilayah masing-masing yang membentuk jumlah penduduk tersebut.
4. Mempelajari dan memahami penyebab perkembangan penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk. Perbedaan penyebab perkembangan jumlah penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk di suatu wilayah akan dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang lebih tepat untuk pengendalian jumlah penduduk di wilayah tersebut.
5. Mempelajari dan memahami komposisi/distribusi penduduk di suatu wilayah, baik secara ekonomi, sosial, dan demografi. Dengan mengetahui komposisi atau distribusi penduduk di suatu wilayah, maka akan dapat diperkirakan berbagai kebutuhan di wilayah yang bersangkutan antara lain kebutuhan di bidang sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan sebagainya. Komposisi penduduk atau distribusi penduduk menurut kelompok umur juga

sangat bermanfaat dalam menentukan peluang usaha yang dapat diciptakan.

6. Mempelajari dan memahami cara menghitung tingkat pertumbuhan penduduk, beberapa cara dalam menghitung tingkat pertumbuhan penduduk baik yang menghasilkan prediksi secara poin atau titik dengan berbagai metode seperti aritmetika, geometri, maupun eksponensial, dan prediksi menurut kelompok umur dengan metode komponen sangat berguna dalam melakukan analisis kondisi kependudukan yang terjadi.
7. Mempelajari dan memahami persebaran penduduk menurut wilayah, persebaran penduduk antar wilayah sangat bermanfaat untuk menganalisis peristiwa demografi yang terjadi di wilayah masing-masing yang sangat penting untuk menentukan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
8. Mempelajari dan memahami perkembangan tingkat pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Perkembangan tingkat pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu dapat menunjukkan keberhasilan berbagai program kependudukan dalam rangka pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk secara umum maupun menurut tingkatan daerah tertentu.
9. Mempelajari dan memahami perkembangan dan kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah dari waktu ke waktu. Kondisi ketenagakerjaan juga dapat dipelajari atau diketahui melalui pelajaran ini sehingga inventarisasi atau identifikasi berbagai program atau kebijakan dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan tersebut, dan meningkatkan pemahaman tentang kondisi yang dihadapi.
10. Mempelajari dan memahami hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Fenomena sosial, ekonomi, budaya dan lainnya bukanlah fenomena yang berdiri sendiri tanpa sebab, pelajaran ini memberikan pemahaman tentang keterkaitan berbagai variabel, baik

variabel demografi, maupun variabel non demografi seperti variabel sosial, ekonomi, budaya, psikologi, dan yang lainnya, satu sama lain.

11. Mempelajari dan memahami keterkaitan antar variabel demografi. Keterkaitan antar variabel demografi juga dapat dipelajari dalam materi pelajaran ini, bagaimana variabel demografi juga dapat memengaruhi variabel demografi yang lainnya, menjadi salah satu bagian pengetahuan yang juga dipelajari.
12. Mempelajari dan memahami pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang dan berbagai kemungkinan konsekuensinya, misalnya penurunan *fertilitas*, *aging people*, *mortalitas* dan sebagainya. Berbagai konsekuensi akan terjadi jika terjadi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat ataupun terus menurun akan dapat memberikan konsekuensinya masing-masing pada permasalahan di bidang kependudukan (Mantra, 2003; Yasin and Adioetomo, 2010).

Bab 2

Sumber Data Demografi

2.1 Pendahuluan

Anda mungkin pernah berpikir dan bertanya berapa jumlah penduduk yang tinggal di sebuah kota yang ada di Indonesia? Sebagai contoh anda tinggal di kota Jakarta dan bertanya kenapa kota Jakarta sangat padat penduduknya? Dan berapakah banyak penduduk yang ada di Jakarta?. Kemudian, anda pindah ke kota lain yang mungkin lebih sedikit penduduknya daripada kota Jakarta, misalnya kota Yogyakarta. Apakah memungkinkan untuk menghitung jumlah penduduk yang tinggal di kota Yogyakarta? Jika mungkin berarti kita bisa menghitung jumlah semua penduduk yang ada di Indonesia?

Jawabannya adalah sangat memungkinkan untuk menghitung penduduk di yang tinggal di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Dengan menggunakan sumber data kependudukan kita bisa mengetahui jumlah penduduk, berbagai data mengenai penduduk lainnya dan ciri-ciri kependudukan di Indonesia (Redaksi Ilmu geografi, 2020).

2.2 Pengertian Sumber Data Kependudukan

Sumber data adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintahan, dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data ini bisa berupa berbagai macam bentuk, grafik, angka, tabel dan berbagai macam data statistik lainnya. Nah, untuk sumber data kependudukan sendiri di Indonesia ada sebuah badan resmi pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, menerbitkan, dan juga mengolahnya, yaitu BPS (Badan Pusat Statistik). BPS selaku badan resmi statistik pemerintah Indonesia menggunakan beberapa metode pengumpulan data.

Berdasarkan dari cara pengumpulan data ini, data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer: Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung.
2. Data Sekunder: Data yang diambil dari berbagai sumber resmi lainnya.

Untuk mengetahui piramida penduduk diperlukan beberapa langkah, sehingga kita bisa mendapatkan sumber data kependudukan ini dengan tepat. Menurut ilmu statistik sendiri metode yang dilakukan untuk menghitung jumlah penduduk yang ada di Indonesia, adalah sebagai berikut (BPS, 2019).

Sensus Penduduk

Cara mengetahui jumlah penduduk di Indonesia, atau bahkan digunakan juga di beberapa negara lain adalah sensus penduduk. Sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Di Indonesia sendiri biasanya pengadaaan sensus penduduk diadakan pada tahun yang berakhiran nol (0). Bisa dibbilang sensus ini diadakan setiap 10 tahun sekali dan manfaat sensus penduduk ini sangat menentukan kondisi suatu wilayah kedepannya.

Ada beberapa sensus yang bisa dibagi lagi menjadi beberapa bagian.

1. Sensus berdasarkan jenis: Seperti sensus penduduk, sensus tempat tinggal, sensus pabrik dan industri, sensus pertanian.

2. Sensus berdasarkan tempat tinggal: Dibagi menjadi *de facto* dan *de jure*. *De facto*, tidak membedakan penduduk asli atau pendatang semua orang dicatat pada saat sensus penduduk dilakukan. *De jure*, menunjukkan bukti tempat tinggal, biasanya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), untuk bisa dicatat saat adanya sensus.
3. Berdasarkan Cara Pengumpulan Data: Dibagi menjadi *house holder* dan *Canvasser*. *House Holder*, dilakukan oleh kepala rumah tangga yang mengisi data sendiri untuk kemudian dikumpulkan. *Canvasser*, dilakukan oleh petugas sensus mendatangi dan bertanya kepada pihak keluarga pemilik rumah.

Berdasarkan metode pengisiannya sensus dibedakan menjadi:

1. Metode *Canvasser*, yaitu pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Keunggulan metode ini, data yang diperoleh lebih terjamin kelengkapannya dan penduduk sulit untuk memalsukan data. Sedangkan kekurangannya adalah waktu yang diperlukan lebih lama karena jumlah petugas yang terbatas dan wilayah yang luas.
2. Metode *Householder*, yaitu pelaksanaan sensus di mana pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Kelebihan cara ini adalah waktu yang diperlukan lebih cepat karena petugas tidak harus mendata satu per satu penduduk. Daftar pertanyaan dapat dikirimkan atau dititipkan pada aparat desa. Sedangkan kekurangannya adalah data yang diperoleh kurang terjamin kebenarannya karena ada kemungkinan penduduk tidak mengisi data sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Keunggulan dan kelemahan sensus *de jure*

Keunggulan pelaksanaan sensus *de jure*, di antaranya sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang tercatat adalah penduduk yang betul-betul memiliki bukti kependudukan secara sah dalam sistem pemerintahan.

2. Pelaksanaan sensus tidak harus bersamaan waktunya dan serempak karena hanya penduduk yang memiliki bukti kependudukan yang disensus.
3. Kemungkinan terjadinya pencatatan dua kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat dihindari.

Adapun kelemahan pelaksanaan sensus *de jure* sebagai berikut:

1. Penduduk yang tidak memiliki bukti tanda kependudukan (KTP) tidak akan tercatat sebagai penduduk meskipun orang tersebut lahir dan tinggal di tempat tersebut.
2. Jumlah penduduk yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang sebenarnya.
3. Data hasil sensus apabila digunakan untuk kepentingan perencanaan yang berkaitan dengan layanan publik tidak akurat.

Keunggulan dan kelemahan sensus *de facto*

Keunggulan pelaksanaan sensus *de facto*, di antaranya sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang tercatat adalah jumlah riil di suatu tempat.
2. Dilakukan secara serempak di setiap daerah sehingga data cepat terkumpul dan lebih cepat diolah.
3. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan yang berkaitan dengan layanan publik.
4. Adapun kelemahan pelaksanaan sensus *de facto*, di antaranya sebagai berikut:
5. Kemungkinan pencatatan dua kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat terjadi.
6. Untuk negara kepulauan yang luas diperlukan petugas dan dana yang cukup besar karena harus dilakukan secara serempak.
7. Bagi daerah yang mobilitas penduduknya sangat dinamis, seperti di laut, pesawat, kereta, atau kendaraan lainnya kemungkinan tidak tercatat.

Tujuan sensus penduduk

Tujuan sensus penduduk antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu periode.
2. Mengetahui jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk pada setiap wilayah.
3. Mengetahui berbagai informasi tentang kependudukan, seperti angka kelahiran, kematian, migrasi, dan berbagai faktor yang memengaruhinya.
4. Sebagai sumber data dalam perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan nasional.

Registrasi Penduduk

Di Indonesia registrasi penduduk sudah dilakukan sejak abad ke-19. Registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga mencatat peristiwa penting kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak (adopsi) dan peristiwa penting lainnya. Tujuan dari registrasi adalah pengumpulan data yang bisa di proses guna perencanaan lebih lanjut dalam sebuah pemerintahan. Proses registrasi penduduk sendiri masih terdapat berbagai kelemahan yang terjadi seperti, data yang kurang tepat sehingga tidak mencerminkan data sebenarnya.

Registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia, seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya yang tertulis. Semua catatan itu pada akhirnya dikumpulkan dan dipergunakan sebagai sumber data resmi dalam penghitungan semua peristiwa demografi. Registrasi penduduk didasarkan pada keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977, ditujukan untuk membangun sistem pencatatan yang berlaku menyeluruh dan seragam di wilayah Indonesia. Walaupun mungkin saja terjadi bias pada data demografi yang terkumpul itu, karena bisa saja terjadi kesalahan penulisan data oleh responden tertentu.

Cakupan data yang diperoleh pada registrasi penduduk sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian vital yang terjadi dalam keluarga. Di negara-negara maju, pengumpulan data melalui registrasi umumnya tidak menemui masalah dan hambatan. Sebaliknya di negara-negara

berkembang seperti Indonesia, umumnya data yang dicakup masih kurang lengkap karena banyak peristiwa yang tidak dilaporkan dan data kurang rinci sehingga kurang memadai untuk berbagai analisis kependudukan.

Survei Penduduk

Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara survei penduduk dan sensus penduduk. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data. Jadi menggunakan perhitungan statistik data sampel diambil, sampel tersebut mewakili beberapa kelompok penduduk.

Survei adalah salah satu metode menjaring data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara, melainkan dengan cara penarikan sampel (contoh daerah) sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Sudah barang tentu sebelum menetapkan kawasan sampel itu, ditentukan dulu kriteria apa saja yang bisa dijadikan syarat suatu wilayah bisa ditetapkan sebagai kawasan sampel survei. Setelah ditetapkan sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut, baru dilakukan penghitungan terhadap seluruh responden yang ada di kawasan sampel survei itu. Proses penjaringan data tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan survei.

Berikut ini contoh survei yang biasa dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia:

1. Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS), dilakukan untuk menjaring data mengenai keadaan sosial dan ekonomi penduduk Indonesia secara keseluruhan, dengan cara mengambil sampel penelitian pada wilayah-wilayah yang bisa mewakili karakteristik rakyat Indonesia. Hasil yang diperolehnya nanti akan mewakili rakyat Indonesia secara keseluruhan.
2. Survei Penduduk Antar-Sensus (SUPAS), dilakukan untuk mendapatkan angka jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan dan biasanya dijadikan bahan rujukan dari representasi jumlah penduduk Indonesia dalam setiap kurun waktu tertentu.

Berdasarkan tipenya, survei demografi dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Survei bertahap tunggal (single round surveys)
Survei ini adalah survei untuk menjangkau data berbagai peristiwa demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai berbagai kejadian demografi yang dialami di masa lalu dalam periode tertentu.
2. Survei bertahap ganda (multi-round surveys)
Survei ini dilakukan oleh petugas pencacah jiwa di lapangan dengan melakukan kunjungan kepada responden tertentu berulang-ulang untuk mencatat berbagai peristiwa demografi yang terjadi, seperti kelahiran, kematian, atau migrasi. Tentunya kunjungan itu dilakukan dalam kurun waktu tertentu, apakah per tahun, per dua tahun, per tiga tahun, dan seterusnya.
3. Survei bertipe kombinasi
Survei ini dilakukan dengan cara menggabungkan cara survei tahap tunggal atau ganda dengan cara registrasi. Seperti yang diketahui, registrasi adalah proses pencatatan peristiwa demografi yang diambil dari beberapa peristiwa penting yang terjadi. Hasil dari registrasi ini kemudian digabungkan dan sekaligus dilakukan kroscek dengan hasil kedua jenis tipe survei di atas, yaitu survei tunggal dan ganda.

Jadi dengan cara seperti itu sumber data kependudukan diperoleh, sehingga setelah data diperoleh kemudian langkah selanjutnya adalah menyajikan data dengan berbagai analisisnya untuk ditampilkan dan diumumkan kepada publik.

2.3 Analisis Data Kependudukan

Analisis data kependudukan sangatlah dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data, karena pada dasarnya kependudukan pada suatu daerah bahkan negara, sangatlah dinamis atau mudah berubah-ubah. Untuk itu dibutuhkan adanya komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah suatu pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu.

Contohnya pengelompokan secara geografis, sosial, biologis, dan ekonomi. Dengan kita mengetahui komposisi penduduk, maka kita bisa menarik kesimpulan dari berbagai susunan dan perubahan dinamika kependudukan dari masa ke masa. Dengan begitu, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran dan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). (BPS, 2019).

Ada 2 konsep dan ukuran yang bisa kita pelajari berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Apa saja itu?

1. Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin)

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.

$$SR = MF \times k$$

Keterangan:

SR = Rasio jenis kelamin

M = Jumlah penduduk laki-laki di suatu daerah pada waktu tertentu

F = Jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu

k = Konstanta, nilainya 100

2. Dependency Ratio (Angka Beban Tanggungan)

Angka beban tanggungan atau angka ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dengan banyaknya penduduk yang produktif. Secara kasar angka ini dapat digunakan sebagai indikator ekonomi suatu negara.

$$R = \frac{\text{Jumlah Penduduk Tidak Produktif}}{\text{Jumlah Penduduk Produktif}} \times k$$

Keterangan:

DR = Angka beban ketergantungan

Penduduk tidak produktif = Penduduk umur 0 – 14 tahun dan >65 tahun

Penduduk produktif = Penduduk umur 15 – 64 tahun

k = konstanta, nilainya 100

2.4 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dengan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. SIAK dalam Permendagri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan memiliki definisi bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK di tetapkan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada tanggal 4 November 2019 di Jakarta. Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK diundangkan oleh Widodo Ekadjahjana Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI pada tanggal 19 November 2019 di Jakarta. Pendataan kependudukan dan catatan sipil yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada mulanya dikenal dengan istilah SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) pada tahun 1996.

Namun pada pelaksanaannya di lapangan, sistem ini memiliki banyak kelemahan sebagai sebuah sistem yang mengelola data kependudukan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap SIMDUK, maka Pemerintah Indonesia membuat SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sebagai sistem yang mengolah data kependudukan dan catatan sipil di Indonesia.

Kelebihan dari SIAK selain untuk mendata pendudukan secara akurat tetapi juga dapat memberikan NIK yang secara otomatis dan tetap untuk satu penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda.

Keberadaan sistem informasi administrasi kependudukan akan menghasilkan data kependudukan yang akurat baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga dengan data yang akurat tersebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program Pemerintah lainnya seperti pendataan statistik, menentukan Daftar Pemilih Tetap untuk pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, sebagai acuan pemberian "Bantuan Langsung Tunai" (BLT)/"Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" (BLSM), dan pedoman untuk pengambilan kebijakan publik lainnya.

Bab 3

Pertumbuhan Penduduk dan Variabel Pengaruhnya

3.1 Pendahuluan

Penduduk adalah aset bagi suatu negara bila penduduk dari negara tersebut lebih besar yang berada pada usia produktif, yaitu usia antara 15 – 64 tahun . dalam artian bahwa penduduk tersebut sebagai tenaga kerja siap secara kualitas maupun kuantitas. Jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi oleh kualitas dari penduduk itu sendiri akan merupakan hambatan dalam pertumbuhan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Pertumbuhan penduduk pada suatu negara dipengaruhi oleh berbagai variabel tertentu. Variabel mana yang menyumbangkan jumlah penduduk terbesar adalah berbeda bagi setiap negara. Pada negara yang sedang berkembang variabel yang paling dominan di dalam menyumbangkan jumlah penduduk terbesar adalah variabel angka kelahiran atau natalitas dikurangi dengan angka kematian (mortalitas), sedangkan pada negara maju bisa saja karena perpindahan penduduk dari negara lain ke suatu negara tertentu (emigrasi).

Menurut Jhingan (2004) Pertumbuhan penduduk yang cepat memperberat tekanan pada lahan, dan menyebabkan pengangguran . Belum lagi masalah penyediaan pangan yang luar biasa banyaknya. Bahkan kebutuhan untuk

menyiapkan prasarana cenderung mengalihkan pengeluaran negara dari aktiva produktif. Penyediaan fasilitas pendidikan dan sosial secara memadai semakin sulit terpenuhi. Penjelasan di atas memberitahukan bahwa pertumbuhan penduduk yang besar atau yang tinggi bila tidak berhati-hati akan dapat menghisap pendapatan per kapita.

Akan tetapi menurut Hirschman (2012) Tekanan penduduk pada standar kehidupan akan melahirkan tekanan balik, melahirkan tekanan yang dirancang untuk mempertahankan atau memperbaiki standar kehidupan sehingga kemampuan penduduk untuk menguasai lingkungannya dan untuk mengorganisasikan dirinya sendiri menjadi semakin baik. Meskipun demikian pertumbuhan penduduk merupakan aset yang potensial dalam hal penyediaan sumber daya manusianya yang menjadi tantangan adalah bagaimana negara mempersiapkan penduduk negaranya memiliki sumber daya yang handal dalam pembangunan. Sebab untuk negara-negara yang sedang berkembang, di mana terdapat *labour surplus economy* modal pembangunan tidak dapat digantungkan hanya pada tersedianya atau kemungkinan tersedianya dana investasi, Barthos(1999).

3.2 Pengertian Penduduk

Mengenai Pengertian penduduk para ahli memiliki pandangan sendiri-sendiri. Berikut ini ada beberapa definisi penduduk menurut para ahli. Menurut Kartomo (1986) Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah didiami banyak orang dan menetap di sana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk terlepas warga negara atau bukan. Oleh Ida Bagus Mantra (2009) Penduduk diartikan sebagai pribadi, anggota keluarga, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu. UUD 1945 pasal 26 menyatakan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Selanjutnya menurut UU NO 23 tahun 2006 Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan warga negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Dari beberapa definisi di atas dapat dijelaskan bahwa penduduk adalah sekumpulan individu yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu wilayah

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau jika didefinisikan secara umum merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu, dan dianggap sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan di suatu negara.

Sehingga penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:

1. Orang yang tinggal di negara atau daerah tersebut.
2. Orang yang secara hukum berhak tinggal di negara atau daerah tersebut, yang intinya orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di suatu wilayah. Misalkan adanya bukti kewarganegaraan, namun memilih untuk tinggal di daerah lain.

Penggolongan penduduk menurut tingkat umur dan jenis kelamin:

1. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin sering digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan, seperti kebutuhan tenaga kerja dan wajib belajar (9 tahun).
2. Struktur umur dari suatu Negara dengan Negara lain berbeda, begitu pula antara Negara maju dan berkembang. Hal ini karena struktur umur dipengaruhi oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi.

Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, karakteristik penduduk suatu Negara dibedakan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Ekspansif, jika sebagian besar berada dalam kelompok umur muda. Tipe ini umumnya terdapat pada Negara-negara yang memiliki angka kelahiran dan kematian yang tinggi.
2. Konstruksi, jika penduduk yang berada dalam kelompok termuda jumlahnya sedikit. Tipe ini terdapat pada Negara dengan tingkat kelahiran rendah.
3. Stasioner, jika banyaknya penduduk dalam tipe kelompok umur tertentu. Tipe ini terdapat pada Negara yang memiliki tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar setiap tahun jumlah penduduk Indonesia terus bertambah komposisi penduduk yang besar berada pada kelompok usia produktif sedangkan pada usia di bawah usia produktif dan di atas usia produktif hampir berimbang. Sehingga proyeksi penduduk hingga tahun 2030 terjadi bonus demografi

Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat umum dan jenis kelamin proyeksi tahun 2010 s/d 2030.

Tabel 3.1: Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin (BPS 2020) Tahun 2020 -2030 (x 1000)

Tahun	Laki - Laki	Perempuan
2020	136.142,5	134.923,9
2021	137.587,6	136.396,8
2022	138.989,6	137.832,7
2023	140.347,4	139.230,0
2024	141.659,3	140.587,3
2025	142.924,9	141.904,1
2026	144.144,4	143.180,1
2027	145.317,4	144.414,7
2028	146.442,8	145.606,7
2029	147.519,5	146.754,5
2030	148.547,3	147.857,8

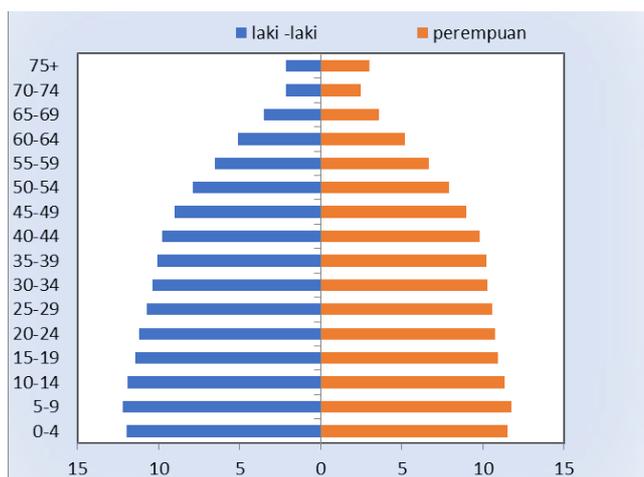
Berdasarkan data tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya, jenis kelamin laki – laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Bila dilihat dari tingkat umur penduduk dengan usia antara 15 – 64 tahun adalah jumlah terbesar. Berikut ini adalah distribusi penyebaran penduduk laki laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2: Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (BPS 2020) Tahun 2020 -2030 (x 1000)

Tahun	Laki - Laki			Perempuan		
	0-14	15-64	65+	0-14	15-64	65+
2020	36.130,5	92.188,4	7.823,6	34.309,7	91.328,9	9.015,5
2021	36.107,4	93.255,4	8.224,8	34.593,3	92.393,4	9.409,5
2022	36.056,1	94.284,9	8.648,6	34.564,7	93.419,4	9.848,6
2023	35.975,5	95.282,0	9.089,9	34.520,4	94.385,5	10.324,1

2024	35.868,6	96.248,7	9.542,0	34.439,6	95.321,3	10.826,4
2025	35.695,1	97.229,3	10.000,5	34.293,3	96.261,1	11.347,6
2026	35.128,7	98.172,7	10.480	34.099,6	97.177,4	11.903,1
2027	35.286,1	99.073,3	10.958	33.892,4	98.048,1	12.474,2
2028	35.072,6	99.926,6	11.443,6	33.681	98.866,3	13.059,4
2029	34.854,8	100.762,2	11.938,6	33.465,8	99.629,9	13.658,8
2030	34.634,4	101.467,8	12.445,1	33.248,4	100.338	14.271,4

Data di atas yang menunjukkan proyeksi penduduk tahun 2020 s/d 2030 menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Data ini memberi gambaran bahwa jumlah penduduk Indonesia bertambah cukup besar setiap tahunnya pertumbuhan penduduk yang tinggi ini harus juga diimbangi dengan meningkatkan kualitas dari penduduk salah satu cara adalah melalui bidang pendidikan karena penduduk Indonesia mayoritas berada pada kelompok umur produktif yakni antara 15 – 64 tahun maka upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk pendekatan paling baik adalah melalui peningkatan pendidikan. Gambaran mengenai komposisi penduduk di atas dapat juga dijelaskan melalui bentuk piramida. Piramida penduduk juga memiliki definisi yang sama dengan usia dan jenis kelamin yang dibuat dalam grafik secara horizontal yang berbentuk piramida.

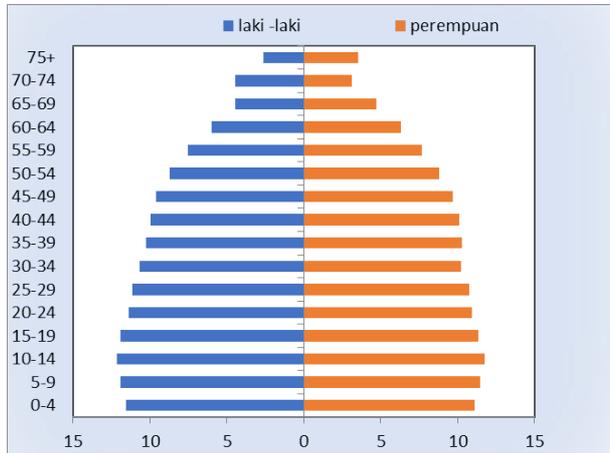


Gambar 3.1: Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2020 (Umur / Juta)

Grafik piramida berikut yaitu tahun 2020, proyeksi 2025 dan proyeksi 2035 bentuknya sudah hampir menyerupai , jumlah penduduk usia 0 - 14 semakin kecil artinya meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk namun tetapi

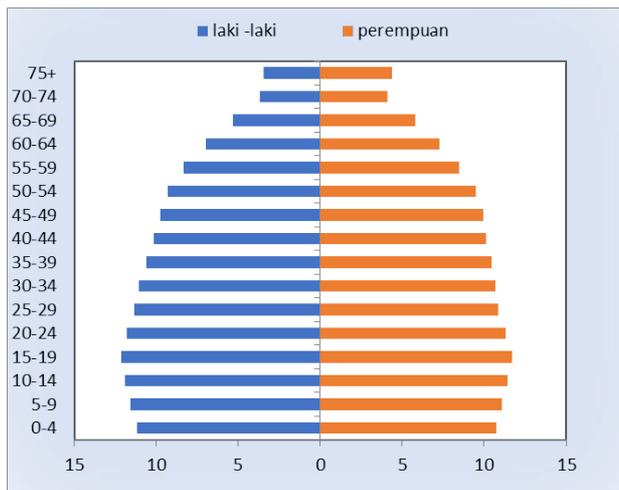
pertambahan secara persentase semakin kecil. Pada kelompok umur 65 ke atas juga terjadi pertambahan jumlah penduduk dengan usia lanjut.

Pada piramida di atas jumlah penduduk dengan kelompok umur 5 – 9 tahun adalah yang terbesar dan yg terkecil adalah kelompok usia 70 -74 tahun.



Gambar 3.2: Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2025 (Umur / Juta)

Proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 memperkirakan bahwa kelompok umur tertinggi ada pada kelompok umur 10 – 14 tahun.



Gambar 3.3: Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2030 (Umur / Juta)

Proyeksi tahun 2035 ,piramida penduduk menggambarkan jumlah kelompok umur tertinggi ada pada umur 15 – 19 tahun. Selama kurun waktu 5 tahun telah terjadi pergeseran jumlah penduduk untuk berbagai kelompok umur.

3.3 Perkembangan Penduduk

Pertambahan penduduk yang terjadi pada suatu negara dapat menimbulkan banyak masalah kependudukan masalah kemungkinan berupa yang dapat terjadi seperti kekurangan pangan penduduk , kekurangan kesempatan kerja , pendidikan tempat tinggal dan lain sebagainya. Banyaknya masalah yang berhubungan dengan penduduk ini menimbulkan kesadaran untuk mengatasi masalah masalah yang berhubungan dengan perkembangan penduduk tersebut. Perkembangan penduduk dunia selalu berfluktuasi tidak ada yang sama di semua negara bahkan daerah pada suatu negara. Berkurang atau bertambahnya penduduk pada suatu negara mempunyai perkembangan yang erat dengan teknologi yang dimiliki negara tersebut. Semakin tinggi tingkat teknologi yang dimiliki oleh suatu negara semakin luas kemungkinan untuk memperbesar hasil hasil produksi dan semakin luas lapangan pekerjaan yang tersedia. Banyaknya lapangan pekerjaan dapat berpengaruh terhadap perkembangan penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk dunia terus bertambah, demikian juga penduduk negara Indonesia , yang saat ini menduduki urutan keempat urutan terbesar untuk jumlah penduduk dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat , Isu kependudukan saat ini telah menjadi isu aktual di Indonesia seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan dinamika kependudukan global . Masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia telah mendorong terjadinya paradigma kebijakan kependudukan secara mendasar di Indonesia. Faturochman dkk (2004). Saat ini jumlah penduduk Indonesia menurut BPS(2020) diproyeksikan adalah sejumlah 271.066.000 jiwa. Pelipat gandaan pertambahan jumlah penduduk yang cepat ini perlu mendapat pengawasan , sebab jika perkembangan penduduk tidak terkendali maka akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data proyeksi penduduk dari tahun 2010 sampai dengan 2035 memberikan gambaran bahwa perkembangan penduduk Indonesia terjadi sangat pesat sekali tabel berikut menunjukkan gambaran jumlah penduduk Indonesia.

Tabel 3.3: Proyeksi Penduduk Indonesia (BPS 2020) Tahun 2010 – 2035
(Ribuan) Tahun Jlh Penduduk Jiwa % Pertumbuhan Penduduk

Tahun	Jumlah Penduduk Jiwa	% Pertumbuhan Penduduk
2010	238.518,8	
2015	255.461,7	1,38
2020	271.066,4	1,19
2025	284.829,0	1
2030	296.405,1	0,8
2035	305.652,4	0,62

Hasil proyeksi di atas menunjukkan perkembangan jumlah penduduk selama dua puluh lima tahun mendatang terus mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. 7 Tahun 2010 penduduk Indonesia berjumlah 238.518,8 ribu jiwa naik sebesar 1,38 % pada tahun 2015 menjadi 255.461,7 ribu jiwa tahun 2025 naik 1,19 % menjadi 284.829 ribu jiwa, tahun 2030 naik 0,8 % menjadi 296.405,1 jiwa dan tahun 2035 diperkirakan naik 0,62 % sehingga menjadi 305.652,4 ribu jiwa.

Proyeksi persentase pertambahan jumlah penduduk sebenarnya terus menurun dari tahun 2010 s/d 2035 masing – masing selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut : 1,38 %, 1,19 % , 1% , 0,08 % dan 0,62 % selisih rata – rata persentase jumlah penurunan juga relatif tinggi. Namun karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar maka secara kuantitatif jumlahnya cukup besar.

3.4 Komposisi Umur Penduduk

Komposisi umur penduduk sangat memengaruhi tingkat pendapatan per kapita dari masyarakat satu negara. Susunan umur penduduk yang lebih besar pada usia non produktif yaitu usia s/d 15 tahun dan 64 akan menurunkan pendapatan per kapita penduduk karena sebagian besar pendapatan akan diserap oleh penduduk usia non usia produktif. Sedangkan bila komposisi umur penduduk lebih besar pada usia produktif maka pendapatan per kapita penduduk akan lebih baik, terjadi Bonus Demografi.

Bila dilihat komposisi umur penduduk Indonesia hasil proyeksi 2010 s/d 2023. Komposisi umur penduduk tertinggi adalah berada pada kelompok usia kerja (usia produktif) yaitu antara usia 15-64 tahun. Untuk lengkapnya dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.4: Proyeksi Umur Penduduk Indonesia (BPS) Tahun 2010 -2035

Tahun	Kelompok Umur		
	0-14 Tahun %	15-64 Tahun %	65 Tahun %
2010	28,6	66,5	5
2015	27,3	67,3	5,4
2020	26,1	67,7	6,2
2025	24,6	67,9	7,5
2030	22,9	68,1	9,0
2035	21,5	67,9	10,5

Tabel hasil proyeksi di atas memberi gambaran bahwa jumlah penduduk Indonesia terbesar adalah pada kelompok umur produktif yaitu kelompok umur produktif yaitu kelompok umur antara 15-64 tahun. Tahun 2010 usia antara 0-14 hanya 28,6 % , usia 15 -64 tahun adalah 66 % Sedang usia 65+ hanya 5 % . Dalam kurun waktu lima tahun yakni tahun 2015 kelompok usia 0-14 tahun turun menjadi 27,30 % sedangkan kelompok umur produktif naik menjadi 67, 3% dan kelompok umur 65 + naik menjadi 5,4 % demikian seterusnya.

Hingga proyeksi tahun 2020 diperkirakan kelompok umur produktif mencapai yang paling tinggi yaitu 68,19 % Selanjutnya kurun 5 tahun berikutnya kelompok umur produktif turun menjadi 67,5 %. Berdasarkan data hasil proyeksi angka ketergantungan umur produktif dengan umur tidak produktif kurun waktu 2010 s/d 2035 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5: Proyeksi Dependency Ratio Tahun 2010 – 2035 (BPS) (Ribuan)

Tahun	Tkt Dependency Ratio (%)
2010	50,5
2015	48,6
2020	47,7
2025	47,2
2030	46,9
2035	47,3

Beban ketergantungan (Dependency Ratio) hasil proyeksi yang disajikan di atas terlihat bahwa terjadi tingkat penurunan dari tahun 2010 hingga tahun

2035 . Meskipun persentase tingkat penurunan relatif rendah . Namun pada tahun 2030 diperkirakan tingkat *dependency ratio* menurun sebagai akibat semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga jumlah umur 65+ persentasenya meningkat tetapi tahun 2035 diperkirakan tingkat *dependency ratio* naik kembali dari 47,2 % tahun 2025 dalam kurun waktu 5 tahun turun menjadi 46,9 % lima tahun kemudian naik menjadi 47,3 %.

Menurut Cicih (2016) Perlu diwaspadai jika terjadi jumlah penduduk lansia yang banyak akan menjadi beban, karena kualitas manusianya rendah , lanjut usia yang tidak sehat berdampak pada biaya kesehatan dan sosial yang tidak sedikit yang pada gilirannya menjadi beban bagi pembangunan. Data di atas memberi gambaran bahwa dalam kurun waktu 5 tahun pertambahan penduduk terus meningkat, meski demikian dari segi angka ketergantungan semakin berkurangnya yang berarti beban ekonomi bagi penduduk umur produktif yang menanggung penduduk umur tidak produktif semakin kecil.

3.5 Variabel – Variabel yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan – kekuatan yang menambah dan kekuatan –kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk . Secara terus – menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur . Sementara itu migrasi juga berperan imigran (pendatang) akan menambah dan emigran akan mengurangi jumlah penduduk. Menurut Todaro, secara kuantitatif tingkat pertambahan penduduk (rate of population increase) diukur sebagai persentase pertambahan (pengurangan) relatif netto dari jumlah penduduk per tahun karena pertambahan alami (natural increase) dan migrasi internasional netto (net international migration) (2011).

Ada 4 variabel yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, Yamin (1981):

Ukuran Dasar Demografi

1. Fertilitas

Fertilitas dalam pengertian demografi adalah kemampuan riil seorang wanita untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Beberapa ukuran dasar fertilitas yang sering digunakan adalah :

- a. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate).
- b. Angka Kelahiran Menurut Umur (Age Specific Fertility Rate).
- c. Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate).

Angka Kelahiran Kasar (CBR)

$$CBR = \frac{B}{P} k$$

B = banyaknya kelahiran pada tahun tertentu

P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun

k = 1000

Angka Fertilitas Total di Indonesia (TFR) dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3.6: Proyeksi Angka Kelahiran Total (TFR) Indonesia Tahun 2010 - 2035

Tahun	TFR
2010 -2015 (2012)	2.442
2015 -2020 (2017)	2.326
2020 -2025 (2022)	2.212
2025-2030 (2027)	2.096
2030 - 2035 (2032)	1.999

Melalui tabel di atas dijelaskan bahwa berdasarkan hasil proyeksi data TFR Indonesia dari tahun 2010 -2015 yang dipilih tahun 2012 adalah 2.442 , tahun 2015 – 2020 yang dipilih tahun 2017 menjadi TFR menjadi 2.326 terjadi penurunan TFR , selanjutnya tahun yang dipilih 2022, TFR juga menurun menjadi 1.995 TFR yang menurun berdasarkan hasil proyeksi di atas menunjukkan penurunan tingkat fertilitas di masa yang akan datang . Artinya meskipun pertumbuhan penduduk terus bertambah tetapi persentase berdasarkan TFR terus menurun .

2. Mortality (Kematian)

Beberapa angka kematian yang sederhana antara lain :

- a. Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate)
- b. Angka Kematian Menurut Umur (ASDR)

Tinggi rendahnya angka kematian dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya, lingkungan dan sebagainya .

Angka Kematian Kasar (CDR)

$$CDR = \frac{D}{P}k$$

D = jumlah kematian

P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun

k = konstante

Tabel 3.7: Proyeksi Angka Kematian Bayi (IMR) Indonesia Tahun 2010 - 2035 (BPS)

Tahun	TFR
2010 -2015 (2012)	28
2015 -2020 (2017)	25
2020 -2025 (2022)	23
2025-2030 (2027)	22
2030 – 2035 (2032)	21

Tingkat kematian bayi berdasarkan estimasi proyeksi IMR tahun 2010 sampai tahun 2035 terus mengalami penurunan tahun 2010 -2020 diambil berdasarkan data 2015 IMR adalah 28. Tahun 2015 – 2020 berdasarkan data 2017 turun menjadi 25, tahun 2022 turun menjadi 23, tahun 2017 turun lagi menjadi 22 dan tahun 2032 turun menjadi 21. Proyeksi estimasi mortalitas di atas membuktikan bahwa tingkat kematian bayi (IMR) *Infant Mortality Rate* di Indonesia semakin kecil atau menurun.

3. Migrasi

Komponen ketiga yang juga memengaruhi besaran penduduk adalah migrasi, ada dua jenis migrasi yaitu:

- a. Migrasi Internasional yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas negara.
- b. Migrasi Internal yaitu perpindahan penduduk yang batas provinsi (BPS)

Untuk menghitung migrasi internasional ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan :

- a. Metode langsung dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan oleh kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi , Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
- b. Metode tidak langsung yaitu *reverse survival ratio* yang bersumber dari data sensus penduduk.

Keterbatasan sumber data menjadi kendala utama dalam menghitung migrasi internasional . Perubahan politik dan ekonomi pada negara asal dan penerima sangat memengaruhi arus migrasi.

Secara umum perhitungan migrasi netto adalah sebagai berikut :

$$\text{Angka Migrasi Netto} = \frac{\text{Banyaknya Migran Masuk} - \text{Banyaknya Migran Keluar}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

4. Angka Pertumbuhan Penduduk (Population Growth Rate atau r)

Angka Pertumbuhan Penduduk (r) menunjukkan rata –rata pertambahan penduduk per tahun pada periode / waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan dengan persen. Beberapa macam ukuran angka pertumbuhan penduduk :

- a. Pertumbuhan Geometri : $P_t = P_0 \cdot (1 + r)^n$
P_t = banyaknya penduduk pada tahun akhir
P₀ = jumlah penduduk pada tahun awal
r = angka pertumbuhan penduduk
n = lamanya waktu antara P₀ dan P_t
- b. Pertumbuhan Eksponensial : $P_t = P_0 \cdot e^{rn}$
e = angka eksponensial 2,71828

Jumlah Penduduk Indonesia pada tahun 2019 menurut kelompok umur adalah sebesar mencapai 266,91 juta jiwa dan tahun 2020 naik menjadi 271,066 juta jiwa (hasil proyeksi), jumlah ini menunjukkan pertumbuhan penduduk selama 1 tahun sebesar 1,5 % .

Bab 4

Ukuran Dasar Demografi

4.1 Pendahuluan

Beberapa peristiwa demografis dapat diukur dengan berbagai cara, di antaranya: rasio, proporsi dan tingkat (rates). Pada umumnya rasio dan proporsi digunakan untuk menganalisis komposisi demografis dari kelompok penduduk. Sedangkan tingkat (rates) digunakan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa demografis dalam jangka waktu tertentu. Banyak perhitungan-perhitungan rasio dan proporsi yang dipergunakan dalam pengukuran-pengukuran demografi. Di antaranya rasio dan proporsi beban Tanggungan, Rasio dan proporsi jenis Kelamin, Rasio anak-anak dan wanita, Kepadatan Penduduk. Sedangkan ukuran tingkatan untuk peristiwa-peristiwa demografis antara lain Tingkat Kelahiran, Tingkat kematian dan Pertumbuhan Penduduk.

Proses bertambahnya jumlah penduduk bertalian dengan fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Bila sistem kependudukan dipandang sebagai sistem “tertutup” untuk migrasi, maka akan menghasilkan tiga model perubahan jumlah penduduk yaitu:

1. jumlah penduduk hanya dapat bertambah, jika fertilitas lebih tinggi dari mortalitas;
2. jumlah penduduk hanya bisa berkurang, jika mortalitas lebih tinggi dari fertilitas; dan

3. apabila fertilitas sama dengan mortalitas, jumlah penduduk akan stabil.

Apabila kita tidak hanya meneliti interaksi dari unsur- unsur vital dalam suatu penduduk tertutup, tetapi kita membuka sistem kependudukan tersebut, maka sumbangan migrasi neto kepada jumlah penduduk juga harus ikut dipertimbangkan. Perpindahan neto mungkin akan menyebabkan jumlah penduduk bertambah, berkurang, atau tidak berubah. Apabila ketiga tipe perpindahan neto tersebut dikombinasikan dengan pola-pola perubahan penduduk yang terjadi karena ada interaksi antara fertilitas dan mortalitas, maka akan diperoleh 13 model perubahan penduduk,

Pertambahan penduduk dapat terjadi bila:

1. Mortalitas lebih tinggi dari fertilitas, tetapi selisih kekurangan fertilitas ini ditutup oleh migrasi neto positif.
2. Mortalitas lebih rendah dari fertilitas, meskipun terdapat migrasi neto positif.
3. Tidak ada migrasi neto.
4. Ada migrasi neto negatif tidak cukup besar untuk mengimbangi kelebihan fertilitas.
5. Mortalitas sama dengan fertilitas dan terdapat migrasi neto positif.

Penurunan penduduk dapat terjadi bila:

1. Mortalitas lebih tinggi dari fertilitas, dan terdapat migrasi neto negatif
2. Tidak ada migrasi neto
3. Bila migrasi neto positif tidak dapat menutup kekurangan penduduk akibat mortalitas yang lebih tinggi
4. Mortalitas lebih rendah dari fertilitas dan migrasi neto negatif cukup besar untuk menghapus tambahan penduduk yang disebabkan oleh keseimbangan dari elemen-elemen vital
5. Mortalitas dan fertilitas sama dan migrasi neto adalah negatif.

Jumlah penduduk tidak akan berubah bila:

1. Mortalitas lebih tinggi dari fertilitas dan migrasi neto positif menutup berkurangnya penduduk akibat kelebihan mortalitas

2. Mortalitas lebih rendah daripada fertilitas dan migrasi neto negatif menghapus penambahan penduduk yang disebabkan oleh kelebihan fertilitas
3. Mortalitas dan fertilitas sama dan tidak ada migrasi neto.

Demografi dan epidemiologi merupakan informasi dasar dari sistem kesehatan, tetapi pengetahuan –pengetahuan sosial dan pengetahuan-pengetahuan dasar medis juga sangat penting untuk memahami kesehatan masyarakat, memberikan suatu petunjuk pengembangan indikator-indikator status sehat dan mengukur pengaruh dari intervensi. Demografi berhadapan dengan antara lain rekaman dari karakteristik dan kecenderungan penduduk dari waktu ke waktu.

4.2 Rasio

Rasio dapat diterjemahkan sebagai “ dibanding dengan” jadi rasio merupakan perbandingan antara 2 kuantitas yaitu kuantitas pembilang (numerator) dan kuantitas penyebut (denominator). Rasio dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio} = \text{Kuantitas numerator} : \text{Kuantitas denominator}$$

Rasio adalah hubungan dari satu sub grup populasi terhadap total populasi. Satu sub grup dibagi grup lainnya.

Contoh:

1. Dalam suatu kejadian luar biasa (KLB) penyakit hepatitis, jumlah penderita laki-laki sebanyak 20 orang dan jumlah penderita perempuan sebanyak 10 orang. maka rasio penderita laki-laki: perempuan = 20: 10 = 2: 1.
2. Rasio jenis kelamin adalah rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan. Biasanya dinyatakan dalam jumlah laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin pada saat lahir di banyak negara adalah 105 atau 106 laki-laki per 100 perempuan. Rasio jenis kelamin adalah penduduk laki-laki= 103 orang (a) / penduduk wanita = 100 orang (b) maka rasio jenis kelamin= a/b =103/100.

3. Rasio beban tanggungan (Age-Dependency Ratio) adalah perbandingan penduduk dengan umur yang menjadi beban (di bawah umur 15 tahun dan lebih dari 64 tahun) dengan penduduk yang produktif (15-64 tahun) dari suatu populasi. Rasio beban tanggungan biasa digunakan sebagai indikator beban ekonomi dari suatu wilayah. Negara dengan angka kelahiran yang tinggi biasanya memiliki rasio beban tanggungan yang tinggi karena proporsi yang besar dari penduduk ialah anak-anak.
Rasio beban tanggungan adalah *penduduk umur kurang dari 15+ penduduk umur lebih 64* / *Penduduk umur 15–64* x 100 misalnya $K = \frac{11.245.500 + 9.015.600}{38.232.800} \times 100 = 53,0$ maka rasio beban tanggungan di sebuah negara pada tahun tertentu adalah 53. artinya ada 53 orang yang menjadi beban dari 100 orang yang produktif.
4. Rasio Beban Tanggungan (RBT) Umur muda adalah RBT umur muda: $\frac{\Sigma \text{penduduk umur } 0-4 \text{ tahun}}{\Sigma \text{penduduk umur } 15-64 \text{ tahun}} \times 100$.
5. Rasio Beban Tanggungan (RBT) umur tua adalah RBT umur tua: $\frac{\Sigma \text{penduduk umur } 65 \text{ tahun keatas}}{\Sigma \text{penduduk umur } 15-64 \text{ tahun}} \times 100$. (Samosir and Rajagukguk, 2015).
6. Demografi adalah diperlukan, akan tetapi bukan faktor-faktor yang cukup untuk menentukan kebijakan Faktor-faktor seperti dana, tenaga, fasilitas yang tersedia, sikap masyarakat dan kemauan politik juga sangat diperlukan.
7. Penggunaan data demografi data langsung berasal dari catatan statistik vital yang menyeret semua kelahiran dan kematian maupun perubahan tertentu dalam status legal seperti pernikahan, perceraian, dan migrasi (registrasi tempat tinggal). Metode tak langsung dalam pengumpulan data adalah diharuskan pada negara- negara di mana data penuh tidak tersedia, seperti kasus dalam banyak dunia berkembang.
8. Ukuran-ukuran Demografi Bilangan Rate/angka Ratio/Rasio Proporsi/persentase Konstanta/bilangan konstan Kohor, prevalensi dan *insidence*.

9. Bilangan Ukuran yang digunakan untuk menunjukkan jumlah absolut/mutlak suatu penduduk atau suatu kejadian/peristiwa demografi yang terjadi di daerah tertentu dalam suatu periode tertentu.
10. Rate/angka Rate/angka adalah jumlah kejadian/peristiwa demografi dalam suatu penduduk dalam periode tertentu (biasanya 1 tahun) dibagi penduduk *at risk* selama periode tersebut. Penduduk *at risk* adalah jumlah penduduk yang menanggung risiko (yang mengalami akibat langsung) peristiwa demografi tersebut. Rate sering diekspresikan per 100 atau per 1000 penduduk, agar lebih mudah dimengerti artinya. Rate ada 2 macam
 - a. angka kasar (Crude Rate) adalah angka yang dipakai untuk menghitung peristiwa demografi penduduk total, termasuk yang tidak menanggung risiko dari peristiwa demografi tersebut;
 - b. Angka spesifik (Specific Rate) adalah angka yang dipakai hanya untuk menghitung peristiwa demografi penduduk yang menanggung risiko dari peristiwa demografi tersebut
11. Ratio/Rasio adalah ukuran perbandingan satu jumlah dengan jumlah yang lainnya atau perbandingan antara dua bilangan, misalnya satu sub grup penduduk dengan sub grup penduduk lainnya. Proporsi/Persentase adalah bentuk pecahan yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebutnya. Bentuk ini sering dinyatakan dalam persen, yaitu dengan mengalikan pecahan ini dengan 100%. Konstanta/Bilangan tetap - biasanya 100, 1000 atau 100.000 di mana *rate*, *ratio*, atau proporsi dapat dikalikan untuk menggambarkan ukuran - ukuran dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti. Dalam rumus, bilangan konstan biasanya ditulis sebagai “k”.
12. Kohor, Prevalensi, dan Insidence Kohor adalah sekelompok penduduk yang mempunyai pengalaman waktu yang sama dari suatu peristiwa demografi tertentu. paling sering digunakan adalah kohor kelahiran.

4.3 Proporsi

Proporsi adalah hubungan dari populasi sub grup terhadap keseluruhan populasi. Proporsi perbandingan antara pembilang (numerator) dengan penyebut (denominator) di mana numerator termasuk/bagian dari denominator, dengan satuan %. Proporsi/Persentase adalah ukuran perbandingan antara dua bilangan, di mana pembilangnya merupakan bagian dari penyebut atau jumlah satu sub grup penduduk dibagi dengan jumlah seluruh penduduk. Bila proporsi ini dinyatakan dalam per 100 (persen), maka proporsi pun berganti nama menjadi persentase.

Oleh karena itu, proporsi/persentase penduduk analoginya mirip dengan *Crude Rate* yang telah dibahas sebelumnya. Proporsi adalah perbandingan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Penyebaran proporsi adalah suatu penyebaran presentasi yang meliputi proporsi dari jumlah peristiwa-peristiwa dalam kelompok data yang mengenai masing-masing kategori atau sub kelompok dari kelompok itu. Pada contoh di atas, proporsi pria terhadap perempuan adalah $P = 10/30 = 1/3$. (Junaidi and Hardiani, 2009)

Ukuran Fertilitas

1. Crude Birth Rate (CBR) Angka kelahiran kasar

Angka kelahiran kasar adalah semua kelahiran hidup yang dicatat dalam 1 tahun per 1000 jumlah penduduk pertengahan tahun yang sama.

Rumus: $CBR = (B/P) k$

CB = semua kelahiran hidup yang dicatat

P = Jumlah penduduk pertengahan tahun yang sama.

k = konstanta (1000) Angka kelahiran kasar ini dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat fertilitas secara umum dalam waktu singkat tetapi kurang sensitif untuk membandingkan tingkat fertilitas dua wilayah. Mengukur perubahan tingkat fertilitas karena perubahan pada tingkat kelahiran akan menimbulkan perubahan pada jumlah penduduk.

2. Age Specific Fertility Rate (ASFR) Angka fertilitas menurut golongan umur.

Angka fertilitas menurut golongan umur adalah jumlah kelahiran oleh ibu pada golongan umur tertentu yang dicatat selama 1 tahun yang dicatat per 1000 penduduk wanita pada golongan umur tertentu pada tahun yang sama. Rumus: $ASFR = (F/R)k$

F = Kelahiran oleh ibu pada golongan umur tertentu yang dicatat.

R = Penduduk wanita pada golongan umur tertentu pada tahun yang sama. Angka fertilitas menurut golongan umur ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan pada angka kelahiran kasar karena tingkat kesuburan pada setiap golongan umur tidak sama hingga gambaran kelahiran menjadi lebih teliti.

3. Total Fertility Rate (TFR) Angka fertilitas total

Angka fertilitas total adalah jumlah angka fertilitas menurut umur yang dicatat selama 1 tahun. Rumus: TFR = Jumlah angka fertilitas menurut umur X.

Ukuran Mortalitas

1. Case Fatality Rate (CFR) Angka kefatalan kasus

CFR adalah perbandingan antara jumlah kematian terhadap penyakit tertentu yang terjadi dalam 1 tahun dengan jumlah penduduk yang menderita penyakit tersebut pada tahun yang sama.

Rumus: $CFR = (P/T)k$

P = Jumlah kematian terhadap penyakit tertentu

T = jumlah penduduk yang menderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. perhitungan ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi. Rasio ini dapat dispesifikkan menjadi menurut golongan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lain-lain.

2. Crude Death Rate (CDR) Angka Kematian Kasar

Angka kematian kasar adalah jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Disebut kasar karena angka ini dihitung secara menyeluruh tanpa

memperhatikan kelompok-kelompok tertentu di dalam populasi dengan tingkat kematian yang berbeda-beda. Rumus: $CDR = (D/P) k$ = jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun

Manfaat CDR:

- a. Sebagai gambaran status kesehatan masyarakat
 - b. Sebagai gambaran tingkat permasalahan penyakit dalam masyarakat
 - c. Sebagai gambaran kondisi sosial ekonomi
 - d. Sebagai gambaran kondisi lingkungan dan biologis
 - e. Untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk
3. Age Specific Death Rate (ASDR) angka kematian menurut golongan umur

Angka kematian menurut golongan umur adalah perbandingan antara jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun pada penduduk golongan umur x dengan jumlah penduduk golongan umur x pada pertengahan tahun.

Rumus: $ASDR = (dx/px)k$

dx = jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun pada golongan umur

px = jumlah penduduk pada golongan umur x pada pertengahan tahun yang sama

k = Konstanta

Manfaat ASDR sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui dan menggambarkan derajat kesehatan masyarakat dengan melihat kematian tertinggi pada golongan umur;
 - b. untuk membandingkan taraf kesehatan masyarakat di berbagai wilayah;
 - c. untuk menghitung rata-rata harapan hidup.
4. Under Five Mortality Rate (UFMR) Angka kematian Balita
- Angka kematian balita adalah gabungan antara angka kematian bayi dengan angka kematian anak umur 1-4 tahun yaitu jumlah kematian

balita yang dicatat selama satu tahun per 1000 penduduk balita pada tahun yang sama.

Rumus: $UFMR = (M/R)k$

M = Jumlah kematian balita yang dicatat selama satu tahun

R = Penduduk balita pada tahun yang sama`

k = Konstanta

Angka kematian balita sangat penting untuk mengukur taraf kesehatan masyarakat karena angka ini merupakan indikator yang sensitif untuk status kesehatan bayi dan anak.

5. Neonatal Mortality Rate (NMR) Angka Kematian Neonatal

Neonatal adalah bayi yang berumur kurang dari 28 hari. Angka Kematian Neonatal adalah jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 28 hari yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Rumus: $NMR = (d1/ B) k$

d1= Jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 28 hari

B = Kelahiran hidup pada tahun yang sama

k = konstanta

Manfaat dari angka kematian neonatal adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui tinggi rendahnya perawatan *post natal*;
- b. untuk mengetahui program imunisasi;
- c. untuk pertolongan persalinan;
- d. untuk mengetahui penyakit infeksi)

6. Perinatal Mortality Rate (PMR) angka kematian perinatal

Angka kematian perinatal adalah jumlah kematian janin yang dilahirkan pada usia kehamilan berumur 28 minggu atau lebih ditambah kematian bayi yang berumur kurang dari 7 hari yang dicatat dalam 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Rumus: $PMR = (P+M/R)k$

P = jumlah kematian janin yang dilahirkan pada usia kehamilan berumur 28 minggu

M =ditambah kematian bayi yang berumur kurang dari 7 hari

R = 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Manfaat dari angka kematian perinatal adalah untuk menggambarkan keadaan kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu hamil dan bayi. Faktor yang memengaruhi tingginya PMR adalah sebagai berikut:

- a. Banyak bayi dengan berat badan lahir rendah Status gizi ibu dan bayi
- b. Keadaan sosial ekonomi
- c. Penyakit infeksi terutama ISPA
- d. Pertolongan persalinan

7. Infant Mortality Rate (IMR) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi adalah perbandingan jumlah penduduk yang berumur kurang dari 1 tahun yang dicatat selama 1 tahun dengan 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Rumus: $IMR = (d0 / B)k$

$d0$ = Jumlah penduduk yang berumur kurang dari 1 tahun.

B = Jumlah lahir hidup pada tahun yang sama

k = Konstanta

Manfaat dari perhitungan angka kematian bayi adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi;
- b. untuk mengetahui tingkat pelayanan antenatal;
- c. untuk mengetahui status gizi ibu hamil;
- d. untuk mengetahui tingkat keberhasilan program kesehatan ibu dan anak (kia) dan program keluarga berencana (kb);
- e. untuk mengetahui kondisi lingkungan dan sosial ekonomi);

8. Maternal Mortality Rate (MMR) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Rumus: $MMR = (I/T)k$

I = adalah jumlah kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas

T = Kelahiran hidup pada tahun yang sama.

k = konstanta

Tinggi rendahnya angka MMR tergantung kepada: Sosial ekonomi, Kesehatan ibu sebelum hamil, persalinan, dan masa nifas, Pelayanan terhadap ibu hamil, Pertolongan persalinan dan perawatan masa nifas

4.4 Rate

Rate adalah bentuk perbandingan yang mengukur kemungkinan terjadinya peristiwa / kejadian tertentu. Rate memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. X = pembilang, adalah jumlah kasus penyakit yang terdapat di dalam populasi atau dalam Sub Group suatu populasi.
2. Y = penyebut, adalah populasi atau sub Group di dalam populasi yang mempunyai risiko untuk mendapatkan penyakit yang bersangkutan.
3. Waktu, misalnya hari, bulan tahun saat peristiwa terjadi.

Contoh: Pada tanggal 23 Juli 2003 di Medan yang berpenduduk 5,000.000 orang, terdapat 50.000 kasus DBD. Rate kasus DBD di Medan adalah: $\text{Rate} = 50.000 / 5.000.000 = 0,01$. Ini berarti bahwa penduduk Medan mempunyai probabilitas untuk penderita DBD seperseratus. Untuk menentukan pembilang juga penuh dengan kesulitan, karena tidak semua kasus penyakit dapat dilaporkan, sehingga pembilang yang sebenarnya mungkin jauh lebih besar dari jumlah kasus yang dilaporkan. Hal ini dapat terjadi pada penyakit menular yang umum, seperti campak, atau banyak kasus penyakit secara klinis tidak didiagnosis dan karena itu tidak dilaporkan seperti penyakit diabetes.

Dalam epidemiologi, bagian dari populasi yang memiliki risiko untuk terjadinya suatu penyakit disebut *population at risk* yakni sekumpulan individu yang belum/ tidak menderita tetapi mempunyai risiko untuk menderita. Kelompok resiko mungkin seluruh penduduk yang ditentukan oleh wilayah geografis, suatu kelompok pekerja, sekolah dan lain-lain. Penduduk yang

berisiko dapat juga orang-orang yang berisiko mendapat penyakit seperti perokok, penyalahgunaan zat atau kelompok orang yang mempunyai kebiasaan makan makanan tertentu.

Setiap penyakit atau efek yang ditimbulkan harus dapat diukur frekuensinya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat secara tepat memperkirakan jumlah populasi yang potensial untuk menderita suatu penyakit (Baum, 2016).

Rate atau Reit adalah Frekuensi dari kejadian demografi dalam suatu populasi selama periode tertentu dibagi dengan populasi yang mengalami pada periode tertentu. Biasanya per 1000 penduduk.

Angka Insidensi

Batasan untuk angka Insidensi ialah proporsi kelompok individu yang terdapat dalam penduduk suatu wilayah atau negara yang semula tidak sakit dan menjadi sakit dalam kurun waktu tertentu dan pembilang pada proporsi tersebut adalah kasus baru.

$$\text{Angka Insidensi} = \frac{\text{Jumlah kejadian dalam waktu tertentu}}{\text{Jumlah population at ris waktu tertentu}} \times K(1000)$$

Dalam menghitung angka insidensi harus mempertimbangkan beberapa hal.

1. Pengetahuan tentang status kesehatan populasi. Kelompok individu dalam populasi status kesehatannya dan diklasifikasikan menjadi “sakit” atau “tidak sakit”. Penemuan ini dapat dilakukan catatan yang ada atau melalui penyaringan atau pemeriksaan lain. Hal ini penting untuk menentukan keadaan awal bahwa penyakit yang akan diteliti pada kelompok individu belum terjadi. Selain itu, penentuan keadaan awal tersebut juga penting bila hasilnya akan dibandingkan angka insidennya harus komparabel dengan variabel-variabel penting yang sama antara kedua kelompok
2. Menentukan waktu awal penyakit. Menentukan *criteria diagnostic* saat mulai timbulnya penyakit bagi kelompok penduduk yang akan dicari insidennya merupakan hal yang sangat penting. Dalam beberapa hal, penemuan ini relatif mudah ditemukan dengan timbulnya gejala, misalnya influenza, gastroenteritis, infark miokard, atau serebral hemoragik.

Walaupun demikian, hendaknya digunakan tanda-tanda sedini mungkin yang dapat ditentukan secara objektif. Misalnya, penyakit kanker ditemukan saat terdiagnosis secara pasti sebagai awal terjadinya penyakit dan bukannya ditentukan berdasarkan keluhan yang dirasakan oleh penderita atau hanya kecurigaan dokter yang memeriksanya.

3. Spesifikasi penyebut. Bila penelitian epidemiologi untuk mencari insidensi penyakit dilakukan dalam jangka waktu lama, tidak semua subjek studi dapat mengikuti sepenuhnya sampai penelitian berakhir dan hal ini disebabkan sebagian ada yang meninggal karena penyakit lain, pindah, atau mengundurkan diri. Dengan alasan lain dan hanya mengikuti pengamatan sebagian waktu, maka batasan atau rumus angka penyebut digunakan *person time* hingga *incidence rate* disebut *person years incidence rate* atau *incidence density* atau *hazard* atau *community incidence rate*.
4. Spesifikasi pembilang jumlah orang vs jumlah kejadian. Contohnya, dalam hal tertentu seseorang dapat mengalami sakit yang sama beberapa kali dalam kurun waktu tertentu, misalnya influenza. Hal ini mengakibatkan dua angka insidensi dari data yang sama, yaitu angka insidensi berdasarkan orang yang menderita dan angka insidensi berdasarkan kejadian penyakitnya.

Angka insidensi berdasarkan penyakit dapat lebih besar dibandingkan dengan angka insidensi berdasarkan penderita, karena dalam periode tertentu seseorang dapat menderita penyakit yang sama lebih dari satu kali, terutama penyakit-penyakit akut yang cepat sembuh dan sering *relaps* seperti *common cold* yang secara umum dikenal sebagai penyakit flu

5. Periode pengamatan. Angka insidensi harus dinyatakan dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun, tetapi dapat juga dalam periode waktu lain asalkan cukup panjang. Misalnya, pada penyakit dalam frekuensi yang sangat sedikit membutuhkan waktu bertahun-tahun. Pada populasi besar, penyebut hendaknya menggunakan penduduk

hasil sensus, misalnya pada pengamatan insidensi penyakit TBC suatu kota.

Pada populasi kecil atau terbatas seperti sekolah atau industri, untuk penyebut digunakan individu yang benar-benar tidak menderita sakit pada saat dilakukan pengamatan. Untuk penyakit dengan insidensi yang terjadi dalam waktu yang pendek digunakan istilah *attack rate* (Bidarti, 2020).

Manfaat insidensi dan prevalensi insidensi:

1. Angka insidensi dapat digunakan untuk mengukur angka kejadian penyakit.
2. Perubahan angka insidensi menunjukkan adanya perubahan faktor-faktor penyebab penyakit.
3. Penurunan angka insidensi menunjukkan keberhasilan program pencegahan.
4. Ukuran insidensi dapat digunakan untuk mengukur besarnya risiko yang ditimbulkan oleh determinan tertentu.

Perhitungan angka prevalensi terdapat 2 ukuran yaitu poin prevalence (prevalensi sesaat) dan periode prevalence (prevalensi periode).

Poin prevalence $\frac{\text{Jumlah semua kasus yang dicatat pada saat tertentu}}{\text{Jumlah penduduk}}$

Ukuran Prevalensi suatu penyakit dapat digunakan untuk:

1. Menggambarkan tingkat keberhasilan program pemberantasan penyakit.
2. Penyusunan perencanaan pelayanan kesehatan, misalnya penyediaan sarana obat-obatan, tenaga dan ruangan.
3. Menyatakan banyaknya kasus yang dapat didiagnosis (Baum, 2016).

Rate dan rasio yang umum digunakan dalam mortalitas:

1. CDR (Crude Death rate) Angka Kematian Kasar = jumlah kematian dari semua penyebab per 1000 penduduk pada tahun tertentu = $A/B \times 1000$ (total kematian/populasi rata-rata x 1000)

2. Angka usia kematian spesifik = jumlah kematian dalam kelompok usia yang spesifik per 1000 penduduk hidup dalam kelompok usia tersebut pada periode tertentu, biasanya 1 tahun.
3. Angka penyebab kematian spesifik = jumlah kematian akibat penyebab yang spesifik per 100.000 penduduk hidup. Contoh, Jika jumlah kematian tahunan akibat cancer paru-paru pada satu tahun tertentu adalah $400/1000.000 = 40$ kematian karena cancer paru-paru per 100.000 penduduk.
4. CFR (Case fatality rate) Angka kematian kasus = jumlah kematian akibat penyebab tertentu selama periode tertentu atas jumlah penyakit yang didiagnosis selama periode yang sama $\times 100$. Contoh 10 kematian karena penyakit campak di antara 5000 kasus adalah CFR dari $10/5000 \times 100 = 0,2 \%$
5. Proportional Mortality Rate (PMR) untuk sebab tertentu = jumlah kematian dari penyebab tertentu dalam jangka waktu tertentu atas jumlah total dari kematian dalam populasi dalam waktu yang sama $\times 100$. Contoh 25 kematian dari jalan Crashes /1000 total kematian dari semua penyebab $\times 100 = 2,5 \%$ (penyebut mencakupi pembilang (denominator includes numerator) (Bidarti, 2020)

Bentuk-bentuk kematian terutama sekali dapat dipelajari dalam satu tahun tertentu atau dari waktu ke waktu. Statistik kematian merupakan dasar dari epidemiologi dan menyediakan data yang lebih terpercaya. Analisis epidemiologi untuk data mortaliti tergantung pada pencatatan kematian dengan didasarkan pada data demografi dan penyebab kematian seperti yang direkam oleh sertifikat dokter (Marhaeni,)

Perubahan bentuk kematian bisa terjadi sebagai akibat dari sejumlah faktor yang memengaruhi akibat penyakit seperti perubahan kondisi sosial-ekonomi, pencegahan penyakit atau cara-cara merawat penyakit. Kriteria diagnosa atau keakuratan pencatatan kematian bisa juga berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian perubahan mortaliti sebagai refleksi dari perubahan timbulnya penyakit atau angka kejadian kematian (CFR) berhubungan dengan cara-cara perawatan dan akses perawatan atau klasifikasi penyakit (Ismah, 2018).

Demografi didefinisikan sebagai studi populasi yang menyangkut: ukuran dan kepadatan, fertilitas, mortalitas, pertumbuhan, distribusi usia, migrasi dan statistik-statistik yang penting tentang kependudukan yang semuanya terintegrasi dalam kondisi sosial ekonomi.

Statistik kependudukan yang penting meliputi: kelahiran, kematian, jenis kelamin, penduduk menurut umur, status pernikahan, status sosial ekonomi dan migrasi.

1. Data kelahiran berasal dari pelaporan wajib kelahiran
2. Data kematian diperoleh dari sertifikat kematian
3. Sumber-sumber data lainnya tentang penduduk seperti catatan pernikahan, perceraian, adopsi, emigrasi, imigrasi, ekonomi, dan statistik.
4. Angkatan kerja disusun oleh lembaga pemerintah yang terkait, data sensus, dan data dari survei khusus rumah tangga.

Demografi mengukur kejadian dari waktu ke waktu seperti indeks kelahiran dan tingkat kematian, pola perumahan desa-kota, tingkat pernikahan dan perceraian serta berbagai kondisi sosial ekonomi. Sejak kesehatan masyarakat dikaitkan dengan penyakit yang terjadi pada penduduk, penjelasan tentang penduduk dan karakteristiknya merupakan hal yang sangat penting (Samosir and Rajagukguk, 2015).

Sensus adalah perhitungan penduduk yang meliputi rekaman identitas semua penduduk di setiap tempat tinggal pada waktu tertentu. Sensus memberikan informasi penting tentang semua anggota rumah tangga, termasuk usia, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, pendapatan, hubungan dengan kepala rumah tangga, tingkat pendidikan, melek huruf dan status kesehatan misalnya cacat permanen). Sensus juga memberikan informasi lainnya tentang rumah (tempat tinggal) meliputi: jenis bangunan, jumlah kamar, listrik peralatan rumah utama (seperti kompor, kulkas), toilet dan fasilitas kamar mandi (misalnya, bak mandi, shower), kepemilikan kendaraan, pemanas rumah, pengeluaran untuk membeli makanan, pakaian, hiburan dan barang-barang konsumsi lainnya.

Sensus memberikan penjelasan tentang lokasi tempat tinggal setiap individu yang diukur berdasarkan waktu (*de facto*) atau tempat yang biasa ditinggali (*de jure*). Bidang sensus adalah wilayah geografi terkecil yang mana data sensus terkumpul dan diterbitkan. Data untuk wilayah geografi yang luas juga

diterbitkan. Data yang lebih luas dapat pula dikumpul dengan persentase penduduk yang kecil.

Data sensus diterbitkan dalam volume berseri yang multipel, tersedia untuk riset pada disks-disk komputer dan pada internet. Biasanya survei antar sensus dilaksanakan untuk menentukan kecenderungan data-data ekonomi dan geografi yang penting seperti, pendapatan keluarga, nutrisi, pekerjaan dan indikator-indikator sosial lainnya (Harmadi, 2008).

Transisi demografi terjadi ketika adanya perubahan substantif dalam distribusi umur penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh angka kelahiran dan angka kematian, meskipun faktor-faktor lain seperti migrasi, peperangan, kekacauan politik, kelaparan dan bencana alam berpengaruh pada distribusi penduduk. Perubahan susunan-susunan penduduk disertai pula dengan perkembangan ekonomi diketahui sebagai proses transisi demografi.

Berikut ini adalah ciri-ciri yang sering terjadi pada transisi demografi:

1. Tradisional: angka kelahiran dan kematian yang tinggi dan seimbang.
2. Transisi: penurunan angka kematian dan angka kelahiran yang terus menerus (tinggi.)
3. Pergerakan yang lambat: angka kematian dan kelahiran yang rendah dan seimbang.
4. Kekelabuan penduduk: meningkatnya proporsi orang tua sebagai hasil dari kenaikan kembali angka kelahiran dan kematian dan kenaikan harapan hidup.
5. Regresi: migrasi atau kenaikan angka kematian di antara penduduk dewasa karena trauma. AIDS, penyakit jantung dini atau akibat peperangan secara terus menerus atau menurunnya umur panjang.
6. Fertility, mortality, bentuk (pola) penyakit dan migrasi adalah pengaruh utama terjadinya transisi penduduk. Banyak faktor yang memengaruhi penurunan angka kelahiran dan kenaikan umur panjang.
7. Pertumbuhan penduduk terutama dipengaruhi oleh, kelahiran dan tingkat kematian, meskipun faktor-faktor lain seperti migrasi, perang, kekacauan politik, kelaparan, bencana alam dapat memengaruhi distribusi penduduk.

Faktor-faktor yang memengaruhi penurunan angka kelahiran:

1. Pendidikan, khususnya perempuan
2. Penurunan kematian bayi dan anak
3. Pembangunan ekonomi, meningkatkan standar hidup dan tingkat pendapatan.
4. Urbanisasi, perubahan kebutuhan keluarga berbanding dengan masyarakat desa.
5. Pengendalian kelahiran. Penyediaan kebutuhan, mudah dicapai dan berpengetahuan
6. Kebijakan pemerintah meningkatkan kontrol terhadap fertilitas sebagai ukuran kesehatan.
7. Media massa ; meningkatkan kesadaran pengendalian kelahiran dan aspirasi untuk standar hidup yang lebih tinggi
8. Pengembangan sistem kesehatan termasuk perawatan medis
9. Perubahan status ekonomi, peran sosial dan citra diri perempuan
10. Perubahan nilai-nilai sosial, agama dan ideologi politik

Faktor-faktor meningkatkan umur panjang

1. Meningkatkan pendapatan keluarga dan standar hidup
2. Peningkatan gizi, pasokan makanan, distribusinya, kualitasnya, dan pengetahuan tentang makanan.
3. Pengendalian penyakit menular
4. Penurunan mortalitas karena penyakit tidak menular
5. Air bersih, limbah dan pembuangan sampah dan kondisi perumahan yang memadai
6. Pencegahan penyakit, mengurangi faktor risiko, mempromosikan gaya hidup sehat
7. Pelayanan perawatan klinis dengan meningkatkan akses dan kualitasnya
8. Promosi kesehatan dan kegiatan pendidikan komunitas, masyarakat dan individu
9. Sistem jaminan sosial, tunjangan anak, pensiun dan asuransi kesehatan nasional

10. Kondisi kerja, rekreasi, ekonomi dan kesejahteraan sosial (Baum, 2016).

4.5 Ukuran Dasar Teknik Analisa Kependudukan

Pengukuran (Measurements)

Interpretasi secara statistik membutuhkan kedekatan dengan metode-metode informasi dasar sekumpulan orang dalam pengelolaannya. Statistik adalah ilmu dan seni dari mengumpulkan, meringkaskan dan menganalisis data yang pokok persoalannya adalah variasi *random*. Biostatistik adalah penerapan statistik untuk persoalan-persoalan biostatistik. Variabel adalah suatu faktor yang dipelajari yang dianggap memengaruhi status kesehatan dan yang bisa diukur. Ini mungkin sebuah atribut, fenomena atau bahkan yang bisa mempunyai nilai-nilai yang berbeda seperti umur, jenis kelamin, status sosio ekonomi atau paparan agen toksik atau agen infeksi.

Variabel independen adalah hasil yang dipelajari. Suatu variabel independen adalah karakteristik yang diamati atau diukur yang dihipotesiskan menyebabkan atau memberikan kontribusi dengan hasil yang sedang dipelajari, tetapi tidak hanya dipengaruhi oleh masalah itu sendiri. Variabel nol adalah asumsi bahwa satu variabel tidak mempunyai hubungan dengan variabel lainnya dan dua atau lebih populasi yang sedang dipelajari tidak berbeda satu dengan lainnya. Tes statistik digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol membandingkan distribusi suatu populasi dengan populasi lainnya mungkin ditolak atau diterima. Tes statistik demikian memberikan dasar untuk menyimpulkan atau memutuskan mengenai hasil studi seperti signifikan secara statistik. (Tulchinski, 2016)

Suatu *confounding* variabel (variable perancu) adalah faktor lain dari suatu faktor yang dipelajari (diteliti) yang keduanya berhubungan dengan penyakit (dependent variable) dan dengan faktor yang sedang dipelajari (independent variable). Suatu *confounding variable* dapat mengganggu pengaruh-pengaruh dari variabel lain pada penyakit yang bersangkutan. Contoh, sebuah hipotesis bahwa peminum kopi mempunyai penyakit jantung yang lebih parah

dibandingkan dengan yang tidak peminum kopi mungkin dipengaruhi oleh faktor lain. Peminum kopi mungkin menghisap lebih banyak rokok dari pada bukan peminum kopi, jadi merokok adalah *confounding* variabel, karena merokok pada awalnya tidak diselidiki. Meningkatnya penyakit jantung mungkin karena merokok bukan karena kopi (Nangi, Yanti and Lestari, 2019)

Klasifikasi Sosial adalah hubungan timbal balik antara suku bangsa yang bekerja di kota atau hidup dikota (*ethnicity*) dan penyakit atau kematian sering berkedok faktor-faktor ekonomi lainnya, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi atau kurangnya akses kesehatan di antara kelompok-kelompok Afrika–Amerika dan kelompok-kelompok hispanic di Amerika Serikat atau kelompok-kelompok imigran di negara-negara Eropa. Karena ada variasi yang luas dalam tingkat sosial-ekonomi atau tingkat pendidikan di dalam kelompok-kelompok etnik dan kelompok-kelompok Ras dan banyak faktor-faktor luar biasa lainnya dalam *ethnicity* atau ras yang memengaruhi bentuk-bentuk penyakit secara kuat, menganalisis data dengan klasifikasi cara ini harus diinterpretasi dengan hati-hati. (Baum, 2016)

Kelas-kelas sosial semakin diidentifikasi sebagai variabel utama dalam status kesehatan. Ini berguna sebagai wakil dari ukuran untuk isu-isu yang banyak berhubungan dengan kesehatan seperti, gizi, akses perawatan dan ketergantungan pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, kesempatan yang kecil untuk pengembangan diri, atau kurangnya perlindungan. Variasi-variasi kelas sosial dalam status kesehatan ada bahkan pada akses sistem kesehatan universal yang dibangun dengan baik, tetapi perbedaan-perbedaan sosial kurang diperbincangkan di negara-negara Nordic di mana kesenjangan sosial umumnya kurang dari pada negara-negara yang pembangunan sistem kesejahteraan sosial nya kurang. (Baum, 2016)

Beban Penyakit (The Burden of Disease)

Beban penyakit (BOD) diukur dengan mengombinasikan data morbiditas dan mortalitas. Konsep BOD digunakan dalam menguji masalah-masalah kesehatan dari sudut pandang internasional dalam menentukan biaya intervensi yang efektif terutama pada negara-negara berkembang. Hal tersebut membantu menentukan tempat-tempat yang diprioritaskan untuk persediaan sumber-sumber daya, dan untuk memfokuskan bantuan internasional untuk membantu negara-negara penerima. BOD makin banyak digunakan sebagai instrumen penelitian epidemiologi. Bagaimanapun pendekatan ini mungkin juga

termasuk dan topeng sosial (mask sosial) dan faktor-faktor penyakit yang berasal dari banyak faktor.(Mubarak, 2009)

Ukuran-ukuran beban penyakit:

1. Tahun Kehilangan Kehidupan Potensial (YPLL), adalah ukuran dari dampak penyakit tertentu atau kondisi masyarakat dengan mengukur jumlah tahun yang hilang karena kematian dini akibat dari penyebab tertentu, ada orang-orang yang tinggal dalam waktu hidup normal dibandingkan dengan jumlah orang yang meninggal akibat penyakit.
2. Cacat – tahun penyesuaian hidup (DALY), adalah unit untuk mengukur beban global penyakit dan intervensi kesehatan yang efektif serta perubahan kondisi hidup. DALY dihitung sebagai nilai masa kini untuk hidup bebas dari kecacatan pada tahun-tahun mendatang yang hilang sebagai akibat dari kematian prematur atau kecacatan yang terjadi pada tahun tertentu.
3. Kualitas – tahun penyesuaian hidup (QALY), adalah suatu penyesuaian diri atau penurunan harapan hidup sebagai refleksi kondisi kronis, cacat, suatu yang merugikan, data diperoleh dari survei, data yang dikeluarkan rumah sakit atau data lainnya. Numerik bobot dari keparahan kecacatan ditetapkan berdasarkan kondisi pasien dan keputusan profesional kesehatan.
4. Tahun-tahun Hidup Potensial yang Hilang (Years of Potential Life Lost). Tahun hidup potensial yang hilang (YPLL) dihitung berdasarkan tingkat umur tertentu untuk kematian atau cacat. Keduanya memberikan perbaikan pada epidemiologi dapat menambah pandangan baru dalam menganalisis masalah-masalah tertentu. Penyebab kematian yang terkemuka di Amerika seperti juga negara-negara maju lainnya adalah penyakit jantung koroner, cancer dan stroke. Namun ketika diperiksa data dari sudut pandang tahun potensial hidup yang hilang, trauma, pembunuhan, bunuh diri menjadi penyebab kematian yang terkemuka. Tahun hidup potensial yang hilang adalah refleksi yang lebih baik dari dampak penyakit dari pada angka kematian lainnya dan dipakai dalam menghitung penentuan prioritas kesehatan nasional.

5. Ukuran Kualitatif dari Morbiditas dan Mortalitas. QALY dan DALY, adalah perhitungan *morbidity* yang diperkenalkan baru-baru ini dalam literatur kesehatan internasional. Istilah-istilah lainnya yang digunakan termasuk harapan hidup bebas dari kecacatan (DFLE) dan harapan hidup sehat, ukuran-ukuran *morbidity* dan *mortality* dan juga kecacatan. Ukuran-ukuran BOD digunakan untuk menilai efektivitas biaya intervensi tertentu. Bank Dunia menghitung variasi BOD antara wilayah demografi dan variasi dari hampir 600 DALY yang hilang per 1000 penduduk di sub negara Sahara Afrika dibandingkan dengan sekitar 120/1000 di negara-negara industri. Ukuran-ukuran tersebut digunakan dalam analisis ekonomi status kesehatan untuk membantu memfokuskan hasil-hasil pengukuran untuk membenarkan alokasi sumber daya dengan membandingkan manfaat dalam hal menurunkan morbiditas dan mortalitas. (Baum, 2016)

Kemungkinan kesalahan-kesalahan dalam pengukuran

Data harus ditaksir secara benar, dapat dipercaya dan konsekuen. dan dipertimbangkan hal yang masuk akal secara biological. Semua tingkat efek yang disimpulkan bisa di buat dan digeneralisasi diambil dari sampel penyelidikan. Reliabilitas adalah tingkat kestabilan data jika diukur berulang kali di bawah kondisi yang sama. Jika ditemukan dari dua orang yang melakukan tes yang sama (seperti pengukuran tekanan darah) dengan sangat teliti, observasi memperlihatkan suatu derajat reproduktivitas yang tinggi antar pengamat. (Tulchinski, 2016)

Instrumen standardisasi, pendidikan pengamat dalam ukuran yang umum dan standardisasi catatan observasi diperlukan untuk standar satu set data dari variability yang dijamin dapat diterima. Mengukur pasien yang sama pada waktu yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda seperti mengukur tekanan darah atau mengukur gula darah. kondisi standarisasi pencatatan dan pemilihan waktu tes seperti itu sangat diperlukan untuk menjamin perbandingan data. Standardisasi tes diperlukan sebagai bahagian dari kualiti kontrol, pengiriman sampel tes dalam sebuah laboratorium untuk sebuah rekomendasi laboratorium untuk melihat hasil tes yang sama. Ini penting untuk meminimalkan sumber-sumber yang bias.

Sumber-sumber bias:

1. Bias Asumsi: Kesalahan dari logika yang salah, tempat atau asumsi-asumsi pada studi dasar.
2. Bias respons: kesalahan sistematis karena perbedaan antara yang dipilih dan sukarela dengan mereka yang tidak dipilih dan tidak sukarela.
3. Bias seleksi: kesalahan karena masuknya orang-orang yang muncul dan termasuk dalam studi meninggalkan mereka yang tidak datang karena telah meninggal, ada pengobatan tanpa perawatan tidaklah menarik.
4. Bias sampling: salah jika metodologi sampling tidak menjamin semua anggota populasi yang direkomendasi diketahui dan mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi.
5. Bias observer: salah jika membedakan antara observer –observer atau antar observer atau observer yang sama berbeda kesempatan.
6. Bias deteksi: kesalahan sistematis karena metode yang salah dalam mendiagnosis atau memverifikasi kasus dalam survei.
7. Bias design: bias sistematis karena kesalahan design dalam studi.
8. Bias informasi: kelemahan dalam mengukur paparan atau hasil yang dihasilkan dalam data yang tidak sebanding.
9. Bias Mengukur instrumen: Kesalahan kalibrasi, mengukur instrumen tidak akurat, bahan reaksi (reagen) yang terkontaminasi, pengenceran yang salah/pencampuran reagen.
10. Bias Pewawancara: seleksi sadar dan bawah sadar dalam pengumpulan data.
11. Bias pelaporan: laporan diri yang dilaporkan secara seleksi, menekan atau melebih-lebihkan informasi misalnya sejarah dari STDs.
12. Bias publikasi: editor lebih memilih hasil positif sehingga dugaan penyimpangan suatu masalah dapat terjadi.
13. Bias karena penarikan: hilangnya kasus dari sampel dengan penarikan atau tidak dimunculkan untuk ditindak lanjuti.

14. Bias ascertainment: kesalahan karena tipe pasien dilihat oleh pengamat atau dalam proses diagnosis dipengaruhi oleh budaya, adat, atau keistimewaan dari provider perawatan (Baum, 2016).

Bab 5

Komposisi Penduduk

5.1 Pendahuluan

Dalam perencanaan pembangunan, kependudukan memegang peran penting di dalamnya. Kependudukan adalah segala hal yang berkaitan dengan kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), serta perpindahan (migrasi) yang memengaruhi keadaan sosial, ekonomi, budaya maupun politik suatu negara. Makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia makin mudah dan tepat rencana pembangunan itu dibuat. Sebagai contoh, dalam perencanaan sumber daya manusia diperlukan data mengenai jumlah penduduk dalam usia sekolah, dan para pekerja. Banyak lagi contoh-contoh lain tentang data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan.

Beberapa masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan adalah pengangguran, upah minimum, dan minimnya lapangan pekerjaan. Untuk mengatasi hal tersebut di mana jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak hingga mencapai nomor 4 penduduk terbanyak di dunia, bisa dapat dipecahkan dengan data kependudukan yang akurat dan kebijakan pemerintah baik dari sisi pendidikan, perundang-undangan, perluasan lapangan kerja, pelayanan informasi, upah pekerja dan lain sebagainya.

5.2 Komposisi Penduduk

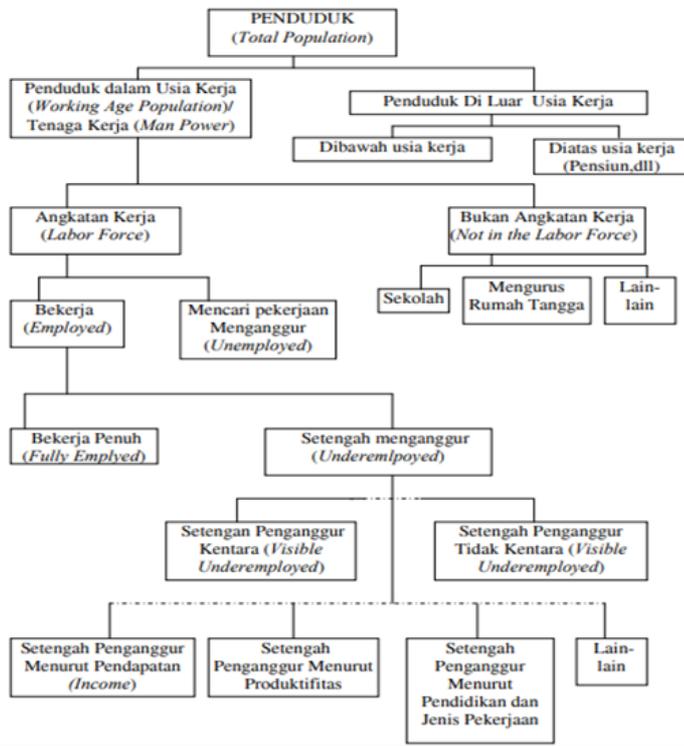
Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu misalnya secara geografis, biologis, sosial dan ekonomi (Bagoes, 2003). Menurut Said (1983), komposisi penduduk dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Perkembangan penduduk secara kuantitas dapat dilihat dari perubahan komposisi penduduk terutama berdasarkan kelompok umur.

Kedua variabel ini sangat memengaruhi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin ini sangat penting bagi pemerintah sebuah negara untuk menentukan kebijakan kependudukan mereka untuk beberapa tahun ke depan. Komposisi umur dapat dipahami dengan lebih mudah melalui gambaran piramida penduduk, terutama untuk melihat apakah penduduk tersebut didominasi pada usia belum produktif, usia produktif atau usia tua (tidak produktif) (Bagoes, 2003).

Mulyadi (2014), mengemukakan beberapa macam pengelompokan yang diklasifikasikan penduduk sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek biologis, merupakan penduduk di suatu desa digolongkan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Umur penduduk dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
 - a. umur 0-14 tahun dinamakan usia muda/usia belum produktif;
 - b. umur 15-64 tahun dinamakan usia dewasa/usia kerja/usia produktif; dan
 - c. umur 65 tahun ke atas dinamakan usia tua/usia tak produktif/usia jompo.
2. Berdasarkan aspek sosial merupakan penduduk digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan dan status perkawinan. Komposisi penduduk menurut pendidikan Berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang telah ditamatkan penduduk dapat dikelompokkan dalam tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Pengelompokan ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya tingkat pendidikan penduduk.

3. Berdasarkan aspek ekonomis merupakan penduduk digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Komposisi penduduk menurut pekerjaan dapat dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh tiap orang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain pegawai negeri sipil, TNI, POLRI, buruh, pedagang, petani, pengusaha dan sopir.
4. Berdasarkan aspek geografis merupakan penduduk digolongkan berdasarkan lokasi tempat tinggal. Tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk di desa dan di kota. Ciri khas negara agraris seperti Indonesia adalah sebagian besar penduduk tinggal di desa.



Gambar 5.1: Struktur Komposisi Kependudukan (Hanafie, 2010).

5.2.1 Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin dan pekerjaan

Komposisi penduduk berdasarkan usia.

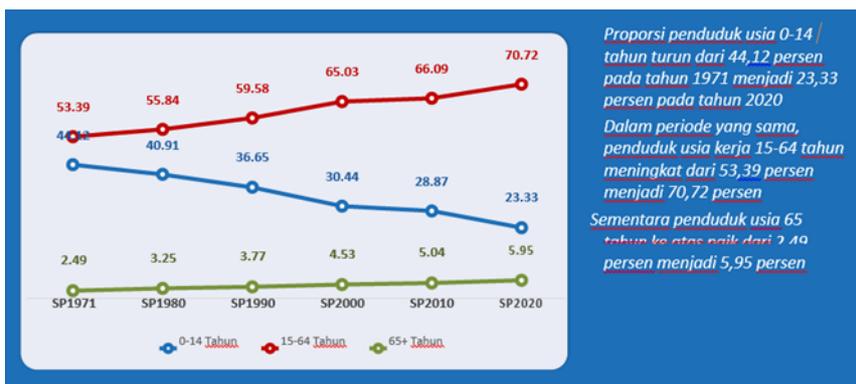
Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal, seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun atau lebih. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu, seperti 0-5 (usia balita), 6-12 (usia SD), 13-15 (usia SMP), 16-18 (usia SMA), 19-24 (usia Perguruan Tinggi), 25-60 (usia dewasa), dan > 60 (usia lanjut). Selain itu komposisi penduduk juga dapat didasarkan terhadap usia produktif dan usia non produktif, misalnya: usia 0-14 (usia belum produktif), 15-64 (usia produktif), dan usia > 65 (tidak produktif).

Penggunaan data komposisi penduduk berdasarkan usia adalah dalam perencanaan program Wajib Belajar (Wajar). Dengan mengamati dan menganalisis jumlah penduduk tiap-tiap kelompok usia maka dapat diketahui berapa jumlah anak yang harus bersekolah, sarana dan usia prasarannya, berapa jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tersebut, berapa jumlah sekolah yang dapat melayani kegiatan belajar mengajar, dan lain-lainnya.

Contoh berdasarkan usia produktif dan usia non produktif, yaitu dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan mengetahui jumlah penduduk tiap tingkatan usia maka dapat dirancang bentuk dan arah pembangunan, apakah akan dikembangkan pembangunan yang padat modal atau padat karya. Data komposisi penduduk berdasarkan usia juga dapat digunakan menghitung kebutuhan serta cadangan pangan nasional. Komposisi penduduk berdasarkan usia produktif dan nonproduktif dapat digunakan untuk menghitung angka ketergantungan (dependency ratio). Angka ini penting diketahui karena dapat memperkirakan beban tiap penduduk nonproduktif untuk menopang kebutuhan hidupnya.

Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan penduduk dengan usia produktif (15-65 tahun). Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia nonproduktif. Penduduk usia produktif akan terbebani oleh penduduk yang tidak berkualitas untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi mereka sendiri, keluarga, maupun masyarakat (Bagoes, 2003).

Semakin besar angka ketergantungan, akan semakin besar pula beban penduduk dalam menopang kehidupan dan akan memengaruhi komposisi penduduk. Hal ini biasanya terjadi di negara berkembang dan terbelakang, di mana angka ketergantungan umumnya masih besar. Artinya jumlah penduduk usia non produktif jumlahnya masih besar, sehingga penduduk usia produktif harus menanggung kehidupan penduduk usia non produktif yang jumlahnya lebih banyak. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil pula beban dalam menopang kehidupan penduduk usia nonproduktif (Triyanto, 1990).



Gambar 5.2: Komposisi Umur Penduduk 1971 - 2020 (BPS, 2020)

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak 1971. Pada 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 53,39 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,72 persen di 2020. Perbedaan antara persentase penduduk usia produktif dan nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Persentase penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada era bonus demografi (BPS, 2020).

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP 2020 mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Proporsi Generasi Z sebanyak 27,94 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 25,87 persen dari total populasi Indonesia. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar tujuh tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia (BPS, 2020).



Gambar 5.3: Struktur Penduduk Berdasarkan Generasi (BPS, 2020)

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

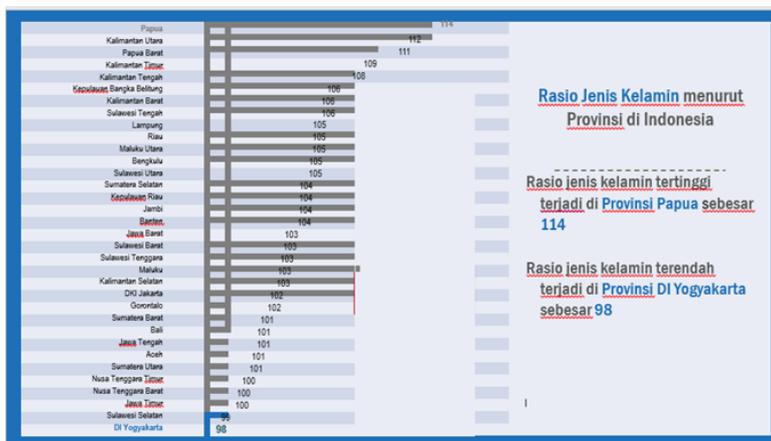
Mulyadi (2014), menyatakan bahwa komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah tertentu. Adanya ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (rasio jenis kelamin) dapat mengakibatkan rendahnya fertilitas dan rendahnya angka pertumbuhan penduduk.

Besar kecilnya rasio jenis kelamin di suatu daerah dipengaruhi oleh:

1. sex ratio at birth atau rasio jenis kelamin pada waktu kelahiran. Di beberapa negara umumnya berkisar antara 103-105 bayi laki-laki per 100 bayi perempuan;

2. pola mortalitas (kematian) antara laki-laki dan perempuan, jika kematian laki-laki lebih besar daripada angka kematian perempuan, maka rasio jenis kelamin akan makin kecil;
3. pola migrasi antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, jika suatu daerah banyak penduduk perempuan yang bermigrasi keluar daerah, maka rasio jenis kelaminnya akan besar, demikian sebaliknya jika banyak penduduk laki-laki yang bermigrasi keluar, maka rasio jenis kelamin juga akan rendah.

Di Indonesia jumlah penduduk laki-laki sebanyak 136,66 juta orang, atau 50,58 persen dari penduduk Indonesia. Sementara, jumlah perempuan sebanyak 133,54 juta orang, atau 49,42 persen dari penduduk Indonesia. Dari informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Indonesia sebesar 102, yang berarti terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Indonesia pada tahun 2020.



Gambar 5.4: Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia (BPS, 2020)

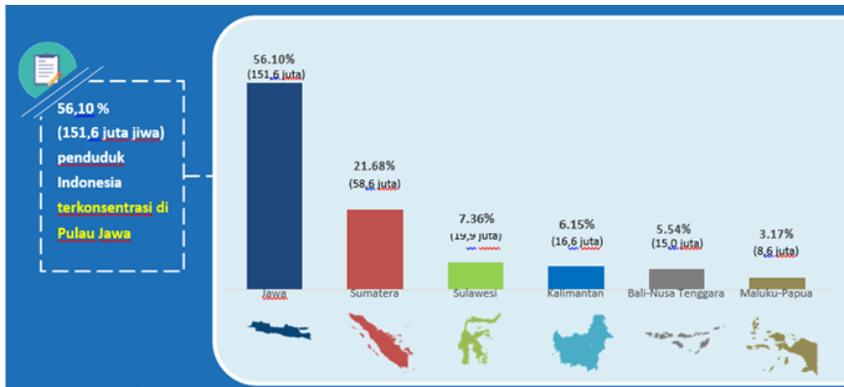
Dari gambar 5.4, didapatkan bahwa jumlah penduduk provinsi berdasarkan rasio jenis kelamin menurut provinsi, bahwa Provinsi Papua memiliki rasio jenis kelamin tertinggi sebesar 114, dan Provinsi Yogyakarta yang terendah dengan rasio 98.

Untuk komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan didasarkan pada kegiatan ekonomi atau jenis usaha yang digeluti masyarakat. Persentase penduduk di

negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia yang bekerja di bidang pertanian lebih besar dibandingkan yang bekerja di bidang-bidang lain. Hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi di negara-negara maju, di mana penduduknya sebagian besar bekerja di bidang industri dan jasa (BPS, 2020).

5.2.2 Komposisi berdasarkan geografis

Komposisi penduduk berdasarkan geografis adalah pengelompokan penduduk berdasarkan letak wilayah tempat tinggalnya, dalam hal ini kriteria yang ditetapkan oleh BPS adalah daerah perkotaan dan perdesaan. Dari hasil pengelompokan penduduk menurut kriteria geografis tersebut dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi kemudian dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk tetap melaksanakan kebijakan yang telah dilaksanakan atau memperbaiki kebijakan tersebut (BPS, 2020).



Gambar 5.5: Penduduk Indonesia Berdasarkan Pulau (BPS, 2020).

Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,92 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari tahun 2010 yang mencatat kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 124 jiwa per kilometer persegi dan tahun 2000 yang mencapai 107 jiwa per kilometer persegi. Sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Meskipun luas geografisnya hanya sekitar tujuh persen dari seluruh wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau 56,10 persen penduduk Indonesia.

Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebanyak 58,56 juta orang, yaitu sebesar 21,68 persen. Sementara Pulau Sulawesi mempunyai sebaran sebesar 7,36 persen dan Pulau Kalimantan mempunyai sebaran sebesar 6,15 persen, sedangkan wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Maluku-Papua masing-masing sebesar 5,54 dan 3,17 persen.

Jumlah penduduk tahun 2020 mencatat sebesar 91,32 persen atau sekitar 246,74 juta penduduk berdomisili sesuai Kartu Keluarga (KK). Sementara sebesar 8,68 persen atau sekitar 23,47 juta penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK. Jumlah ini mengindikasikan banyaknya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK).

Jumlah penduduk tahun 2020 secara geografis di tingkat provinsi menunjukkan jumlah penduduk tertinggi berdasarkan provinsi adalah Provinsi Jawa Barat dengan 48,27 juta orang. Jumlah penduduk terkecil berada di Kalimantan Utara dengan 0,70 juta orang.

5.3 Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah grafik balok yang dibuat secara horizontal untuk membandingkan penduduk laki-laki dan perempuan. Piramida penduduk pada dasarnya memiliki definisi yang sama dengan komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin (Said, 1983; Bagoes, 2003).

Struktur penduduk dibuat dalam grafik secara horizontal yang berbentuk piramida. Dengan adanya piramida penduduk dapat mengetahui perbandingan golongan produktif dan tidak produktif, serta perbandingan jumlah penduduk untuk prediksi di masa depan.

Adapun cara dalam membuat piramida penduduk adalah sebagai berikut:

1. penduduk dibagi jenis kelamin di mana untuk laki-laki berada di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan; dan
2. baik golongan laki-laki ataupun perempuan dibagi lagi menurut kelompok umurnya yang biasanya menggunakan interval 5 tahun, misalnya 0-4, 5-9, 10 -14, dan seterusnya.

Berdasarkan komposisi penduduk umur dan jenis kelamin maka karakteristik penduduk dari suatu negara khususnya Indonesia dapat dibedakan atas tiga ciri yang akan diuraikan sebagai berikut (Demografi, 1981; Mulyadi, 2014; Suasti, 2015).

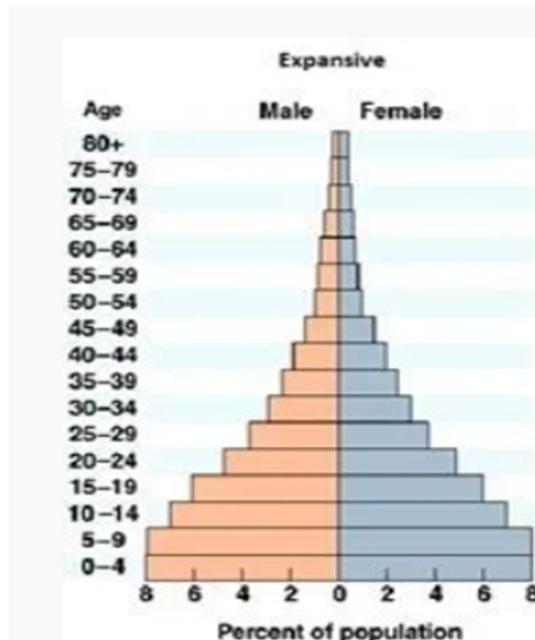
5.3.1 Piramida penduduk muda (expansive)

Bentuk piramida penduduk muda bagian alasnya besar, makin ke puncak semakin sempit, sehingga berbentuk limas. Hal itu menggambarkan bahwa penduduk dalam keadaan tumbuh, jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Piramida ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Jumlah angka kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian.

Ciri-ciri piramida penduduk muda ditandai dengan:

1. Angka kelahiran tinggi sedangkan angka kematian rendah maka pertumbuhan penduduk yang cepat.
2. Menjelaskan populasi yang masih muda dan berkembang.
3. Biasanya merepresentasikan negara berkembang di mana laju kelahiran masih tinggi dan tingkat harapan hidup yang relatif rendah.
4. Semakin ke puncak maka semakin sempit maka kohor usia di atasnya pasti lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan kohor usia di bawahnya.
5. Menunjukkan sebagian besar penduduknya berada di kelompok usia di bawah 15 tahun (penduduk tidak produktif).

Bentuk ini umumnya kita lihat pada negara-negara yang sedang berkembang seperti India, Brazil dan Indonesia. Berikut akan ditampilkan ilustrasi piramida penduduk muda.



Gambar 5.6: Piramida Penduduk Muda (Expansive)(Suasti, 2015).

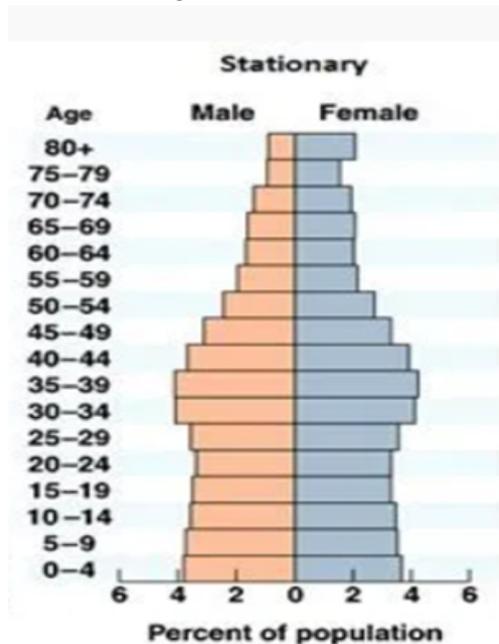
5.3.2 Piramida penduduk tetap (stasioner)

Bentuk piramida ini di bagian atas dan bawahnya hampir sama, sehingga berbentuk seperti granat. Hal itu menggambarkan bahwa angka kelahiran seimbang dengan angka kematian. Jumlah penduduk usia muda hampir sama dengan usia dewasa. Piramida ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) sebab tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran tidak begitu tinggi.

Beberapa ciri dari piramida ini antara lain:

1. Angka kelahiran tinggi dan angka kematian relatif seimbang
2. Menjelaskan populasi yang sudah tidak berkembang
3. Biasanya merepresentasikan negara maju di mana angka kelahiran rendah dan tingkat harapan hidup tinggi

4. Piramida penduduk yang berbentuk sistem ini terdapat pada negara-negara yang maju seperti Swedia, Belanda dan Skandinavia. Ilustrasi piramida digambarkan sebagai berikut:



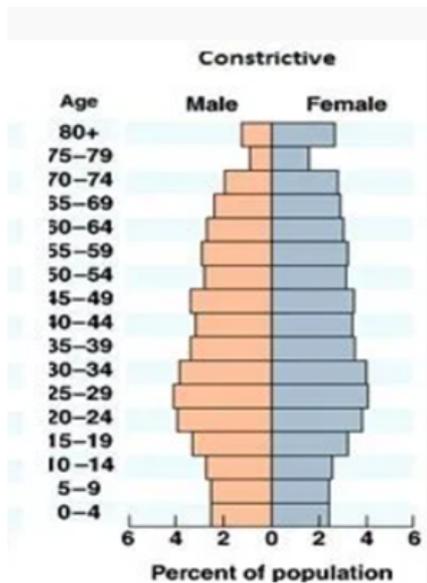
Gambar 5.7: Piramida Penduduk Tetap (Stationer)(Suasti, 2015).

5.3.3 Piramida penduduk tua (constrictive)

Bentuk piramida ini di bagian bawah kecil dan di bagian atas besar, sehingga berbentuk seperti batu nisan. Hal itu menggambarkan penurunan angka kelahiran lebih pesat dari angka kematian, sehingga jumlah penduduk usia muda lebih sedikit dibandingkan dengan usia dewasa. Jumlah penduduk mengalami penurunan. Piramida penduduk ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang kecil sekali. Apabila angka kelahiran jenis kelamin pria besar, maka suatu negara bias kekurangan penduduk.

Ciri-ciri piramida ini antara lain:

1. Angka kelahiran dan angka kematian yang rendah maka angka kelahiran menurun dengan cepat.
2. Menjelaskan populasi yang tidak berkembang, namun apabila terus terjadi dapat menyebabkan kekurangan jumlah penduduk.
3. Biasanya merepresentasikan negara dengan perkembangan tingkat sosial dan ekonomi yang tinggi (negara maju).
4. Menunjukkan penduduk kelompok usia muda lebih sedikit dibanding yang kelompok usia tua.
5. Negara yang bentuk piramida penduduknya seperti di antaranya Jerman, Inggris, Belgia dan Perancis. Berikut ilustrasi piramida penduduk tua.



Gambar 5.8: Piramida Penduduk Tua (Constrictive) (Suasti, 2015).

Bab 6

Angkatan Kerja

6.1 Pendahuluan

Jumlah atau besarnya penduduk umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita suatu negara, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Beberapa pendapat mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar adalah sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi. Tetapi ada pula yang berpendapat lain yaitu bahwa justru penduduk yang jumlahnya sedikit yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Selain itu, Ada pendapat yang menyatakan bahwa jumlah penduduk suatu negara harus seimbang dengan jumlah sumber-sumber ekonominya, agar dapat diperoleh kenaikan pendapatan nasionalnya (Subri, 2018).

Di masyarakat, banyak topik yang bersifat ekonomi ketenagakerjaan dianggap hanya "kepunyaan" ekonom. Meskipun demikian, dalam kenyataannya analisis topik tersebut memerlukan data yang berasal dari disiplin ilmu demografi, seperti Sensus dan Supas, atau ilmu sosial lainnya seperti Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Perhatian para ahli kependudukan dan ekonomi kepada kelompok penduduk yang berada dalam usia produktif-ekonomis merupakan salah satu penyebab berkembangnya studi ekonomi kependudukan Hal yang dibahas dalam bab ini adalah pengenalan dasar

konsep ketenagakerjaan, khususnya angkatan kerja beserta sedikit ilustrasi data empiris yang didapat dari kaca mata disiplin ekonomi demografi.

6.2 Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan

6.2.1 Konsep ketenagakerjaan

Konsep tenaga kerja berdasarkan UU No.13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Muta'ali, 2015).

Menurut (Adioetomo dan Samosir, 2010), ada beberapa konsep-konsep yang dipakai dalam memahami ketenagakerjaan, yaitu:

1. Konsep Tenaga Kerja (Manpower), dalam studi kependudukan sering disebut "tenaga kerja" yang diterjemahkan dari istilah *manpower*, yakni seluruh penduduk yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif. Dulu Indonesia sering kali menyebutkan tenaga kerja sebagai seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (lihat hasil SP 1971, 1980, dan 1990). Setelah itu dipakai ukuran 15 tahun ke atas yang disesuaikan dengan ketentuan internasional.
2. Konsep Gainful Worker, konsep ini menunjukkan aktivitas ekonomi apakah seseorang pernah bekerja atau yang biasanya dilakukan seseorang (usual activity), mungkin saat sensus atau survei masih bekerja atau sudah tidak bekerja lagi. Dalam konsep *gainful worker* ini tidak ditentukan referensi/batasan waktu tertentu, artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan atau pernah dilakukan selama hidup seseorang pada saat pencacahan. Jumlah pengangguran yang tercatat memakai konsep ini akan sedikit sekali. Konsep ini sudah jarang dipakai dalam analisis.
3. Konsep Angkatan Kerja (Labor Force Concept), dalam SP 1940, United States Bureau of Census telah memelopori penggunaan

konsep baru yang disebut *labor force concept*, atau konsep Angkatan Kerja. Dua perbaikan diusulkan dalam konsep ini, yaitu:

- a. Activity Concept, bahwa yang termasuk dalam angkatan kerja (labor force) haruslah orang yang secara aktif bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan.
- b. Aktivitas tersebut dilakukan dalam suatu batasan waktu tertentu sebelum wawancara. Dengan kata lain, konsep angkatan kerja umumnya disertai dengan referensi waktu.

Berdasarkan konsep tersebut, angkatan kerja (labor force) dibagi menjadi dua, yaitu:

- Bekerja
- Mencari pekerjaan (menganggur), yang dapat dibedakan mencari pekerjaan, tetapi sudah pernah bekerja sebelumnya dan mencari pekerjaan untuk pertama kalinya (belum pernah bekerja sebelumnya).

4. Konsep Pemanfaatan Tenaga Kerja (Labor Utilization Approach)

Berbeda dengan konsep *labor force*, pendekatan *labor utilization* ini dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan konsep angkatan kerja, terutama supaya lebih sesuai dengan keadaan negara berkembang. Pendekatan dalam konsep ini lebih ditujukan untuk melihat potensi tenaga kerja, apakah telah dimanfaatkan secara penuh. Dengan konsep ini, angkatan kerja dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan cukup (fully utilized)
- b. Pemanfaatan kurang (under utilized), karena jumlah jam kerja yang rendah, pendapatan/upah atau gaji yang rendah dan tidak sesuai dengan kemampuan atau keahliannya.
- c. Pengangguran terbuka (open unemployment)

5. Konsep Pengangguran

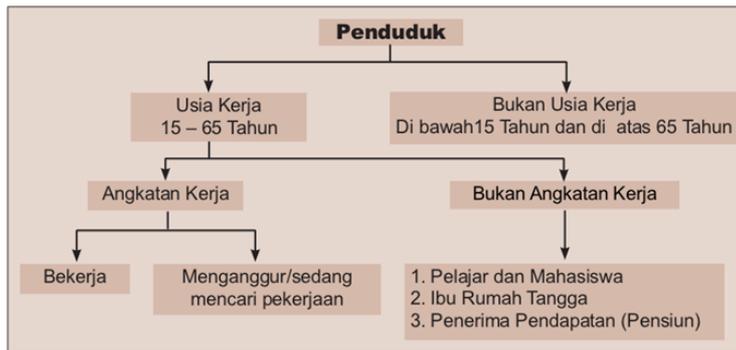
Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang pada saat pencacahan sedang aktif mencari pekerjaan. Dalam konsep ini ada beberapa bentuk pengangguran, yaitu:

- a. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) yang terdiri dari:
 - Mereka mencari pekerjaan

- Mereka mempersiapkan usaha
 - Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (discouraged workers).
 - Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
- b. Setengah Menganggur (Under employed), adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) yang terdiri dari:
- Setengah pengangguran terpaksa, yakni mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
 - Setengah menganggur sukarela, yakni mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain.
- c. Pengangguran Tidak Kentara (Disguised Unemployment)
Pengangguran tidak kentara dimasukkan dalam kegiatan bekerja, karena memenuhi persyaratan dari definisi "bekerja". Tetapi jika dilihat dari segi produktivitas dalam pekerjaan, maka adalah penganggur. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena dalam pasar kerja terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja dan sempitnya lapangan kerja.
- d. Pengangguran Friksional
Pengangguran friksional adalah pengangguran karena tenggang waktu sebelum mendapatkan pekerjaan. Dalam analisis ketenagakerjaan, tenggang waktu itu sering disebut "waiting time".
6. Konsep Bukan Angkatan Kerja (Not in the Labor Force)
Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja (manpower) yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Jadi, mereka adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dalam sensus-sensus penduduk di Indonesia, dikemukakan bahwa penduduk yang berumur 10 tahun ke atas (atau 15 tahun ke atas setelah SP 1990)

yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang selama seminggu yang lalu mempunyai kegiatan hanya:

- a. Bersekolah
- b. Mengurus rumah tangga
- c. Pensiunan, dan/atau mendapat penghasilan bukan dari bekerja (misalnya warisan, deposito, dan lain-lain).
- d. Berada di rumah sakit dalam waktu lama, di lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya



Gambar 6.1: Klasifikasi Penduduk dan Angkatan Kerja

Istilah Tenaga Kerja tidaklah identik dengan Angkatan Kerja. Yang dimaksud dengan Tenaga Kerja (Manpower) adalah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi (Tan Tiang, 1965).

Pada awalnya banyak indikator yang digunakan untuk mengukur keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, utamanya ekonomi upah. Artinya kegiatan tersebut harus menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna bagi masyarakat. Perdebatan muncul karena definisi upah sebab di negara sedang berkembang persentase pekerja yang tidak dibayar masih cukup tinggi. Oleh ILO akhirnya diputuskan bahwa seseorang dapat maupun belum dapat dilibatkan dalam kegiatan ekonomi didasarkan pada umur. Dan batasan umur ini diserahkan kepada setiap negara dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi.

Di beberapa negara, misalnya: Amerika Serikat, Jerman Barat, dan negara-negara Eropa lainnya, bagian penduduk yang termasuk usia kerja adalah kelompok umur 15 – 64 tahun. Di Indonesia, BPS mengambil penduduk umur 10 tahun ke atas sebagai kelompok penduduk usia kerja. Akan tetapi sejak

1998 mulai menggunakan usia 15 tahun ke atas, atau lebih tua batas usia kerja pada periode sebelumnya. Biasanya batasan umur yang digunakan berbeda-beda untuk tiap negara, tetapi yang sering dijadikan pertimbangan adalah tingkat perekonomian dan situasi tenaga kerja. Semakin maju perekonomian di suatu daerah atau negara batas umur yang ditentukan untuk usia kerja minimum semakin tinggi (Adioetomo dan Samosir, 2010).

6.2.2 Definisi ketenagakerjaan

Dalam UU No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di Indonesia yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomis (BPS, 1983).

Angkatan Kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu “penduduk yang berada dalam usia kerja, baik mereka yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan”. Dari definisi tersebut menyatakan bahwa definisi Angkatan Kerja berdasarkan usia kerja dan kegiatan ekonomi dari penduduk. Angkatan Kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja, dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Mereka yang berumur 15 tahun atau tidak bekerja atau tidak mencari pekerjaan karena sekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau secara fisik dan mental tidak memungkinkan untuk bekerja tidak dimasukkan dalam angkatan kerja (Mantra, 2010).

6.3 Ukuran-Ukuran Dasar Angkatan Kerja

Dalam studi ketenagakerjaan, dipakai beberapa ukuran yang menggambarkan situasi ketenagakerjaan suatu negara atau sekelompok masyarakat. Umumnya, indikator ketenagakerjaan memakai angka (rate).

Berikut ini ukuran-ukuran spesifik yang sering dipakai dalam studi ketenagakerjaan, yaitu:

1. Angka Aktivitas Kasar (Crude Activity Rate)

Angka aktivitas kasar adalah jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah seluruh penduduk 15 tahun ke atas dan dinyatakan dalam persentase. Angka ini dikatakan kasar karena belum mencerminkan faktor-faktor yang memengaruhi jumlah angkatan kerja, antara lain komposisi umur penduduk dan jenis kelamin. Akan tetapi, angka ini dapat digunakan untuk melakukan perbandingan, di mana peneliti ingin menunjukkan jumlah relatif dalam angkatan kerja tanpa memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhinya.

$$\text{Rumus: CA} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja(15+)}} \times 100\%$$

2. Angka Aktivitas Menurut Umur dan Jenis Kelamin (Age-Sex-specific Activity Rate)

Angka ini merupakan angka dasar (basic rates) yang dipelajari dan menjadi dasar untuk membuat proyeksi angkatan kerja.

Rumus:

$$\text{APAK umur tertentu} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja umur tertentu}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja(15+)}} \times 100\%$$

APAK selanjutnya dapat dipecah menurut tingkat pendidikan, status perkawinan, tempat tinggal apakah di perkotaan atau pedesaan, dan lain-lain.

3. Angka Aktivitas Menurut Jenis Kelamin (Sex-specific Activity Rate)

Angka aktivitas menurut jenis kelamin adalah jika angka aktivitas (atau angka partisipasi) disajikan terpisah untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dilihat dari perbedaan, biasanya angka aktivitas untuk laki-laki lebih tinggi daripada angka aktivitas untuk perempuan.

Rumus:

$$\text{APAK Laki - laki} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Laki - laki}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja(15 + Laki - laki)}} \times 100\%$$

4. Angka Penyerapan Angkatan Kerja (Employment Rate)

Angka penyerapan angkatan kerja adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang menyatakan sedang bekerja pada saat pencacahan. Untuk definisi bekerja, lihat pada bagian sumber data dari Sensus, Supas, dan Sakernas,

Rumus:

$$\text{Angka Employment} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja yang bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Total}} \times 100\%$$

5. Angka Pengangguran (Unemployment Rate – UER)

Angka pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur di sini adalah penduduk yang aktif mencari pekerjaan.

Rumus:

$$\text{UER} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja yang mencari pekerjaan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

6.4 Kesempatan Kerja

Jumlah angkatan kerja yang bekerja biasanya dipandang sebagai jumlah kesempatan kerja yang tersedia di suatu wilayah. Dalam pengertian kesempatan kerja tidaklah sama dengan lapangan kerja yang masih terbuka. Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya, yang dimaksud dengan "bekerja" dalam Sensus Penduduk 1980 ialah selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam dalam sehari.

Pada Sensus Penduduk 1971 definisi bekerja tidak sama dengan yang digunakan dalam Sensus Penduduk 1980, hanya batas waktu bekerja yang digunakan minimal dua hari dalam seminggu dengan bekerja paling sedikit satu jam dalam sehari. Batasan ini digunakan secara konsisten sejak Sakernas 1976 maupun Susenas 1977 serta Supas 1985.

Menurut Mantra (2010), pengelompokan kesempatan kerja dapat dikelompokkan berdasarkan, yaitu:

Menurut Sektor/Lapangan Usaha

Dalam pembagian ini, dengan membedakan menjadi tiga sektor, yaitu:

1. Sektor A (pertanian, perburuhan, kehutanan, dan perikanan)

2. Sektor M (termasuk pertambangan, manufaktur, pembangunan listrik dan air, pengangkutan, perhubungan, dan gas).
3. Sektor S (perdagangan, rumah makan, hotel, keuangan, asuransi, jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan pribadi).

Bidang pekerjaan ini sejak tahun 2000 mengalami perubahan. Bidang pekerjaan/lapangan usaha sejak SP 2000 maupun Sakernas 2000 mengalami perubahan yang cukup mendasar, yaitu digolongkan ke dalam 5 sub sektor pertanian dan 5 sektor lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub sektor pertanian tanaman pangan
2. Sub sektor perkebunan
3. Sub sektor perikanan
4. Sub sektor peternakan
5. Sub sektor pertanian lainnya
6. Sektor industri pengolahan
7. Sektor perdagangan
8. Sektor jasa kemasyarakatan
9. Sektor angkutan
10. Sektor lainnya (bangunan, keuangan, listrik, gas, dan air).

Pendekatan lain yang banyak digunakan adalah model Sakernas 2000 dengan menggunakan 8 sektor, sektor pertanian tidak dirinci ke dalam sub sektor dan tetap menjadi satu sektor, sektor pertambangan, listrik, gas, dan air dimasukkan ke sektor ke 8 yakni sektor lain-lain. Dengan demikian, pendekatan SP 2000 maupun Sakernas 2000 dan tahun-tahun mendatang analisis A (Pertanian), M (Manufaktur), dan S (Jasa) semakin ditinggalkan setelah adanya revisi Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) dan Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI) yang dari waktu ke waktu mengalami pembaharuan. Pembaharuan dan pengelompokan lapangan pekerjaan dan jenis pekerjaan dapat diikuti dari buku KLUI dan KJI, publikasi dari Badan Pusat Statistik.

Menurut Jenis / Jabatan Pekerjaan

Jenis/jabatan pekerjaan dikelompokkan berdasarkan atas macam pekerjaan yang sedang atau pernah dilakukan termasuk golongan bekerja atau orang-orang yang sedang mencari pekerjaan dan pernah bekerja. Jabatan dibedakan:

1. Pemimpin dan Manajer Senior
2. Tenaga Ahli
3. Teknisi dan sejenisnya
4. Tenaga produksi dan tenaga terkait
5. Tata usaha dan usaha jasa tingkat lanjutan
6. Tata usaha dan usaha jasa tingkat menengah
7. Pekerja produksi dan angkutan tingkat menengah
8. Tata usaha, penjualan dan jasa tingkat rendah
9. Pekerja kasar dan pekerja terkait.

Penggolongan jenis/jabatan dapat dilihat secara rinci ke dalam satu digit, dua digit, tiga digit, dan empat digit seperti disajikan oleh BPS (2000) dalam buku Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI) dari tahun ke tahun terus disempurnakan. Penggolongan jenis pekerjaan ke dalam 9 kelompok ini merupakan yang paling baru dan lebih rinci dibandingkan penggolongan sebelumnya. Urutan jenis pekerjaan (dari nomor 1 sampai 9) merujuk pada urutan produktivitas kerja, mulai dari yang produktif sampai tidak produktif atau mulai dari produktivitas paling tinggi ke yang paling rendah.

Menurut Status Pekerjaan

Status pekerjaan dikelompokkan berdasarkan atas cara melakukan usaha yang sedang dikerjakan. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Status pekerjaan dibedakan sebagai berikut:

1. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain termasuk kelompok ini
 - a. Tukang becak yang membawa becak atas risiko sendiri
 - b. Sopir taksi yang membawa mobil atas risiko sendiri
 - c. Kuli-kuli di pasar, stasiun yang tidak mempunyai majikan
2. Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga, buruh tidak tetap termasuk kelompok ini:
 - a. Pengusaha warung yang dibantu keluarga atau dibantu buruh tidak tetap dan tidak dibayar
 - b. Penjaja keliling dengan dibantu keluarga atau dibantu buruh tidak tetap

- c. Petani yang mengusahakan tanah sendiri dengan dibantu anggota keluarga atau sewaktu-waktu menggunakan buruh tidak tetap.

6.5 Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika di tahun 2019 - 2020 dapat kita perhatikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.1: Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2019 – 2020, (BPS, 2020)

Jenis Kegiatan	2019	2020
	Agustus	Agustus
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas	201 185 014,00	203 972 460,00
Angkatan Kerja	135 859 695,00	138 221 938,00
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,53	67,77
b. Bekerja	128 755 271,00	128 454 184,00
c. Pengangguran Terbuka *)	7 104 424,00	9 767 754,00
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,23	7,07
Bukan Angkatan Kerja	65 325 319,00	65 750 522,00
a. Sekolah	15 943 345,00	15 352 639,00
b. Mengurus Rumah Tangga	40 949 704,00	40 960 652,00
c. Lainnya	8 432 270,00	9 437 231,00
Tingkat Kesempatan Kerja	94,77	92,93

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2020 mengalami peningkatan, awalnya di Agustus 2019 sebesar 201.185.014 jiwa kemudian di Agustus 2020 mengalami peningkatan menjadi 203.972.460 jiwa. Di mana juga pada tahun 2020, perbandingan Angkatan Kerja sebesar 138.221.938 jiwa dan bukan Angkatan Kerja sebesar 65.750.522.

6.5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan. Bila angka TPAK kecil maka dapat diduga bahwa penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya. Dengan demikian angka TPAK dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang masih bersekolah dan penduduk yang mengurus rumah tangga (Mantra, 2000).

Pada tahun 2020, angka TPAK di Indonesia sebesar 67,77 % ini artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 68 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu. Angka TPAK sebesar 67,77% menandakan juga Indonesia tergolong sedang dikarenakan sesuai dengan ketentuan yaitu TPAK tinggi > 70%, TPAK sedang: 51-69 %, dan TPAK rendah < 50 %.

6.5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Konsep dan definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 konsep dan definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan, yaitu pengangguran adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (jobless). Pengangguran dengan batasan tersebut biasa disebut sebagai pengangguran terbuka (open unemployment).

Manfaat dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen adalah sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Sebagai contoh, pada tahun 2020 Indonesia angka TPT nya sebesar 7.07 atau dalam nominalnya sebesar 9.767.754 jiwa artinya angka pengangguran di Indonesia tergolong rendah berdasarkan ketentuannya yaitu: TPT tinggi: > 70, TPT sedang: 51 – 69, TPT rendah: < 50. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah sering kali menjadikan indikator ini sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Bab 7

Fertilitas

7.1 Pendahuluan

Ragam masalah sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia, satu di antaranya hal yang paling menjadi perhatian adalah masalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di dunia dipengaruhi oleh indeks fertilitas yang terjadi. Fertilitas sendiri memiliki dua makna yang berbeda. Fertilitas dalam dunia kedokteran identik dengan tingkat kesuburan bagi pria maupun wanita (Wikipedia, 2016). Sedangkan dalam istilah demografi fertilitas sering disama artikan dengan banyaknya jumlah bayi lahir yang hidup yang mana seiras dengan pernyataan (Shyrok dan Siegel, 1971) bahwa fertilitas lazim diartikan sebagai kejadian bayi lahir hidup (live birth).

Fertilitas (kelahiran) menjadi tantangan bagi pemerintah maupun pemimpin dunia, apabila jumlah dan mutu dari penduduknya tidak dapat dikendalikan untuk memakmurkan negara tersebut. Berbagai dampak yang ditimbulkan dari hal ini di antaranya adalah meningkatnya kebutuhan pangan, sandang, papan yang akan meningkatkan tingkat kesusahan, kemiskinan, dan kekacauan pada negara itu sendiri. Akan tetapi, jika jumlah penduduk yang ada pada suatu negeri itu terlampau sedikit maka akan mempersulit negara tersebut untuk menunjukkan kekuatan di kancah Internasional sehingga akan disepelekan oleh negara lain.

Sebaliknya, angka fertilitas yang tinggi mampu meningkatkan berbagai aspek kehidupan apabila mampu dipertahankan kualitasnya. Ada dua cara yang dapat menekan angka dari laju pertumbuhan penduduk. Pertama meningkatkan angka kematian dan yang kedua dengan menekan angka kelahiran. Cara pertama tidak dianjurkan untuk ditempuh apabila kita kaji dari keyakinan mana pun. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh jika hendak menekan laju pertumbuhan penduduk selain dengan menekan angka kelahiran. Penekanan angka kelahiran dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan peraturan, misal KB (Keluarga Berencana) yang menyuarakan bahwa dua anak sudah cukup.

Sulistiyawati (2013) mengemukakan bahwa KB adalah suatu usaha untuk mengatur jarak kelahiran tiap anak dan jumlah anak yang diinginkan. Melalui hal ini, pemerintah mencanangkan program pencegahan/penundaan kehamilan yang mampu menekan peningkatan angka fertilitas/kelahiran guna mencapai masyarakat sejahtera. Meskipun pemilihan cara kedua dalam menekan laju pertumbuhan yang dianggap sangat manusiawi, namun jika ditinjau ulang terhadap kebebasan setiap individu (diatur dalam HAM) maka pemerintah hanya bisa menyuarakan, namun tidak untuk mendiktatori bahwa aturan tersebut mutlak harus dijalankan oleh tiap Individu.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia bertambah pesat yang ditandai dengan angka bayi lahir yang tinggi. Pada tahun 2020 persentase perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) bertambah, dari yang semula 91,07 – 91,8%. IPG terbesar terdapat pada kabupaten/kota Ogan Ilir sebesar 99,13% dari sebelumnya 98,95% dan yang terendah terdapat pada kabupaten/kota Asmat sebesar 53,95% dari sebelumnya 93,71% (Statistik, 2016). Hal ini menggambarkan bahwa laju pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh indeks pembangunan gender atau sama arti dengan fertilitas.

Fertilitas dalam konteks demografi yakni konteks hasil reproduksi yang nyata dari masyarakat atau jumlah bayi hidup yang lahir dari rahim seorang atau beberapa orang wanita. Makna dari bayi hidup ini adalah bayi yang berhasil dilahirkan oleh wanita dan memiliki tanda-tanda kehidupan tanpa meninjau lama atau singkatnya waktu hidup dari bayi tersebut. Menurut Rusli (2012) bahwa ada satu istilah yang mirip dengan fertilitas hanya dibedakan oleh ruang lingkungannya, yakni natalitas. Jika fertilitas meliputi peranan kelahiran terhadap perubahan penduduk, natalitas meliputi peranan kelahiran terhadap perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

7.2 Kajian Fertilitas

Kajian fertilitas secara hakiki berasal dari disiplin sosiologi. Jauh sebelum disiplin ilmu lainnya membahas tentang fertilitas, kajian sosiologis tentang fertilitas sudah lebih dahulu dilaksanakan. Kajian kependudukan menjadi salah satu sub-bidang sosiologi dan sebagian besar analisis kependudukan (di luar demografi formal) adalah analisis sosiologis. Hawthorn (1970), Freedman (1962), dan Davis dan Blake (1956) telah mengembangkan sejumlah teori fertilitas yang pada dasarnya bersifat sosiologis.

Davis dan Blake (1956) dalam karyanya yang berjudul “The Social structure and fertility: an analytic framework” melaksanakan analisis sosiologis tentang fertilitas, di mana beberapa faktor yang memengaruhi fertilitas melalui apa yang disebut dengan “intermediate variables” (variabel antara). Adapun berbagai variabel antara yang dimaksud oleh Davis dan Blake meliputi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Dari 11 variabel antara yang memengaruhi fertilitas, masing-masing dikelompokkan dalam tiga tahap reproduksi, mulai dari:

1. faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya hubungan kelamin;
2. faktor-faktor penyebab terjadinya konsepsi; dan
3. faktor-faktor yang memengaruhi kehamilan dan kelahiran.

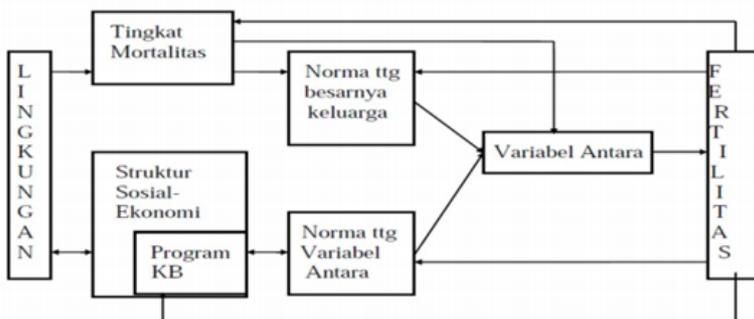
Adapun 11 variabel antara yang dimaksud di atas, secara ringkas Kartika dan Sari (2020) merangkum sebagai berikut:

1. Umur memulai hubungan seksual,
2. Jumlah wanita yang belum pernah berhubungan seksual (selibat permanen),
3. Rentang waktu (masa) reproduksi (setelah atau di antara waktu berhubungan seksual), yang dibagi menjadi jika kehidupan suami – istri bercerai/pisah dan jika kehidupan suami – istri berakhir karena suami meninggal dunia,
4. Berhenti berhubungan seksual (abstinensi) tanpa paksaan,
5. Abstinensi terpaksa akibat dari sakit, pisah sementara, atau impotensi,
6. Frekuensi berhubungan seksual,

7. Tidak atau menggunakan kondom (alat kontrasepsi), menggunakan metode-metode kimiawi dan mekanik atau dengan metode lainnya,
8. Kesuburan/kemandulan akibat dari faktor-faktor penghambat yang disengaja (sub nisis, sterilisasi, pemakaian obat-obat kimia pencegah kehamilan, dan sebagainya)
9. Kesuburan/kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tidak sengaja,
10. Mortalitas janin yang disebabkan faktor tidak sengaja, dan
11. Mortalitas janin akibat faktor sengaja (misal aborsi).

Seterusnya, Davis dan Blake (1956) memaparkan bahwa berbagai variabel yang disebutkan di atas terdapat pada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dinilai karena setiap variabel memiliki nilai atau pengaruh yang positif maupun negatif terhadap fertilitas. Apabila ditemukan ketiadaan variabel di atas juga akan berpengaruh pada fertilitas (pengaruh bersifat positif). Akibat daripada suatu masyarakat yang membawa variabel nilai negatif atau positif, maka angka kelahiran sesungguhnya tergantung pada neraca netto dari seluruh variabel.

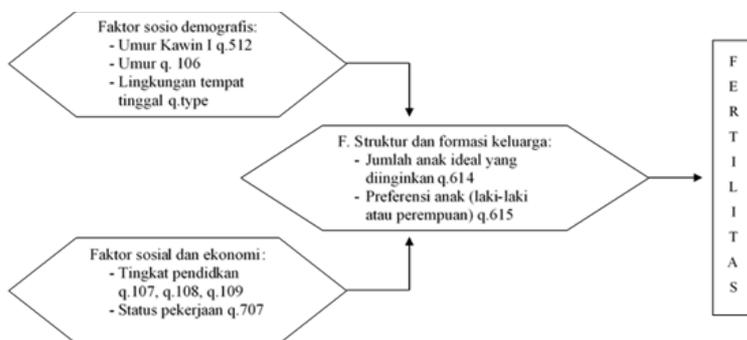
Lebih dalam Davis dan Blake menguraikan berbagai pengaruh model-model institusional melalui sebelas variabel antara. Melalui teori Davis dan Blake (1956), selanjutnya Freedman (1979) mengembangkan suatu model secara sosiologi yang lebih luas terhadap fertilitas (Gambar 7.1).



Gambar 7.1: Kerangka Dasar Sederhana untuk Analisis Fertilitas

Gambar 7.1 menunjukkan bahwa ada korelasi antara lingkungan dan struktur sosial ekonomi. Struktur sosial ekonomi saling memengaruhi terhadap norma

mengenai besarnya keluarga dan norma mengenai variabel antara yang seterusnya memengaruhi fertilitas melalui variabel antara. Selain itu, fertilitas dapat memengaruhi struktur sosial ekonomi melalui variabel-variabel tersebut. Melalui model ini, dapat dilihat bahwa fertilitas melalui variabel antara dipengaruhi oleh aturan-aturan sosial dan organisasi sosial bekerja. Beranjak dari model sederhana untuk analisis fertilitas Yusuf (2020) membuat suatu alur (kerangka) berpikir tentang faktor-faktor yang memengaruhi fertilitas di luar pemakaian alat kontrasepsi. Tiga di antaranya adalah faktor demografis, faktor sosio ekonomi, dan faktor struktur dan formasi keluarga. Di mana faktor demografis dan faktor sosio ekonomi tidak dapat memengaruhi fertilitas secara langsung, melainkan harus melalui variabel antara yang berhubungan dengan faktor struktur dan formasi keluarga (Gambar 7.2).



Gambar 7.2: Faktor-faktor yang Memengaruhi Fertilitas

7.3 Ukuran Dasar Fertilitas

Hakikat permasalahan yang ditimbulkan dari fertilitas adalah pertumbuhan penduduk. Menurut Pollard et al., (1982) fertilitas diartikan sebagai satu dari sekian banyak komponen siklus demografi di samping migrasi dan mortalitas. Permasalahan ini hampir dialami oleh seluruh negara di dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu isu yang akan hadir ke permukaan di pertengahan abad ke-20 ini adalah dunia akan dihadapkan pada istilah "bom bayi" yang dinilai sama bahayanya dengan teroris (Anonim, 2017).

Pertumbuhan penduduk berperan aktif terhadap berbagai permasalahan, di mana angka kelahiran lebih besar dibanding dengan angka kematian dan usia produktif akan lebih banyak dibanding usia nonproduktif. Menurut Anonim (2017) permasalahan pertumbuhan penduduk yang sedemikian ini apabila didiamkan secara terus menerus akan berdampak pada permasalahan sosial yang timbul di masyarakat itu sendiri. Di antara permasalahan yang mungkin terjadi adalah: degradasi lapangan pekerjaan, peningkatan angka pengangguran, meningkatnya taraf kemiskinan di masyarakat, lonjakan tingkat kejahatan dan kekerasan seksual, penurunan luasan areal pemukiman yang berdampak pada pola hidup sehat di masyarakat, dan lain sebagainya.

Apabila beberapa hal di atas terjadi akan berimbas kepada tidak terjalankannya makna/hakikat daripada sebagian isi UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Kesejahteraan sosial adalah hak segala bangsa." Maka dari itu pemerintah Indonesia menggalakkan program Keluarga Berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Yusuf (2020) mengemukakan bahwa melalui pemberdayaan ekonomi keluarga melalui wahana KB mampu meningkatkan pendapatan sekaligus sebagai kesempatan untuk mempersiapkan pembangunan SDM (sumber daya manusia) melalui elemen terkecil (keluarga) dan berkontribusi bagi peningkatan pendapatan yang langsung memberikan dampak bagi kesejahteraan keluarga di Indonesia.

7.4 Faktor Penentu Fertilitas

Berbagai faktor yang memengaruhi fertilitas telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Pada sub-bab ini akan dibahas berbagai faktor yang memengaruhi fertilitas, mulai dari jumlah anak dan preferensi anak, pekerjaan, lama pendidikan, hingga lokasi.

7.4.1 Pengaruh Jumlah Anak Ideal dan Preferensi Anak Terhadap Fertilitas

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2020) diperoleh nilai korelasi antara jumlah anak ideal dan preferensi anak terhadap fertilitas sangat kecil, yakni hanya sebesar 3,4%. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan pengaruh signifikan yang kecil, meskipun pada dua variabel (jumlah angka

ideal dan preferensi anak) berpengaruh secara signifikan. Hal ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Becker (1995) bahwa nilai koefisien regresi jumlah anak ideal sebesar 32,5%, yang artinya jumlah anak memiliki pengaruh positif terhadap fertilitas, meskipun hanya sedikit. Atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi jumlah anak yang diharapkan sesuai dengan jumlah anak yang direncanakan, maka akan semakin tinggi jumlah bayi lahir hidup.

Sebaliknya, preferensi tidak memiliki pengaruh terhadap fertilitas (bayi lahir hidup). Pasalnya, hal ini terjadi sekaligus menggambarkan bahwa ada kesadaran dalam membatasi kelahiran anak. Beban yang ditopang dalam kehidupan keluarga (keadaan ekonomi) boleh jadi sebagai sandaran untuk suatu keluarga membatasi jumlah anak, meskipun anak yang lahir tidak sesuai dengan preferensi.

7.4.2 Pengaruh Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Umur Menikah Pertama/Umur Wanita, dan Tempat Tinggal Terhadap Fertilitas

Yusuf (2020) mengemukakan bahwa faktor seperti pekerjaan, lama pendidikan, umur menikah pertama, umur, dan lokasi pekerjaan memberikan pengaruh sebesar 51,1% terhadap fertilitas, yang artinya sebesar 48,9% lagi dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dilakukan pada penelitian. Masing-masing variabel menunjukkan pengaruh negatif terhadap fertilitas, kecuali umur. Artinya, setiap terjadinya pengaruh negatif terhadap pekerjaan (mis. jenis pekerjaan atau kehilangan pekerjaan), lama pendidikan (mis. jenjang pendidikan terakhir), umur menikah pertama (mis. menikah di umur yang sudah terlalu tua), dan lokasi pekerjaan (misal dipindah-tugaskan ke daerah pedalaman) akan memberikan penurunan terhadap angka fertilitas, namun tidak demikian untuk faktor variabel umur.

Umur memiliki hasil yang berbeda secara nyata, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sibanda et al. (2003), di mana semakin tua umur perempuan (mendekati 49) semakin memiliki peluang yang besar terhadap fertilitas. Namun, hal ini akan berkebalikan jika ditinjau dari segi peluang banyaknya memperoleh keturunan apabila umur perempuan pertama melakukan pernikahan sekaligus hubungan seksual (oleh perempuan) yang dilakukan sedini mungkin (tetap mengacu pada aturan agama dan negara),

yang berpotensi positif dalam menghasilkan anak yang lebih banyak karena masa subur lebih panjang jika dibandingkan dengan usia yang lebih tua.

Umur berpengaruh positif pada jumlah anak lahir hidup, yang menggambarkan peningkatan jumlah umur maka akan meningkat pula jumlah anak lahir hidup. Sebagaimana penjelasan pada umur pertama melakukan hubungan seksual, mengindikasikan adanya pengetahuan tentang kesehatan dan reproduksi yang telah baik dan kemajuan di bidang kesehatan membuat segalanya mungkin dilaksanakan untuk menjaga fertilitas. Kesadaran kaum hawa akan kesehatan dijadikan sebagai salah satu penyebab tidak berpengaruhnya umur pertama melakukan hubungan seksual terhadap fertilitas (jumlah bayi lahir hidup).

Selain itu, Mantra (2000) mengemukakan bahwa umur sebagai ciri penduduk yang pokok disebabkan perilaku sosial ekonomi rumah tangga dan demografi dapat dipengaruhi oleh struktur umur. Adapun yang dimaksud dengan perilaku sosial-ekonomi rumah tangga yang dimaksud di antaranya adalah tingkat pendidikan, pembentukan dan perkembangan keluarga, serta angkatan kerja, sedangkan yang dimaksud dengan indikator perilaku demografi di antaranya adalah jumlah/pertambahan dan mobilitas penduduk (anggota rumah tangga). Usia muda secara signifikan berpengaruh nyata terhadap perilaku demografi (jumlah dan pertambahan penduduk) melalui fertilitas. Lain hal dengan penelitian yang dilakukan oleh Angeles et al. (2001) yang menyatakan bahwa semakin tua umur wanita maka tingkat produktivitas dan fertilitas individu akan semakin menurun.

Melalui pendekatan perilaku fertilitas dan teori ekonomi, antara usia menikah pertama dan struktur umur saling berkaitan (Keith, 1990). Usia menikah pertama yang relatif muda (kecil dari 35 tahun) akan memberikan pengaruh positif bagi jumlah angka kelahiran dan waktu yang diluangkan/curahkan bersama anak. Sebaliknya, usia menikah pertama yang relatif tua (lebih dari 35 tahun) cenderung berkorelasi negatif bagi jumlah kelahiran dan waktu bersama anak. Pada penelitian Yusuf (2020) diperoleh nilai korelasi antara lokasi dengan fertilitas sebesar $-0,222$, yang artinya lokasi akan berpengaruh secara negatif terhadap fertilitas seorang wanita, yakni sebesar 22% lokasi wanita yang tinggal di pedesaan memiliki potensi fertilitas yang tinggi dibanding wanita yang tinggal di perkotaan dan sebesar 78% dipengaruhi faktor lainnya.

Statistik menunjukkan bahwa angka fertilitas di perkotaan lebih kecil jika dibandingkan dengan di pedesaan, akan tetapi nilainya tidak signifikan. Jumlah bayi lahir anak di pedesaan hampir dua kali lebih banyak dibanding bayi lahir di perkotaan. Alene dan Worku (2009) menemukan indeks fertilitas yang hampir sama antara fertilitas di pedesaan dan perkotaan, sedangkan Sibanda et al. (2003) memperoleh temuan dari hasil penelitiannya bahwa angka fertilitas di pedesaan dibandingkan angka fertilitas di perkotaan. Menurut data (BKKBN, 2009) angka fertilitas di perkotaan lebih rendah jika dibandingkan dengan di pedesaan. Perbedaan angka fertilitas ini dipengaruhi oleh perubahan pola hidup masyarakat tradisional (pedesaan) menjadi masyarakat industri (perkotaan) Berdasarkan data empiris masyarakat industri cenderung mengikuti perubahan modernisasi, salah satunya dengan maraknya pemakaian alat kontrasepsi pada kegiatan hubungan seksual yang mengakibatkan mampu menekan angka fertilitas.

Hal-hal yang diuraikan di atas selaras dengan penelitian yang menyatakan umur perempuan menikah (15 hingga 49 tahun) yang bermukim di pedesaan berpotensi 1,25 kali untuk memiliki anak lebih dari 2 dibanding perempuan perkotaan yang menikah pada umur demikian (Ekawati, 2017) serta persentase perempuan yang tinggal di pedesaan memiliki potensi jumlah bayi lahir hidup 2 kali lebih banyak dibanding perempuan yang tinggal di perkotaan (Kartika dan Sari, 2020).

Berdasarkan perbedaan daerah ini dapat menyebabkan perbedaan *socioeconomic* (western, middle, dan eastern) yang mengakibatkan pola fertilitas. Nankai University China, memaparkan bahwa pertumbuhan penduduk pada wilayah *middle* dan *western* (Qingkai, Guizhou, Guangxi, dan lainnya) lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah eastern (Shanghai, Tianjin, dan Beijing). Hal ini terjadi akibat perbedaan tingkat kemajuan dari setiap daerah/wilayah. Artinya, pada wilayah eastern mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih maju (di atas rata-rata), sedangkan pada daerah *middle* dan *western* cenderung lebih rendah taraf pertumbuhannya. Hal lainnya yang memengaruhi tingkat fertilitas di wilayah berkembang dan maju (desa dan kota) antara lain: tradisi, budaya, ekonomi, dan mekanisasi.

Teori kependudukan (fertilitas) mendukung hasil penelitian Nankai University – China, di mana faktor sosial-ekonomi memengaruhi konsep dan perilaku kelahiran dan kehadiran seorang bayi. Selanjutnya, modernisasi melalui pandangan teori demografi memberikan kontribusi terhadap

perubahan tingkat fertilitas melalui *transformasi society* sehingga menyebabkan terjadinya perubahan sosio-ekonomi. Hal ini dimaknai dengan perubahan/transormasi menuju masyarakat maju/industri (open society) dari yang semula adalah masyarakat desa agraris (close society), sehingga mengubah tatanan, sistem, dan pola hidup masyarakat. Menurut United Nations (2001) pada masyarakat maju sistem struktur keluarga dan peranan wanita dalam rumah-tangga berhubungan secara positif. Artinya, wanita pada kondisi masyarakat maju memiliki kebebasan (independensi) yang lebih tinggi dari masyarakat desa agraris, sehingga memberikan dampak terhadap otonomi mereka dalam kontrol tingkat kelahiran (fertilitas). Didukung dengan pernyataan Bongaarts (1978) dan UN (2001) yang menyatakan bahwa di negara-negara maju mengalami penurunan angka fertilitas akibat faktor sosial ekonomi dan usia *childbearing* serta tingginya biaya klaim kelahiran (sosial dan ekonomi), sehingga akan menekan angka fertilitas di masyarakat maju.

Tingkat pendidikan dianggap memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan penduduk (fertilitas). Hal ini umumnya terjadi pada beberapa daerah dengan taraf pendidikan rendah yang memiliki anak tanpa perencanaan, sehingga terjadi ledakan pertumbuhan penduduk. Menurut Yusuf (2020) taraf pendidikan yang rendah menjadi faktor hambatan bagi suatu masyarakat untuk dapat selaras dengan pola pikir pemerintah yang menggalakkan program keluarga berencana guna mengantisipasi ledakan angka kelahiran.

Tamtiari (2005) memaparkan bahwa salah satu faktor penghambat dari seorang anak mendapatkan bangku pendidikan yang layak adalah alasan ekonomi, sehingga banyak orang tua yang enggan menyekolahkan anak hingga jenjang pendidikan lanjut. Lebih lanjut Bollen et al. (2002) memaparkan bahwa tingkat pendidikan wanita dan pria berpengaruh negatif terhadap fertilitas dan berpengaruh positif terhadap *permanent income*, hal ini didasari pada temuan dalam penelitiannya seperti yang terjadi di beberapa negara (Peru dan Ghana).

Pada penelitian Kartika dan Sari (2020) disampaikan bahwa pendidikan memberikan pengaruh yang kuat terhadap variabel antara, di antaranya umur menikah pertama, dan penggunaan alat kontrasepsi bagi wanita. Lucas (2003) menguatkan bahwa pendidikan tidak hanya sebagai faktor yang memengaruhi, melainkan sebagai faktor dominan dalam memengaruhi peningkatan atau penurunan fertilitas. Kemudian, pada penelitian Kartika dan Sari (2020) dijelaskan bahwa persentase bayi lahir hidup (fertilitas)

meningkat dengan meningkatnya pendidikan wanita dari tamat SMP hingga tamat SMA (lebih dari 2 bayi lahir hidup), dan akan menurun saat taraf pendidikan pada level perguruan tinggi (PT).

Temuan penelitian ini (Kartika dan Sari, 2020) sekaligus menjadi penguat bagi penelitian sebelumnya (Ogawa dan Akter, 2007 dan Severus, 2019) yang menyatakan bahwa semakin tinggi level pendidikan seorang wanita akan menyebabkan penundaan pernikahan, akses penitipan anak yang mudah sehingga membuat wanita berpendidikan lebih tinggi tidak begitu antusias kalau memiliki anak dalam hal merawat anaknya, fleksibilitas pada aturan pekerjaan untuk wanita sehingga wanita dominan lebih banyak yang memilih menjadi wanita karir daripada menjadi ibu rumah tangga dengan banyak anak, sehingga hal semacam ini mengakibatkan penurunan angka fertilitas.

7.4.3 Pengaruh Kegiatan Utama Terhadap Fertilitas

Kegiatan utama yang akan memengaruhi angka fertilitas dilihat berdasarkan kegiatan utama dari seorang perempuan. Apakah perempuan tersebut berkegiatan sebagai ibu rumah tangga atau sebagai wanita karir. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan yang kegiatan utamanya sebagai ibu rumah tangga cenderung memiliki jumlah bayi lahir hidup (fertilitas) lebih banyak dibandingkan perempuan yang bekerja. Hal ini dapat kita lihat dengan cara memperhatikan jumlah anak pada orang-orang tua kita dahulu yang cenderung berkegiatan utama sebagai ibu rumah tangga dengan jumlah anak tidak kurang dari 2.

Berbeda dengan kehidupan saat ini, di mana banyak perempuan yang memilih untuk bekerja (menjadi wanita karir), sehingga hasrat untuk memiliki anak lebih dari 2 sangat minim, bahkan tidak jarang yang berkeinginan untuk tidak memiliki anak yang menyebabkan penurunan angka fertilitas. Fakta lapangan yang penulis amati, sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya (Daouli et al., 2009; Siah dan Lee, 2015; Kartika dan Sari, 2020) yang mengemukakan temuannya di lapangan (masing-masing untuk di daerah Yunani, Malaysia, dan Kalimantan Selatan – Indonesia) bahwa wanita yang bekerja cenderung memiliki anak lebih sedikit.

7.4.4 Pengaruh Keputusan Ber-KB, Indeks Kekayaan Rumah Tangga, dan Usia Persalinan Pertama Terhadap Fertilitas

Keputusan ber-KB pada perempuan cenderung didasari keputusan yang diambil oleh suami. Angka fertilitas akan menurun (angka kelahiran kurang dari 2 bayi lahir hidup) sesuai dengan keputusan ber-KB yang diambil oleh Pasutri (pasangan suami-istri). Selain itu, kekayaan rumah tangga juga memiliki pengaruh (korelasi) negatif terhadap jumlah bayi lahir hidup. Artinya, indeks kekayaan dapat menjadi indikator terjadinya penurunan fertilitas (angka bayi lahir hidup).

Berdasarkan Tabel 7.1 jumlah bayi lahir hidup pada keluarga dengan indeks kekayaan teratas mengalami penurunan dan yang tertinggi cenderung terjadi pada keluarga dengan indeks kekayaan menengah. Selanjutnya, usia persalinan menjadi faktor penentu secara positif terhadap angka fertilitas (bayi lahir hidup). Usia persalinan seorang wanita pada usia kurang dari 20 tahun mendapatkan angka fertilitas besar dari 2 lebih besar, kemudian menurun pada rentang usia 20 – 35 tahun, dan tidak ada angka fertilitas lebih dari 2 pada perempuan dengan usia persalinan di atas 35 tahun (Tabel 7.2).

Tabel 7.1: Angka Fertilitas Menurut Indeks Kekayaan di Kalimantan Selatan (Kartika dan Sari, 2020)

Indeks Kekayaan	Fertilitas ≤ 2		Fertilitas ≥ 2	
	n	f	n	f
Paling bawah	100	23,53	47	22,60
Menengah – Bawah	99	23,29	53	25,48
Menengah	98	23,07	55	26,44
Menengah – Atas	67	15,76	26	12,50
Paling atas	61	14,35	27	12,98

Tabel 7.2: Angka Fertilitas Menurut Usia Persalinan di Kalimantan Selatan (Kartika dan Sari, 2020)

Usia Persalinan (tahun)	Fertilitas ≤ 2		Fertilitas ≥ 2	
	n	f	n	f
< 20	132	34,38	124	59,62
20 – 35	245	63,80	84	40,38
> 35	7	1,82	0	0

Bab 8

Mortalitas/Kematian

8.1 Pengertian

8.1.1 Mortalitas/Kematian

Mortalitas yaitu salah satu bagian dari unsur demografi yang memengaruhi dinamika penduduk, Sedangkan ada dua komponen demografi yang lainnya seperti fertilitas/ kelahiran dan migrasi/ perpindahan penduduk. Ada informasi yang sangat penting terkait kematian baik pemerintahan dan pihak swasta juga terutama yang bersangkutan dengan ekonomi dan kesehatan. dalam proyeksi penduduk untuk perencanaan pembangunan data kematian sangat dibutuhkan untuk sebagai informasi dalam mengevaluasi terhadap program- program kebijakan kependudukan seperti perencanaan pembangunan fasilitas pemukiman/ perumahan, sarana dan prasarana pendidikan dan jasa- jasa lainnya untuk kepentingan Masyarakat (Utomo, 2007).

Secara konsep kematian merupakan terjadinya pengurangan jumlah penduduk dengan hilangnya tanda kehidupan manusia selamanya. Dalam perhitungan besarnya jumlah angka kematian seimbang dengan jumlah angka kelahiran, tingginya angka kematian dapat faktor yang mendukung penyebab kematian dan rendahnya angka kematian karena adanya penghambat, faktor seperti umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status sosial ekonomi dan keadaan

lingkungan di mana tempat tinggal masyarakat, baik lingkungan fisik maupun sosial misalnya meningkatnya derajat kehidupan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan kondisi ini berpengaruh terhadap tinggi rendahnya angka kematian pada suatu populasi atau masyarakat (Utomo. 2007).

Menurut WHO keadaan menghilangnya semua tanda- tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup, berdasarkan definisi diatas bahwa kematian terjadi setelah kelahiran hidup, dengan kata lain kematian terjadi setelah adanya kehidupan. Mortalitas merupakan jumlah kematian setiap 1.000 penduduk dalam satu tahun dengan kata lain adanya jumlah kematian yang terjadi pada suatu wilayah tertentu pada tahun tertentu per 1000 penduduk dengan rumus, jumlah kematian dibagi dengan jumlah penduduk dalam tahun tersebut dikali 1.000 penduduk.

Kategori angka kematian per tahun:

1. dikatakan tinggi jika angka mortalitas lebih besar dari 18;
2. dikatakan sedang jika angka mortalitas 14 sampai dengan 18;
3. dikatakan rendah jika angka mortalitas lebih kecil dari 14.

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tinggi rendahnya angka mortalitas, sekaligus sebagai barometer terhadap tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sebab mortalitas merupakan variabel dalam demografi yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia setempat, termasuk gambaran status kondisi ekonomi di wilayah tersebut.

8.1.2 Sumber Data Kematian

Untuk data kematian dapat diperoleh dari berbagai sumber dari hasil registrasi vital dengan menyajikan data kematian secara langsung, di Indonesia belum lengkap dalam menyajikan data kematian, yang dapat dijadikan sebagai sumber kematian yang akurat antara lain Sensus penduduk, Survei penduduk, Rumah sakit, dinas pemakaman dan kantor polisi.

Sistem registrasi vital

Di Indonesia belum ada sistem registrasi vital yang skala nasional, masih bersifat lokal dan tidak sepenuhnya meliputi seluruh kejadian kematian pada kota tersebut. dalam registrasi vital semua kejadian kematian dicatat dan dilaporkan setelah terjadi kematian. sistem ini bekerja secara ideal yang dapat dijadikan sebagai sumber data kematian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati tentang Akurasi registrasi kematian mengatakan bahwa masih ada beberapa aspek fungsi sistem yang harus ditingkatkan. Daerah dengan nilai cukup tinggi adalah Surakarta (80%) dan Yogyakarta (68%) termasuk dalam kategori moderat atau 65–84, fungsional tetapi tidak memadai. Rata rata daerah dengan nilai di bawah 64%, atau lemah. Ada variasi dalam kekuatan dan kelemahan dari setiap daerah. Hal ini penting untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk mendapatkan Sistem Registrasi Kematian dan Penyebab Kematian yang lebih baik (Sulistiyowati and Irianto, 2016).

Menurut Sulistiwati bahwa sistem pencatatan kelahiran dan kematian di Kota Ambon sudah tersistem dan tertata cukup baik dan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan walaupun belum mencakup seluruh keterangan penyebab kematian, adanya perbedaan data registrasi vital dari berbagai instansi, keterbatasan sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kelahiran/kematian yang masih rendah (Sulistiwati E et al., 2019).

Sensus penduduk atau survei penduduk

Pengumpulan data penduduk secara keseluruhan termasuk data kejadian kematian yang dicatat setelah terjadi peristiwa kematian dalam beberapa waktu yang lama, data ini didapat melalui kegiatan sensus atau survei penduduk. sensus penduduk secara konsep yang dinyatakan oleh PBB dalam dokumennya tentang” Principle and Recommendation for National Population Census”.

Sensus penduduk dilakukan kepada seluruh populasi dengan proses pengumpulan data secara Kolektif, menyatukan dan menyusun untuk menerbitkan data demografi, sosial ekonomi yang berkaitan dengan semua masyarakat pada masa tertentu di suatu wilayah. Data kematian yang diperoleh melalui sensus atau survei dapat dibagi dua antara lain, Data kematian dalam bentuk langsung yang diperoleh dengan melakukan wawancara atau bertanya langsung kepada sasaran pada waktu tertentu tanpa menyebutkan batas waktu survei seperti ini disebut *Current Mortality Data*.

Untuk data kematian tidak langsung yang didapatkan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan bertahan hidup pada golongan masyarakat tertentu seperti anak, ibu dan ayah, namun secara realnya data kematian bentuk langsung kurang valid karena berkualitas tidak baik dibandingkan dengan bentuk data kematian tidak langsung, oleh karena itu di

Indonesia lebih sering digunakan data kematian tidak langsung, karena selain memperoleh data dari *survivorship* dari tempat lain juga dapat diperoleh seperti: Rumah sakit, Dinas pemakaman dan kepolisian bagian lalu lintas. tetapi ada perbedaan tingkat kematian antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat yang lainnya misalnya tingkat kematian berdasarkan jenis kelamin lebih tinggi pada laki- laki dari pada perempuan. tingkat kematian berdasarkan umur, tingkat kematian pada usia dewasa lebih rendah dibandingkan dengan anak dan bayi. perbandingan angka kematian pada negara maju lebih rendah dari pada negara sedang berkembang dikarenakan negara yang sudah maju tingkat status sosial ekonomi lebih baik dibandingkan negara sedang berkembang, faktor penyebab kematian berdasarkan tempat tinggal seperti keadaan sosial ekonomi, jenis pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur dan jenis kelamin.

Menurut Tukiran data yang terkumpul berisi informasi rumah tangga dan individu oleh sistem pengambilan sensus baik *de jure* maupun *de facto* untuk seluruh penduduk Indonesia termasuk mereka yang tinggal di luar negeri seperti korps diplomatik dengan mereka anggota keluarga. Untuk Sensus Penduduk Indonesia 2000 atau SP 2000 ,data rumah tangga dan penduduk menurut status tempat tinggal sementara, telah dimasukkan melalui Badan Pusat Statistik nasional, sedangkan datanya dengan status kependudukan tetap telah dilaksanakan oleh Pusat Daerah Biro Statistik, yang semuanya diperkirakan akan selesai sebelum akhir tahun 2000 (Tukiran 2000).

Indikator Mortality

Indeks yang dipakai sebagai barometer menentukan tinggi rendahnya angka kematian pada suatu penduduk merupakan indikator dalam *mortality*, Ada beberapa jenis pengukuran kematian, dari yang paling sederhana sampai yang komplit. tetapi dalam pencatatan kondisi kematian suatu penduduk tidak dapat diwakili oleh angka tunggal saja. namun dari berbagai macam ukuran kematian sekaligus dapat digunakan karena mencerminkan keadaan kematian suatu penduduk secara menyeluruh. pada umumnya semua ukuran kematian merupakan suatu “rate” atau “rasio”. Rate merupakan suatu ukuran yang menunjukkan terjadinya suatu kejadian (misalnya: kematian, kelahiran, sakit, dan sebagainya) selama periode waktu-waktu tertentu.

Menurut Alfana menunjukkan bahwa indikator mortalitas di Indonesia terus mengalami tren positif sejak 1950 sampai sekarang. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan di Indonesia mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan parameternya angka kematian bayi, angka kematian anak, dan harapan hidup menunjukkan tren yang positif di mana target dari ICPD dan WHO telah terpenuhi. Secara nasional, tren positif tersebut diproyeksikan akan terus membaik sampai tahun 2050. Meskipun demikian jika dilihat berdasarkan provinsinya, beberapa provinsi belum memenuhi target yang ditetapkan oleh ICPD dan WHO. Kurangnya tenaga fasilitas kesehatan, keterbatasan sarana prasarana kesehatan dan kurangnya dukungan dana untuk kesehatan menjadi penyebab beberapa provinsi tidak mampu memenuhi target tersebut (Arif et al., 2015).

8.2 Faktor Penentu Kematian

Tingginya angka kematian sangat ditentukan oleh dua faktor yaitu adanya faktor yang mendukung terjadinya kematian (Pro Mortality) dan yang menghambat terjadinya kematian (antimortality).

1. Faktor pendukung terjadinya kematian (pro mortalitas) yang menyebabkan angka kematian semakin tinggi antara lain :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan yang masih minim
 - b. Belum cukupnya fasilitas yang tersedia ditempat – tempat pelayanan kesehatan
 - c. Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap Kesehatan.
 - d. Adanya fenomena alam seperti terjadi bencana alam
 - e. Adanya konflik seperti terjadi perperangan
 - f. Adanya kecelakaan akibat kerja dan kecelakaan lalu lintas
 - g. Adanya tindakan pembunuhan dan bunuh diri
2. Faktor penghambat kematian (anti mortalitas) Faktor ini dapat menyebabkan angka kematian menjadi rendah. Yang termasuk faktor ini adalah:
 - a. Lingkungan tempat tinggal yang sehat.
 - b. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup.
 - c. Keyakinan sebagai benteng diri untuk tidak melakukan tindakan bunuh diri dan membunuh orang lain
 - d. Masyarakat yang berperilaku hidup sehat.

- e. Pendidikan masyarakat semakin tinggi sehingga tingkat pengetahuan tentang kesehatan semakin tinggi.

Untuk menghitung angka kematian ada beberapa jenis yaitu:

1. Crude Death Rate/CDR yaitu jumlah kematian kasar setiap 1000 penduduk dalam satu tahun, tanpa ada kriteria tertentu seperti usia dan jenis kelamin. adanya estimasi terhadap kematian kasar menurut United Nation (UN) Population Prospect. Terjadi penurunan jumlah angka kematian kasar merupakan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memberikan pengaruh yang baik terhadap derajat kesehatan masyarakat yang dapat menekan angka kematian penduduk.

Dinegara yang sudah berkembang angka kematian dapat diturunkan sampai dengan di bawah 10 dari 1000 penduduk kemudian sebaliknya dinegara yang belum berkembang masih berada diatas 20 dari 1000 penduduk. namun angka kematian berkisar antara 5 sampai dengan 35 per 1000 penduduk yang pada umumnya terjadi dari berbagai negara di dunia.

Menurut Ilpaj adanya tekanan selama pandemi global telah menyebabkan beberapa gangguan seperti ketakutan dan kecemasan baik pada diri sendiri maupun orang-orang terdekat; perubahan pola tidur dan pola makan, rasa tertekan dan sulit berkonsentrasi, bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah, terutama anak-anak, serta munculnya gangguan psikosomatik (Ilpaj and Nurwati, 2020)

2. Age specific Death Rate/ASDR kematian berdasarkan umur
Adanya risiko perbandingan jumlah kematian berdasarkan kelompok berdasarkan umur, seperti seseorang yang berumur 65 tahun akan mempunyai risiko lebih tinggi terhadap kematian dibandingkan yang masih berusia 20 tahun yang tergolong masih muda dan anak berumur 1 tahun lebih berisiko terhadap kematian dibanding anak yang berusia sudah sepuluh tahun dapat disimpulkan bahwa risiko kematian lebih berisiko pada usia sangat muda dan usia tua sehingga grafik pada angka kematian berbentuk “U”, jadi dengan kata lain ada

perbedaan risiko kematian berdasar tingkatan umur yang nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur bayi, anak dan dewasa, adanya risiko kematian yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan.

Menurut penelitian Saputra ini menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka kematian di Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang karena di kawasan ini banyak terdapat penduduk lansia (64+ tahun) sehingga faktor umur menjadi penyebab dominan banyaknya angka kematian di kawasan ini. Selain itu penyebab yang lainnya adalah sakit, pola makan, pendidikan (pengetahuan), pengecekan kesehatan, dan alasan kepentingan (Saputra, 2010).

Menurut Desra Tingkat pendidikan ibu memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat mortalitas di Sumatera Barat, Umur ibu berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat mortalitas di Sumatera Barat, Anggaran kesehatan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat mortalitas di Sumatera Barat, Tenaga medis berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat mortalitas di Sumatera Barat(Desra 2003).

3. Infant Mortality Rate/ IMR yaitu kematian Bayi

Jumlah kematian bayi yaitu kematian bayi dalam setiap 1000 bayi yang lahir dalam keadaan hidup, yang berusia antara 0-1 tahun Bayi, tingginya jumlah kematian bayi merupakan salah satu yang menjadi tolak ukur rendah derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila tinggi angka kematian bayi merupakan dampak dari rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Selain jumlah kematian bayi dan jumlah kematian ibu pada saat melahirkan merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat juga. Untuk angka kematian bayi ukurannya yaitu :

- a. dikatakan rendah, jika IMR antara 15 sampai dengan 35
- b. dikatakan sedang, jika IMR antara 36 sampai dengan 75.
- c. dikatakan tinggi, jika IMR antara 76 sampai dengan 125.

Menurut Andriani adanya penyebab kematian bayi yang berada di wilayah Ngombol pada bayi yang baru lahir dengan berat badan Rendah antara lain karena kekurangan oksigen di dalam berkurang atau Asfiksia, adanya cacat bawaan pada fungsi tubuh atau kelainan Kongenital. Ibu merupakan faktor penyebab secara tidak langsung seperti usia ibu yang berisiko pada saat melahirkan sudah berada diatas 30 tahun, usia kehamilan yang tidak cukup 37 minggu dan berisiko bayi lahir dalam keadaan prematur. Bayi yang lahir prematur disertai adanya komplikasi pada saat kehamilan ibu merupakan penyebab tidak langsung kematian bayi di wilayah kecamatan Ngombol, pada umumnya disebabkan oleh berat badan bayi lahir rendah, sebab pada saat tersebut organ tubuh bayi belum sempurna dan berfungsi dengan baik sehingga sangat beresiko terkena penyakit infeksi atau penyakit lain yang dapat mengganggu dan dapat menyebabkan kematian pada bayi yang berusia 0 sampai dengan 12 bulan (Andriani, 2016).

Menurut hasil penelitian Lengkong menunjukkan bahwa Terdapat hubungan antara berat badan bayi saat lahir, pemeriksaan ANC, status pekerjaan ibu, biaya kesehatan dengan kematian bayi di Indonesia. ini artinya kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil yaitu pelayanan ANC yang belum maksimal salah satu penyebab kematian bayi selain berat badan bayi juga faktor pendukung penyebab kematian seperti BBLR (Lengkong et al., 2020).

8.3 Ukuran Dasar Kematian

Mengukur kematian merupakan indeks yang dijadikan sebagai tolak ukur, angka kejadian kematian di suatu penduduk. Laporan angka kematian penduduk yaitu mencatat keadaan kematian pada suatu wilayah penduduk secara keseluruhan mulai dari yang paling simpel sampai yang paling kompleks dengan ukuran kematian rate atau Rasio.

Rate yaitu pengukuran kematian yang ditunjukkan oleh suatu kejadian kematian pada periode waktu tertentu seperti kematian, kesakitan, sakit. Secara umum diuraikan Rate sebagai berikut:

Rate (Suatu Kejadian):

Jumlah kejadian yang selama periode waktu tertentu

Jumlah penduduk yang mempunyai risiko mengalami kejadian tersebut selama periode yang sama.

Ratio yaitu ukuran dalam bentuk angka tunggal menyatakan hasil dari perbandingan dua angka dan ada juga dipakai dalam bentuk persentase, dalam rate atau rasio yaitu ukuran populasi golongan yang bersangkutan yang dapat dijelaskan:

Kapan : waktu berlaku ukuran tersebut

Siapa : ukuran tersebut mengenai populasi yang mana

Apa : Ukuran tersebut merupakan ukuran kejadian apa

Sex Ratio penduduk:

Jumlah penduduk laki- laki

Jumlah penduduk wanita

Persentase kematian Pria:

Jumlah kematian laki- laki

Jumlah kematian laki – laki dan wanita

Ukuran angka Kematian Kasar (CDR / Crude Death Rate)

$$\begin{aligned} \text{CDR} &= \frac{\text{Jumlah kematian pada tahun X}}{\text{Jumlah penduduk pada pertengahan tahun X}} \times 1.000 \\ &= \frac{D}{P} \times k \end{aligned}$$

Di mana:

D :Jumlah kematian pada tahun x

P :Jumlah Penduduk pada pertengahan Tahun x

K : 1.000

Contoh :

Daerah X penduduk 600 pada 5 Januari 1995 dan 700 pada 5 Januari 1996. jadi penduduk pada pertengahan tahun 1996 adalah:

$$\frac{600 + 700}{2} = 650$$

Apabila terdapat ada 20 kematian pada Daerah X tersebut selama tahun 1996 maka CDR adalah :

$$\frac{20}{650} \times 1000 = 30 \text{ per seribu}$$

jadi rata- rata angka kematian di Daerah X tahun 1996 terdapat 30 kematian per 1000 penduduk.

Ukuran Kematian menurut Umur (ASDR/ Age Spesific Death Rate)

ASDR merupakan angka kematian menurut umur dapat dirumuskan seperti berikut :

$$\text{ASDR untuk grup umur } i = \left[\frac{\text{jumlah kematian orang berumur } i \text{ pada tahun } x}{\text{Jumlah penduduk berumur } i \text{ pada pertengahan tahun } x} \right] \times 1.000$$

$$D_i = \frac{D_i}{P_i} \times k$$

di mana:

D_i = jumlah kematian dari orang -orang berumur i

P_i = jumlah penduduk berumur i (pada pertengahan tahun)

$$k = 1.000$$

Ukuran kematian bayi

Angka kematian bayi tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut :

$$\text{Angka kematian bayi} = \frac{\text{Jumlah kematian bayi berumur di bawah 1 tahun selama tahun } x}{\text{Jumlah kelahiran selama 1 tahun}} \times 1.000$$

Angka Kematian ibu (MMR/ Maternal Mortality Rate)

kematian ibu karena komplikasi akibat kehamilan, persalinan, dan Nifas yang dicatat selama satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

$$\text{Angka kematian ibu} = \frac{\text{Jumlah kematian ibu hamil, persalinan, dan nifas yang dicatat selama 1 tahun}}{\text{jumlah kelahiran hidup tahun yang sama}} \times 1000$$

Mortalitas merupakan salah satu komponen demografi yang menghitung kematian suatu penduduk di wilayah tertentu, dengan segala faktor penyebab kematian itu sendiri, kematian merupakan salah satu indikator baik atau buruknya derajat kesehatan, sebab semakin rendah angka kematian semakin baik tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Menghitung angka kematian ada beberapa jenis seperti, angka kematian kasar (CDR), angka kematian berdasarkan kelompok umur (ASDR) dan angka kematian pada bayi serta angka kematian ibu.

Bab 9

Migrasi

9.1 Pendahuluan

Di dalam kepustakaan demografi sosial disebutkan bahwa perubahan jumlah, komposisi, distribusi dan pertumbuhan penduduk dalam suatu daerah, dipengaruhi oleh sedikitnya lima komponen demografi yaitu:

1. Kelahiran ,
2. Kematian,
3. Migrasi,
4. Mobilitas Sosial dan
5. Perkawinan.

Pada dasarnya migrasi adalah pergerakan penduduk secara geografis, atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Hugo (1995) membedakan migrasi dalam dua kategori, yaitu migrasi permanen dan non permanen. Perbedaannya terletak pada tujuan pergerakan tersebut. Bila seorang migran bertujuan untuk pindah tempat tinggal secara tetap, migran tersebut dikategorikan sebagai migran permanen, sebaliknya bila tidak ada niat menetap di tempat tujuan dikategorikan sebagai migran sirkuler.

Mantra (2000) menambahkan satu lagi bentuk yang disebut komutasi, yaitu pergerakan penduduk yang dilakukan dengan cara pergi ke tempat kerja dan

pulang ke rumah pada hari yang sama. Berbeda dengan migrasi permanen yang memboyong seluruh anggota keluarganya dan menetap di daerah tujuan, migrasi sirkuler adalah migran yang meskipun bekerja di tempat tujuan, tetapi umumnya keluarga masih tetap tinggal di daerah asal. Dikatakan Jellinek (1986), bahwa migran sirkuler adalah migran yang meninggalkan daerah asal hanya untuk mencari nafkah, tetapi mereka menganggap dan merasa tempat tinggal permanen mereka di tempat asal, di mana terdapat istri, anak, dan kekayaannya.

Migrasi sebagai suatu proses perpindahan penduduk mengalami peningkatan yang cukup berarti pada beberapa dasawarsa belakangan ini, terutama di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Peningkatan arus migrasi ini terutama terjadi dari desa menuju kota. Dilihat dari sebab terjadinya, pada dasarnya migrasi timbul karena adanya perbedaan kondisi alam dan/atau kondisi sosial ekonomi antara daerah yang satu dengan yang lain. Terbatasnya sumber daya alam dan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi menjadi faktor dominan bagi penduduk meninggalkan daerah asal.

Oberai (1985) mengatakan bahwa di banyak negara Asia, seperti juga di negara-negara dunia ketiga pada umumnya, kemiskinan merupakan faktor pendorong para migran meninggalkan daerah asal menuju ke daerah tujuan yang memiliki lebih banyak kesempatan memperoleh sumber daya sosial ekonomi. Manifestasi kemiskinan tersebut ditandai oleh pendapatan yang rendah di sektor pertanian, produktivitas rendah dan gejala pengangguran yang parah.

9.2 Pengertian Migrasi

Migrasi merupakan salah satu faktor dasar di samping faktor kelahiran dan kematian yang memengaruhi pertumbuhan penduduk. Di negara-negara yang sedang berkembang migrasi secara regional sangat penting untuk dikaji secara khusus, mengingat meningkatnya kepadatan penduduk yang pesat di daerah-daerah tertentu sebagai distribusi penduduk yang tidak merata. Definisi migrasi dalam arti luas menurut Lee (1991) Migrasi adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya. Apakah tindakan itu bersifat sukarela atau terpaksa. Tidak diadakan perbedaan antara migrasi dalam negeri dan migrasi

ke luar negeri. Jadi pindah tempat dari satu tempat tinggal ke tempat tinggal lain hanya dengan melintasi lantai antara kedua ruangan itu dipandang sebagai migrasi.

Terdapat sedikit perbedaan antara mobilitas dan migrasi penduduk. Mobilitas penduduk didefinisikan sebagai perpindahan penduduk yang melewati batas administratif tingkat II, namun tidak berniat menetap di daerah yang baru, sedangkan migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk yang melewati batas administratif tingkat II dan sekaligus berniat menetap di daerah yang baru tersebut. (Mantra, 2000) Menjelaskan bahwa mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, mobilitas penduduk vertikal, yang sering disebut dengan perubahan status. Contohnya adalah perubahan status pekerjaan, di mana seseorang semula bekerja dalam sektor pertanian sekarang bekerja dalam sektor non-pertanian. Kedua, mobilitas penduduk horizontal, yaitu mobilitas penduduk geografis, yang merupakan gerak (movement) penduduk yang melewati batas wilayah menuju wilayah lain dalam periode waktu tertentu.

Selanjutnya Mantra (2000) menjelaskan bila dilihat dari ada tidaknya niat untuk menetap di daerah tujuan, mobilitas penduduk dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk permanen atau migrasi; dan mobilitas penduduk non-permanen. Jadi, menurut Mantra (2000) migrasi adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah asal menuju ke wilayah tujuan dengan niatan menetap. Sebaliknya, mobilitas penduduk non-permanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan. Bila seseorang menuju ke daerah lain dan sejak semula sudah bermaksud tidak menetap di daerah tujuan, orang tersebut digolongkan sebagai pelaku mobilitas non-permanen walaupun bertempat tinggal di daerah tujuan dalam jangka waktu lama .

Lebih lanjut menurut Mantra, (2000), gerak penduduk yang non permanen (circulation) ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ulang-alik (Jawa = nglaju; Inggris = commuting) dan menginap atau mondok di daerah tujuan. Mobilitas ulang-alik adalah gerak penduduk dari daerah asal menuju ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dengan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Sedangkan mobilitas penduduk mondok atau menginap merupakan gerak penduduk yang meninggalkan daerah asal menuju ke daerah tujuan dengan batas waktu lebih dari satu hari, namun kurang dari enam bulan.

Secara ringkas bentuk-bentuk mobilitas penduduk di atas diringkas dalam Tabel berikut:

Tabel 9.1: Bentuk-Bentuk Mobilitas Penduduk (Mantra, 2000)

Bentuk Mobilitas	Batas Wilayah	Batas Waktu
Ulang-alik (commuting)	Dukuh (dusun)	6 jam atau lebih dan kembali pada hari yang sama
Menginap/mondok di daerah tujuan	Dukuh (dusun)	Lebih dari satu hari tapi kurang dari 6 bulan
Permanen/menetap di daerah tujuan	Dukuh (dusun)	6 bulan atau lebih menetap di daerah tujuan

9.3 Pengambilan Keputusan Bermigrasi

Selama ini gejala migrasi tenaga kerja sudah sangat lazim dianalisis dan dijelaskan dengan menggunakan tiga paradigma yang sudah dikenal yaitu: pertama; pendekatan teori ekonomi; Kedua; pendekatan Psikologi yang menganalisis motif-motif orang untuk berpindah dan ketiga; teori-teori perspektif demografi dan geografi yang bersumber dari hukum gravitasi Ravenstein (Todaro, 2003). Teori-teori yang bersumber dari Ravenstein ini sangat menekankan pada faktor pendorong dan penarik migrasi, yang ditulisnya pada tahun 1885 dan menjadi dasar bagi pengembangan analisis-analisis *migrasi spatial* selama beberapa dekade dari tahun 1970 hingga menjelang awal 1990 (Lee, 1991) (Hugo, 1995) (Mantra, 2000).

Demikian pula dengan teori-teori pengambilan keputusan bermigrasi selama ini yang masih didominasi oleh teori-teori yang bersumber dari paradigma ekonomi, psikologi, demografi dan atau geografi sosial.

Beberapa teori yang mengacu pada paradigma ekonomi, misalnya;

1. Teori *Neoclassical Economic Macro* yang menjelaskan perpindahan para pekerja dari negara yang kelebihan tenaga kerja dan kekurangan modal menuju ke negara yang kekurangan tenaga kerja tetapi memiliki modal besar (Hugo, 1995).

2. Teori *Neoclassical Economic Micro*, yang menyarankan kepada para migran potensial agar dalam pengambilan keputusan bermigrasi mempertimbangkan biaya dan keuntungan perpindahan ke daerah tujuan yang memiliki potensi lebih besar dibandingkan daerah asalnya (Gheasi and Nijkamp, 2017).
3. Teori *Segmented Labour Market* yang menyatakan, bahwa pekerja melakukan migrasi karena ditentukan oleh tingginya permintaan pasar kerja di negara lain (Abella, 1995). Dalam teori ini faktor ketertarikan pasar atas migrasi tenaga kerja jauh lebih dominan dibandingkan dengan faktor tekanan untuk berpindah oleh sebab lain dari daerah asal.

Dalam konteks pengambilan keputusan bermigrasi di tingkat individu, sebenarnya ada banyak model pendekatan teoritis yang bisa digunakan. Salah satu di antaranya model Todaro. Menurut Todaro (2003), dorongan utama migrasi adalah pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap keuntungan (benefit) dan biaya (cost) baik dalam arti finansial maupun psikologis. Ada dua alasan mengapa seseorang melakukan perpindahan:

1. Meskipun pengangguran di kota bertambah, tetapi seseorang masih mempunyai harapan (expecting) untuk mendapatkan salah satu dari sekian banyak lapangan kerja yang ada di kota,
2. Seseorang masih berharap untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di tempat tujuan dibandingkan dengan daerah asal (Rahmadana and Sagala, 2019).

Besarnya harapan diukur dari:

1. Perbedaan upah riil antara desa dan kota dan
2. Kemungkinan seseorang mendapatkan salah satu jenis pekerjaan yang ada di kota (Rahmadana, 2014).

Asumsi Todaro adalah bahwa, dalam jangka waktu tertentu, harapan pendapatan di kota tetap lebih tinggi dibandingkan dengan di desa, walaupun dengan memperhitungkan biaya migrasi. Teori pengambilan keputusan bermigrasi di tingkat individu dari perspektif geografi yang berpengaruh kuat dalam analisis- analisis migrasi pada era 1970-an hingga menjelang awal tahun

1990-an adalah teori yang diajukan oleh Lee. Keputusan bermigrasi di tingkat individu, dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu;

1. faktor-faktor yang ada di daerah asal migran;
2. faktor yang terdapat di daerah tujuan migrasi;
3. faktor penghalang migrasi dan;
4. faktor individu pelaku migrasi (Lee, 1991).

Model lain, yang juga banyak dipakai adalah pendekatan Economic Human Capital. Ini adalah pendekatan mikro ekonomi yang berasumsi bahwa, seseorang memutuskan untuk berpindah ke tempat lain adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar di tempat tujuan. Tindakan seperti ini dianalogikan sebagai tindakan melakukan investasi sumber daya manusia. Prinsip dasar model ini menyatakan bahwa investasi sumber daya manusia sama artinya dengan investasi di bidang usaha yang lain.

Menurut teori ini, seseorang yang memutuskan untuk berpindah tempat, berarti mengorbankan pendapatan yang seharusnya ia terima selama hidupnya di tempat asal (sebut saja $=Y_v$), merupakan opportunity cost untuk memperoleh sejumlah pendapatan yang jumlahnya lebih besar di tempat tujuan migrasi (sebut saja $=Y_w$). Selain Opportunity cost, individu yang bersangkutan juga mengeluarkan biaya langsung dalam bentuk ongkos transportasi, barang-barang, biaya pemondokan, dan biaya hidup lainnya. Semua biaya tersebut (opportunity cost dan biaya langsung) dianggap sebagai investasi yang melekat pada diri migran. Imbalannya adalah, adanya arus pendapatan yang lebih besar di daerah tujuan, yang tadi dinyatakan dengan $=Y_w$.

Teori lain yang juga lazim dipakai di dalam analisis pengambilan keputusan bermigrasi adalah teori *New Household Economic*. Menurut teori ini, arus migrasi akan membentuk strategi perekonomian rumah tangga guna memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan risiko serta menghilangkan tekanan yang berasal dari kegagalan pasar (Hugo, 1995) (Gheasi and Nijkamp, 2017). Teori ini menjelaskan sebuah wawasan utama dalam pendekatan terbaru bahwa, aturan migrasi tidaklah dibuat oleh individu yang terisolasi, tetapi dibuat oleh sekelompok orang yang saling berhubungan – semacam kerabat atau keluarga di mana orang-orang akan bertindak secara kolektif (Gheasi and Nijkamp, 2017). Semua pendekatan teoritik yang bersumber dari paradigma ekonomi sebagaimana dipaparkan di atas, sudah sangat lazim digunakan dalam analisis-analisis migrasi.

9.4 Pull and Push Factor Theory

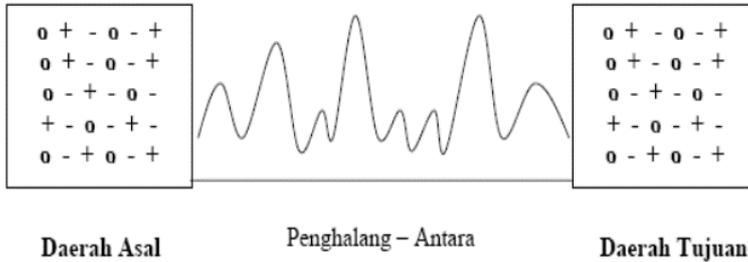
Volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keragaman daerah-daerah di wilayah tersebut (Lee, 1991) (Mantra, 2000). Di daerah asal dan di daerah tujuan, terdapat faktor-faktor yang disebut sebagai:

1. Faktor positif (+) yaitu faktor yang memberikan nilai keuntungan bila bertempat tinggal di tempat tersebut.
2. Faktor negatif (-) yaitu faktor yang memberikan nilai negatif atau merugikan bila tinggal di tempat tersebut sehingga seseorang merasa perlu untuk pindah ke tempat lain.
3. Faktor netral (0) yaitu yang tidak berpengaruh terhadap keinginan seorang individu untuk tetap tinggal di tempat asal atau pindah ke tempat lain.

Selain ketiga faktor diatas terdapat faktor rintangan antara. Rintangan antara adalah hal-hal yang cukup berpengaruh terhadap besar kecilnya arus mobilitas penduduk. Rintangan antara dapat berupa: ongkos pindah, topografi wilayah asal dengan daerah tujuan atau sarana transportasi. Faktor yang tidak kalah penting yang memengaruhi mobilitas penduduk adalah faktor individu. Karena faktor individu pula yang dapat menilai positif atau negatifkah suatu daerah dan memutuskan untuk pindah atau bertahan di tempat asal.

Arus migrasi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu:

1. Faktor individu.
2. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, seperti: keterbatasan kepemilikan lahan, upah di desa rendah, waktu luang (Time lag) antara masa tanam dan masa panen, sempitnya lapangan pekerjaan di desa, terbatasnya jenis pekerjaan di desa.
3. Faktor di daerah tujuan, seperti: tingkat upah yang tinggi, luasnya lapangan pekerjaan yang beraneka ragam.
4. Rintangan antara daerah asal dengan daerah tujuan, seperti: sarana transportasi, topografi desa ke kota dan jarak desa kota. Atau dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9.1: Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Bermigrasi (Mantra, 2000)

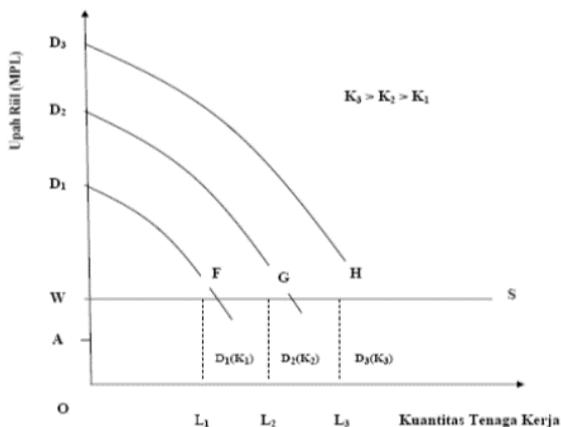
9.5 Teori Migrasi Lewis-Fei-Ranis

Berkenaan dengan kajian ekonomi migrasi internal, oleh Lewis 1961, yaitu tentang proses perpindahan tenaga kerja desa-kota, di mana model yang dikembangkan Lewis 1961 tersebut diperluas Fei dan Ranis pada 1961 dan merupakan teori umum yang diterima dan dikenal dengan Model Lewis-Fei-Ranis (L-F-R). Fokus utama dari model ini adalah pada proses perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan peluang kerja di sektor modern. Teori perpindahan tenaga kerja tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh (Todaro, 2003) dengan diilustrasikan pada gambar di bawah, yaitu proses pertumbuhan sektor modern. Pada sumbu vertikal digambarkan upah riil dan produk marginal tenaga kerja (diasumsikan sama dalam sektor modern yang kompetitif) dan pada sumbu horizontal digambarkan kuantitas tenaga kerja.

Pada gambar 9.2 OA mencerminkan rata-rata pendapatan subsisten riil di sektor tradisional pedesaan. OW adalah upah riil di sektor kapitalis, di mana tenaga kerja desa diasumsikan 'tak terbatas' atau elastis sempurna, seperti diperlihatkan kurva penawaran tenaga kerja WS. Pada tahap awal pertumbuhan di sektor modern dan dengan suplai modal $K1$, kurva permintaan untuk tenaga kerja ditentukan oleh kurva $D1(K1)$. Karena para pengusaha di sektor modern yang memaksimalkan keuntungan diasumsi membayar upah para pekerja sampai suatu titik, bahwa produk fisik marginal mereka adalah sama dengan upah riil (yaitu titik potong F di antara kurva penawaran suplai dan permintaan tenaga kerja), total tenaga kerja sektor modern akan sama dengan $OL1$.

Total output sektor modern ditunjukkan oleh area yang dibatasi dengan titik-titik OD1 FL1. Bagian seluruh output yang dibayarkan kepada para pekerja dalam bentuk upah karenanya akan sama dengan bidang persegi empat OW FL1. Kelebihan output yang diperlihatkan oleh bidang W D1F akan menjadi total keuntungan yang diperoleh para kapitalis. Karena diasumsikan bahwa semua keuntungan ini diinvestasikan kembali, jumlah stok kapital pada sektor modern akan naik dari K_1 ke K_2 . Stok kapital yang lebih besar ini mengakibatkan naiknya kurva produk total sektor modern.

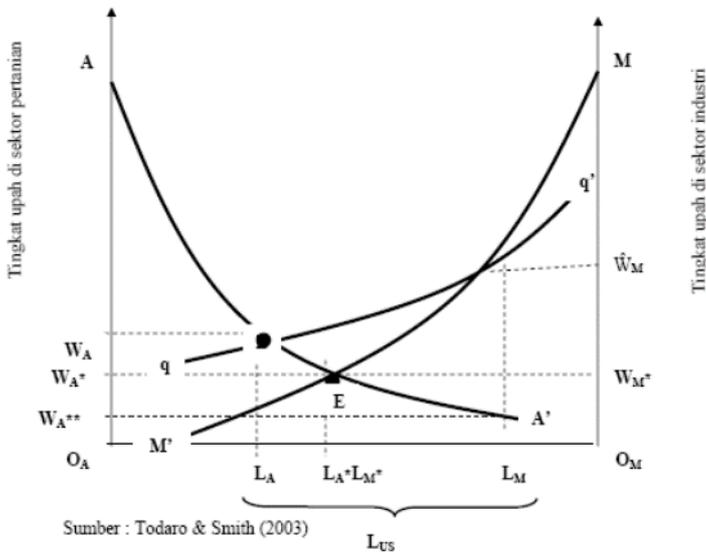
Kemudian menyebabkan kenaikan dalam kurva permintaan atau produk marginal tenaga kerja. Pergeseran keluar dari kurva permintaan ini ditunjukkan dengan garis D2(K2) dalam gambar tersebut. Tingkat keseimbangan baru pada peluang kerja di kota terjadi pada titik G dengan tenaga kerja yang dipekerjakan menjadi sebanyak OL2. Output total menjadi OD2 GL2, sementara upah total dan keuntungan secara berturut-turut naik masing-masing menjadi OW GL2 dan W D2G. Sekali lagi, keuntungan W D2G yang lebih besar tersebut diinvestasikan kembali, sehingga meningkatkan seluruh stok kapital menjadi K_3 , dan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke D3(K3) dan menaikkan tingkat peluang kerja sektor modern menjadi L3.



Gambar 9.2: Grafik Model Lewis-Fei-Ranis (L-F-R) Tentang Pertumbuhan Sektor Modern Dalam Perekonomian Dua Sektor yang Mengalami Surplus Tenaga Kerja (Todaro, 2003)

9.6 Teori Migrasi Todaro

Teori ekonomi tentang migrasi desa-kota juga dikemukakan oleh Todaro, di mana diasumsikan bahwa migrasi desa-kota pada dasarnya merupakan suatu fenomena ekonomi. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan migrasi juga merupakan suatu keputusan yang telah dirumuskan secara rasional. Pada intinya Todaro mendasarkan pada pemikiran bahwa arus migrasi berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan antara kota dengan desa. Mereka baru akan memutuskan untuk melakukan migrasi jika penghasilan bersih di kota melebihi penghasilan bersih yang tersedia di desa. Penjelasan mengenai model ini diperlihatkan dalam gambar berikut.



Gambar 9.3: Model Migrasi Todaro (Todaro, 2003)

Pada gambar grafik di atas diasumsikan dalam suatu perekonomian hanya ada dua sektor, yakni sektor pertanian di pedesaan dan sektor industri di perkotaan. Tingkat permintaan tenaga kerja di dalam sektor pertanian ditunjukkan oleh garis melengkung ke bawah, AA' , sedangkan tingkat permintaan tenaga kerja di sektor industri ditunjukkan oleh garis lengkung MM' . Dalam perekonomian pasar neoklasik, tingkat upah ekuilibrium tercipta bila $W^*A = W^*M$, dengan

pembagian tenaga kerja sebanyak OAL^*A untuk sektor pertanian dan OML^*M untuk sektor industri.

Sesuai dengan asumsi *full employment*, segenap tenaga kerja yang tersedia akan terserap habis oleh kedua sektor ekonomi tersebut. Namun, bila tingkat upah ditentukan oleh pemerintah, misalnya sebesar $\hat{W}M$ dan diasumsikan bahwa dalam perekonomian tersebut tidak ada pengangguran, maka tenaga kerja sebanyak $OMLM$ akan bekerja di sektor industri manufaktur di perkotaan, sedangkan sisanya sebanyak $OALM$ akan berkecimpung dalam sektor pertanian di pedesaan dengan tingkat upah sebanyak $OAWA^{**}$, di mana tingkat upah ini lebih kecil dibanding tingkat upah pasar yang mencapai $OAWA^*$.

Kondisi yang demikian itu menciptakan kesenjangan atau selisih upah antara kota dan desa sebesar $\hat{W}M - WA^{**}$. Selisih upah inilah yang membuat para pekerja di pedesaan bebas melakukan migrasi ke kota untuk memburu tingkat upah yang lebih tinggi, meskipun di desa tersedia lapangan kerja sebanyak $OMLM$. Jika peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dinyatakan sebagai rasio antara penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur (LM) dan total angkatan kerja desa (LUS), maka nilai peluang itu bisa kita hitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Nilai peluang perolehan pekerjaan itulah yang selanjutnya akan menyamakan tingkat upah di pedesaan, yakni WA (kondisi ini ditunjukkan oleh kurva qq'). Adanya selisih tingkat upah desa-kota tersebut kemudian mendorong terjadinya arus migrasi dari desa ke kota. Titik ekuilibrium baru berada di titik Z , di mana selisih pendapatan aktual antara desa dan kota sama dengan $\hat{W}M - WA$.

Jumlah tenaga kerja yang masih ada di sektor pertanian adalah $OALA$, sedangkan tenaga kerja di sektor industri sebanyak $OMLM$ dengan tingkat upah $\hat{W}M$. Sisanya, yaitu $LUS = OMLA - OMLM$, akan menganggur atau masuk di sektor informal yang berpendapatan rendah. Hal ini menjelaskan adanya pengangguran di daerah perkotaan dan rasionalitas ekonomi atas terus berlangsungnya migrasi dari desa ke kota, meskipun angka pengangguran di perkotaan cukup tinggi.

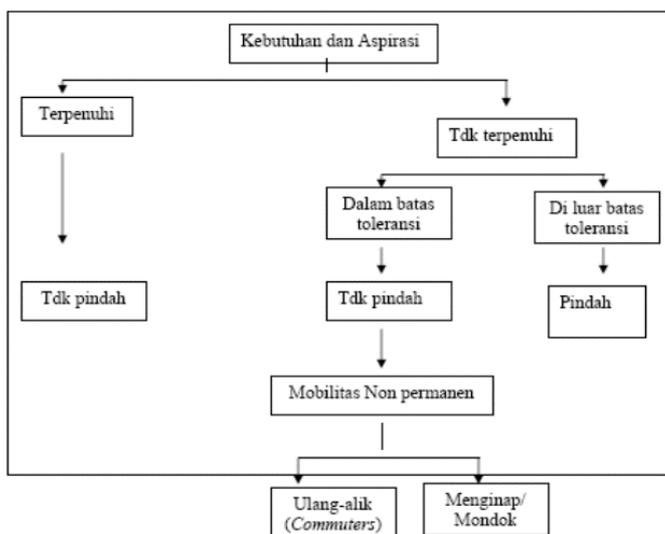
Jadi singkatnya, model migrasi Todaro memiliki empat pemikiran dasar sebagai berikut:

1. Migrasi desa-kota dirangsang, terutama sekali, oleh berbagai pertimbangan ekonomi rasional yang langsung berkaitan dengan keuntungan atau manfaat dan biaya-biaya relatif migrasi itu sendiri.
2. Keputusan untuk bermigrasi tergantung pada selisih antara pendapatan yang diharapkan di kota dan tingkat pendapatan aktual di pedesaan. Maksudnya ada dua variabel pokok, yaitu selisih upah aktual di kota dan di desa, serta besar atau kecilnya kemungkinan mendapatkan pekerjaan di perkotaan yang menawarkan tingkat pendapatan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Kemungkinan mendapatkan pekerjaan di perkotaan berkaitan langsung dengan tingkat lapangan pekerjaan di perkotaan, sehingga berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan.
4. Laju migrasi desa-kota bisa saja terus berlangsung meskipun telah melebihi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Kenyataan ini memiliki landasan yang rasional karena adanya perbedaan ekspektasi pendapatan yang sangat lebar, yakni para migran pergi ke kota untuk meraih tingkat upah yang lebih tinggi yang nyata (memang tersedia). Dengan demikian lonjakan pengangguran di kota merupakan akibat yang tidak terhindarkan dari adanya ketidakseimbangan kesempatan ekonomi yang sangat parah antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan (berupa kesenjangan tingkat upah tadi) (Todaro, 2003).

9.7 Teori Kebutuhan dan Tekanan

Tiap-tiap individu memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan ekonomi, sosial maupun psikologis. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan memunculkan tekanan atau stres. Tinggi rendahnya tekanan yang dialami oleh masing-masing individu berbanding terbalik dengan proporsi pemenuhan tersebut.

Ada dua yang dapat diakibatkan dari tekanan. Apabila tekanan yang dirasakan oleh seorang individu masih dalam batas toleransi maka individu tidak akan pindah dengan tetap di daerah asal dan berusaha menyesuaikan kebutuhan dan fasilitas yang tersedia di lingkungan tersebut. Namun apabila bila tekanan yang dirasakan oleh seorang individu di luar batas toleransinya maka individu tersebut akan mempertimbangkan untuk pindah ke tempat lain di mana dia merasa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya dapat terpenuhi dengan baik. Maka bisa dikatakan bahwa seseorang akan pindah dari tempat yang memiliki nilai kefaedahan tempat (*place utility*) rendah ke tempat yang memiliki nilai kefaedahan tempat lebih tinggi agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Hubungan antara kebutuhan dan pola mobilitas penduduk dapat dilihat dalam diagram gambar 9.4.



Gambar 9.4: Hubungan Antara Kebutuhan Dan Pola Mobilitas Penduduk (Mantra, 2000)

Berdasarkan gambar 9.4. di atas dapat dilihat bahwa proses mobilitas penduduk terjadi bila memenuhi kondisi, (1) Seorang individu mengalami tekanan (Stres) di tempat ia berada. Masing-masing individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Semakin heterogen struktur penduduk di suatu daerah maka semakin heterogen pula tekanan yang mereka hadapi dan (2) Terjadi perbedaan nilai kefaedahan tempat antara suatu wilayah dengan wilayah lain.

9.8 Pola Migrasi Kota-Desa

Pola migrasi di negara-negara yang sudah berkembang pesat biasanya sangat kompleks. Fenomena ini menggambarkan kesempatan ekonomi yang lebih seimbang dan menunjukkan saling ketergantungan (interdependensi) antara wilayah di dalamnya, serta merefleksikan keseimbangan aliran sumber daya manusia dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang, pola migrasi yang terjadi menunjukkan suatu pengutuban (polarisasi), yaitu pemusatan arus migrasi ke wilayah tertentu saja, khususnya kota-kota besar.

Hal yang sama juga dijelaskan bahwa pola migrasi desa-kota di Negara berkembang (termasuk di Indonesia) menunjukkan adanya konsentrasi pendatang yang tinggi di kota-kota besar seperti misalnya Jakarta, yaitu kota-kota yang relatif mempunyai sektor modern yang besar dan dinamis. Sedangkan kota-kota kecil lainnya yang kurang dinamis sering kali menunjukkan tingkat migrasi netto (selisih migrasi keluar dengan migrasi masuk) yang rendah. Dengan demikian dikemukakan oleh bahwa migrasi desa-kota tidak hanya disebabkan oleh faktor dorongan di desa, tetapi juga oleh faktor daya tarik di kota.

Berkenaan dengan hal tersebut, perpindahan (mobilitas) tenaga kerja desa-kota tidak selalu berpola pada pergerakan tenaga kerja dari daerah kecil (kecamatan/kabupaten) ke daerah besar (kota provinsi/ibu kota). Pola daerah tujuan tenaga kerja tersebut mempunyai empat kategori, yaitu: *urban town*, *small city*, *medium-sized city* dan *big city* (Studies et al., 2014).

9.9 Instrumen Kebijakan Migrasi

Pada era paradigma baru ketransmigrasian dalam mendukung otonomi daerah, sebaiknya keunggulan program tidak hanya terletak pada kebijakan migrasi langsung (*direct policy*) yaitu pemerintah memindahkan penduduk secara massal ke daerah tujuan migrasi, tetapi lebih mengutamakan keterbukaan dan sosialisasi kebijakan dan program, yang lebih fokus pada kebijakan tidak langsung (*indirect policy*) dengan mengedepankan potensi daerah tujuan migrasi.

Berdasarkan kebijakan migrasi internal yang telah ditetapkan pemerintah, maka beberapa bentuk kebijakan tidak langsung yang merupakan instrumen kebijakan makroekonomi yang mendukung kebijakan-kebijakan tersebut adalah: Upah Minimum Regional. Tujuan seseorang untuk migrasi adalah untuk memperoleh kesejahteraan dan pendapatan yang lebih baik. Jika upah minimum antar daerah seimbang, diharapkan dapat mengurangi keinginan penduduk.

Pengeluaran Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur berfungsi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, mengingat fondasi utama untuk mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi jika ada peningkatan stok dan perbaikan kualitas infrastruktur. Dampak pembangunan dan perbaikan infrastruktur diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi penduduk setempat dan pendatang untuk meningkatkan aktivitas ekonominya, sehingga dapat memperluas dan membuka kesempatan kerja.

Suku Bunga. Suku bunga merupakan variabel penting yang memengaruhi investasi. Penurunan suku bunga diharapkan dapat mendorong meningkatnya investasi baru. Pembukaan dan peningkatan investasi tersebut, diharapkan juga dapat membuka kesempatan kerja di daerah bersangkutan, sehingga dapat menurunkan jumlah pengangguran dan keinginan migrasi penduduk ke daerah lain, serta menjadi daya tarik bagi penduduk lain untuk migrasi ke daerah tersebut.

Bab 10

Mobilitas Penduduk

10.1 Pendahuluan

Mobilitas penduduk merupakan suatu gerakan penduduk dari posisi yang satu ke posisi lainnya. Gerakan ini dapat secara horizontal maupun vertikal. Gerakan penduduk secara vertikal yaitu gerakan perubahan status penduduk dari satu status ke status lain seperti dari cara hidup tradisional menuju cara hidup yang lebih modern, perubahan status bekerja yang semula pegawai swasta berpindah kepada pegawai negeri sipil. Sedangkan gerakan penduduk secara horizontal merupakan gerak posisi ruang ke ruang atau wilayah lainnya. Gerakan horizontal ini disebut juga sebagai gerak penduduk geografis (Hardati, 2018). Gejala mobilitas penduduk merupakan gejala yang alamiah sebagai bentuk respons penduduk terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi. Gejala tersebut dapat berupa desakan ekonomi, kebutuhan akan pendidikan, keamanan, bencana alam, keadaan politik dan alasan sosial lainnya.

Dari berbagai sumber, istilah mobilitas sering dipertukarkan dengan istilah migrasi. Namun pada dasarnya istilah mobilitas lebih mengacu kepada perpindahan penduduk yang lebih bersifat umum, sedangkan migrasi lebih mengacu kepada jangka waktu yang lebih lama atau permanen dari pada pengertian mobilitas secara umum. Untuk itu migrasi dapat dikatakan sebagai bagian dari mobilitas penduduk (Subri, 2003). Migrasi dapat diartikan sebagai aktivitas perpindahan penduduk dari suatu tempat lain dengan tujuan menetap

baik melewati batas politik ataupun batas administrasi dan batas bagian dalam pada suatu negara. Migrasi bersama dengan komponen kelahiran dan kematian akan memengaruhi dinamika kependudukan di suatu wilayah yang merupakan komponen dasar demografi. Dalam hal ini, migrasi dapat diartikan perpindahan yang relatif permanen. Sedangkan orang yang bermigrasi disebut sebagai migran (Suwito, 2020). Aktivitas migrasi sifatnya dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Apabila terjadi migrasi masuk maka akan menambah penduduk, sedangkan apabila migrasi keluar akan mengurangi penduduk (Hardati, 2018). Untuk itu aktivitas mobilitas penduduk tidak hanya akan memengaruhi jumlah penduduk namun pada akhirnya berdampak pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Mobilitas penduduk secara umum dipandang sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan penduduk di suatu daerah. Mobilitas terjadi akibat perbedaan tingkat antara daerah asal dengan daerah tujuan. Penduduk melakukan mobilitas dikarenakan pendapatan yang diperoleh di daerah tujuan lebih tinggi daripada pendapatan di daerah asal. Tekanan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan di daerah asal akan menjadi pendorong terjadinya mobilitas penduduk. Untuk itu faktor ekonomi cenderung memiliki peranan penting dalam mobilitas. Sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi memegang peranan yang sangat penting dikarenakan kelancaran sarana dan prasarana komunikasi/ transportasi semakin memperkuat alasan seseorang untuk melakukan mobilitas (Giyarsih, 1999). Jika sarana prasarana komunikasi dan transportasi semakin lancar dapat diartikan pembangunan mulai tercipta secara merata, untuk itu mobilitas penduduk akan semakin berkurang

Terdapat tiga sumber data untuk mengetahui jumlah mobilitas penduduk, di antaranya:

1. Sensus Penduduk

Pada sensus penduduk terdapat empat pertanyaan penting yang membedakan seseorang berstatus migran atau tidak yaitu di mana provinsi tempat tinggal, lamanya tinggal di provinsi tujuan, provinsi tempat tinggal terakhir sebelum tinggal di provinsi tujuan dan provinsi tempat tinggal pada 5 tahun yang lalu.

2. Registrasi Penduduk

Registrasi penduduk bertujuan dalam mencatat penduduk yang masuk ke suatu wilayah maupun yang meninggalkan suatu wilayah lain baik secara permanen atau non permanen. Registrasi ini

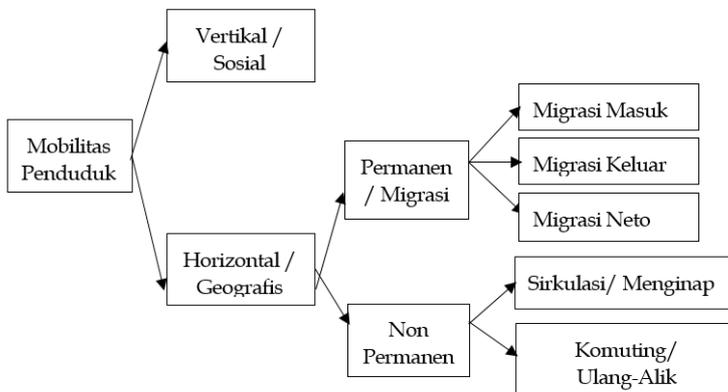
dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri. Sedangkan di tingkat desa dilakukan oleh Kantor Kelurahan/ Desa.

3. Penelitian Penduduk

Penelitian mobilitas dilaksanakan oleh instansi atau lembaga tertentu seperti mobilitas Tenaga Kerja Indonesia (Arini, 2001).

10.2 Bentuk Mobilitas Penduduk

Terdapat dua dimensi penting dalam menelaah mobilitas yaitu dimensi ruang atau daerah (spasial) yang diartikan sebagai perpindahan antar daerah, wilayah maupun negara. Dimensi waktu yang dikatakan seseorang adalah migran jika dia tinggal di tempat yang baru atau berniat tinggal di tempat yang baru paling sedikit 6 bulan lamanya. Pada umumnya mobilitas penduduk secara horizontal digolongkan menjadi dua yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk mobilitas penduduk dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 10.1: Skema Jenis-Jenis Mobilitas Penduduk (Mantra, 2003) dan (Hardati, 2018)

Mobilitas permanen dapat diartikan mobilitas dengan tujuan untuk menetap atau disebut dengan migrasi. Sedangkan mobilitas non permanen merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tidak menetap yang disebut pula dengan istilah mobilitas sirkuler (Mantra, 2003). Mobilitas penduduk permanen terdiri dari tiga, yaitu migrasi masuk, migrasi

keluar dan migrasi neto. Dua bentuk mobilitas penduduk tersebut apabila melintas antar batas negara disebut dengan mobilitas internasional (emigrasi, imigrasi dan remigrasi). Sedangkan apabila di dalam suatu negara maka disebut dengan mobilitas nasional (migrasi seumur hidup, risen, total) dan (migrasi masuk, keluar dan kembali). Salah satu bentuk mobilitas penduduk antar pulau di Indonesia disebut dengan transmigrasi (Hardati, 2018)

Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Sirkulasi/ Menginap: diartikan sebagai pergerakan penduduk yang meninggalkan daerah asal menuju ke daerah tujuan dengan batas waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari enam bulan.
2. Komuting/ Ulang Alik: diartikan sebagai pergerakan penduduk melewati wilayah tertentu dan kembali pada hari yang sama

Batasan wilayah secara administratif merupakan batas yang sering digunakan dalam menentukan seseorang melakukan mobilitas penduduk. Para ahli demografi, geografi dan kependudukan belum memberikan batas wilayah dan waktu yang digunakan untuk menentukan jenis mobilitas seseorang secara pasti (Hardati, 2018). Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas wilayah provinsi pada sensus penduduk tahun 1990 dan batas wilayah kabupaten/kota pada sensus penduduk tahun 2010. Batas waktu yang digunakan sama yaitu enam bulan atau lebih. Sedangkan menurut Mantra (2003) menggunakan batas wilayah dukuh dengan waktu kurang dari 24 jam. Sedangkan pada penelitian Hardati (1997, 1999, 2005) menggunakan batas wilayah desa/kelurahan.

10.2.1 Transisi Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi

Dalam pola mobilitas penduduk terdapat hubungan dengan tahapan pembangunan ekonomi, di mana penduduk merupakan bagian dari proses modernisasi.

Adapun transisi mobilitas penduduk dibagi menjadi 5 tahapan, di antaranya:

1. Tahap 1: Mobilitas penduduk masih sangat sedikit, bahkan tidak tampak kecuali dalam bentuk sirkulasi terbatas seperti tradisi kunjungan sosial dan kegiatan keagamaan

2. Tahap 2: Terjadinya mobilitas penduduk ke arah pedalaman yang membuat pemukiman baru, mobilitas desa ke kota mulai terlihat akibat dari berbagai aktivitas sedangkan mobilitas antar kota belum terlihat.
3. Tahap 3: Mobilitas desa ke kota masih dominan, mobilitas sirkuler mulai terlihat. Sedangkan mobilitas penduduk ke arah pedalaman mulai berkurang.
4. Tahap 4: Migrasi desa ke kota terus meningkat bahkan terjadi arus tenaga kerja kasar/ tidak terlatih dari daerah terbelakang, mobilitas sirkuler tenaga kerja terampil dan profesional meningkat.
5. Tahap 5: Mobilitas akan turun dikarenakan sarana komunikasi semakin modern dan mobilitas sirkulasi meningkat akibat kemajuan dibidang telekomunikasi dan informasi (Zelinsky, 1971) dalam (Marhaeni, 2018).

Teori transisi mobilitas penduduk ini didasarkan atas pengalaman historis yang terjadi di berbagai Negara. Teori ini pada awalnya dimaksudkan untuk menyusun alasan umum dan pegangan dalam mengetahui proses penurunan fertilitas dan mortalitas yang akhirnya dimasukkan ke dalam rumus dalam menghitung pencapaian transisi demografi oleh setiap Negara (Marhaeni, 2018). Namun pada dasarnya mobilitas penduduk menjadi salah satu upaya dalam pembangunan ekonomi. Mobilitas penduduk dari desa ke kota akan meningkatkan pendapatan masyarakat jika diiringi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Pembangunan di daerah harus tetap diupayakan sehingga terciptanya pembangunan ekonomi secara merata.

10.3 Faktor Mobilitas Penduduk

Pada dasarnya pergerakan penduduk dipengaruhi oleh faktor penarik maupun faktor pendorong. Faktor pendorong adalah faktor yang menyebabkan seseorang berpikir untuk pergi dari daerah asalnya, sedangkan faktor penarik menyebabkan seseorang memiliki keinginan pergi atau berpindah ke daerah tujuan dengan meninggalkan daerah asalnya (Santoso, et al., 2019). Faktor pendorong berasal dari daerah asal memiliki sifat positif dan negatif. Positif

jika migran berkeinginan mencari atau menambah pengalaman di daerah lain, bersifat negatif jika fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup terbatas dan lapangan pekerjaan terbatas. Sedangkan faktor penarik berada di daerah tujuan mobilitas. Faktor penarik dapat bersifat positif seperti memiliki sarana pendidikan dan sarana mencari pekerjaan yang memadai dan lebih lengkap. Faktor penarik yang bersifat negatif adalah adanya lapangan pekerjaan yang lebih bervariasi, kehidupan yang lebih mewah sehingga tersedianya semua kebutuhan (Puspitosari, 2013).

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk di antaranya (Santoso, et al., 2019; Puspitosari, 2013; Santoso, et al., 2019)

1. Faktor Struktural

Faktor struktural merupakan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya

2. Faktor Individu

Faktor individu yaitu kualitas seseorang yang ditinjau baik dari segi tingkat pendidikan, penampilan maupun keterampilan pribadi.

3. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi yang serba kekurangan akan mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas misalnya kekurangan sumber daya alam di daerah tempat berasal.

4. Situasi Politik

Situasi politik menyebabkan keadaan negara yang tidak menentu akan memengaruhi keamanan dan kenyamanan penduduk untuk tinggal di daerah tersebut yang menyebabkan penduduk akan mencari daerah yang lebih aman untuk ditinggali. Selain itu, keadaan sistem politik yang tidak sesuai dengan hati nurani, juga akan memengaruhi terjadinya mobilitas penduduk.

5. Kependudukan

Pertambahan penduduk akan menyebabkan sempitnya pemukiman dan akan terjadinya kemiskinan yang semakin merajalela. Faktor kependudukan ini biasanya menyebabkan mobilitas dalam arti geografik.

6. Keinginan Melihat Daerah Lain

Keinginan ini akan mendorong terjadinya mobilitas geografik dari satu tempat ke tempat lain, misalnya berekreasi ke daerah wisata yang belum pernah dikunjungi.

10.3.1 Faktor penarik

Perbedaan antar daerah dengan daerah tujuan baik dari segi ekonomi, kesempatan kerja akan menyebabkan adanya mobilitas penduduk dari desa ke kota (Tanzil, 2020). Keinginan berpindah bertujuan dalam mencari penghidupan yang lebih baik. Semakin tinggi perbedaan tersebut maka akan semakin banyak penduduk yang melaksanakan mobilitas.

Menurut Munir (2003) faktor yang menjadi penarik penduduk dalam melakukan mobilitas di antaranya:

1. Adanya kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang lebih sesuai
2. Adanya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik
3. Adanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik
4. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan pada daerah tujuan
5. Adanya tarikan dari orang-orang yang diharapkan sebagai pelindung.

10.3.2 Faktor Pendorong

Selain faktor penarik terdapat faktor pendorong penduduk dalam melakukan mobilitas. Adapun faktor pendorong penduduk melakukan mobilitas menurut Munir (2003) di antaranya:

1. Semakin berkurangnya sumber daya alam, menurunnya permintaan barang-barang tertentu yang bahan bakunya sulit untuk diperoleh di daerah asal
2. Berkurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan
3. Terdapat tekanan-tekanan politik maupun diskriminasi politik, agama dan suku di daerah asal
4. Adanya ketidakcocokan dengan budaya, adat dan kepercayaan di daerah asal

5. Alasan pekerjaan ataupun perkawinan yang mengharuskan untuk berpindah
6. Terjadinya bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi dan lainnya.

Selain itu, menurut Khoerudin (1992), faktor pendorong yang menyebabkan mobilitas penduduk di antaranya menyempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal tempat tinggal, upah sektor pertanian di desa rendah sehingga menyebabkan penduduk desa bermobilitas dengan harapan mendapatkan upah yang lebih tinggi, hasil produk pertanian tidak mencukupi kebutuhan hidup serta adanya faktor transportasi yang tidak lancar di daerah asal. Hal ini berkaitan dengan adanya faktor pendorong dari daerah asal yang menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk melakukan mobilitas.

10.4 Pola Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk dapat dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dengan berbagai rumus sesuai dengan jenis mobilitas penduduknya. Hasil dari analisis mobilitas penduduk di setiap daerah tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan mobilitas pada daerah lain. Hal ini dikarenakan lingkup kajian dan batasan waktu yang digunakan saat menganalisis bervariasi dan sangat bergantung pada peneliti.

10.4.1 Pola Mobilitas Penduduk Global

Mobilitas penduduk global merupakan gerakan penduduk antar negara di benua yang ada di dunia (Hardati, 2018). Jumlah penduduk di setiap benua dan negaranya berbeda-beda, ada yang memiliki jumlah penduduk yang padat maupun sebaliknya. Fakta geografis ini menjadi salah satu dari berbagai variabel geografis yang mendorong terjadinya mobilitas penduduk secara global. Keberagaman wilayah ini sangat tergantung dari kondisi alam fisik dan manusianya.

Mobilitas penduduk melewati batas negara administrasi dan bertujuan menetap dikenal sebagai migrasi internasional. Migrasi internasional dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk antar wilayah negara. Semakin berkembangnya

kehidupan, akses menuju negara lain menjadi lebih mudah sehingga mobilitas penduduk ke luar negara sendiri semakin meningkat. Tujuannya dapat bervariasi mulai dari tujuan ekonomi, sosial, politik maupun pariwisata.

10.4.2 Pola Mobilitas Penduduk Nasional

Mobilitas penduduk nasional merupakan pergerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam lingkup satu negara dengan tujuan menetap di daerah tujuan yang dikenal dengan istilah mobilitas penduduk internal atau migrasi nasional (Hardati, 2018). Gambaran mobilitas penduduk di Indonesia sendiri dapat diamati melalui hasil sensus penduduk. Batas waktu yang digunakan pada setiap sensus penduduk selalu sama yaitu 6 bulan. Pola mobilitas penduduk lokal dapat diamati melalui pengamatan langsung secara terbatas melalui penelitian. Keterbatasan dapat bersifat keluasaan wilayah dan kedalaman kajian serta juga sangat bergantung pada biaya tenaga dan waktu dilaksanakannya penelitian.

10.5 Kasus Mobilitas Penduduk

Arini (2001) melakukan penelitian mengenai Dampak Sosial Ekonomi Dinamika Mobilitas Penduduk Provinsi Bali (Sebelum dan Semasa Krisis Moneter. Penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya mobilitas penduduk ke Bali dikarenakan pesatnya pembangunan sektor pariwisata dan sektor lainnya sehingga provinsi Bali membutuhkan lebih banyak tenaga kerja.

Mobilitas penduduk menuju Provinsi Bali semakin meningkat dikarenakan beberapa hal di antaranya:

1. Meningkatnya pembangunan industri pariwisata yang memacu pertumbuhan sektor ekonomi seperti industri garmen, perhotelan, biro perjalanan dan lainnya. Banyaknya migran yang keluar dari provinsi Bali datang ke Bali sebagai karyawan, pengusaha bahkan sebagai buruh terutama buruh kasar.
2. Kondisi keamanan di provinsi Bali sangat kondusif walaupun di kota besar di Indonesia sering terjadi kerusuhan akibat dilanda krisis moneter.

3. Kedatangan imigran ke Bali tidak banyak menimbulkan gejolak di bidang ekonomi dikarenakan usaha-usaha ekonomis yang sangat strategis telah dikuasai oleh pengusaha pribumi lokal
4. Arus migran semakin meningkat dan keheterogenan etnik di Bali makin besar. Toleransi agama penduduk Bali sangat tinggi sehingga tidak menimbulkan konflik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi & Iwan Rudiarto (2013) mengenai Karakteristik Migrasi dan Dampaknya terhadap Pengembangan Pedesaan Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. Penelitian menunjukkan hasil petani melakukan migrasi dikarenakan dua alasan utama di antaranya petani tidak memiliki peluang dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya pedesaan yang ada di Kecamatan Kedungjati, sedangkan alasan lainnya adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Kelompok ini pada umumnya memiliki lahan pertanian namun berusaha mendapatkan penghidupan ekonomi yang lebih baik. Dalam memilih wilayah tujuan, migran perempuan umumnya akan memilih pekerjaan industri padat karya yang tidak begitu jauh dari rumah, sedangkan migran laki-laki memilih pekerjaan di bidang buruh bangunan. Sedangkan jika dikategorikan sebanyak 87% migran merupakan migrasi sirkuler yang diartikan tidak permanen sedangkan selebihnya dikategorikan pada migrasi permanen.

Selanjutnya penelitian Santoso, et al., (2019) mengenai Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Mobilitas Penduduk di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong terjadinya mobilitas penduduk sebanyak 60% kurangnya lapangan pekerjaan dan sarana prasarana pendidikan seperti SMP dan lainnya. Sedangkan faktor penarik dari daerah lain dikarenakan mayoritas penduduk pada kriteria sangat tinggi sebesar 97% adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan sarana prasarana yang lebih lengkap dibandingkan dengan daerah asal migran.

Berdasarkan beberapa kasus mobilitas penduduk di atas disimpulkan bahwa terdapat faktor penarik maupun pendorong terjadinya mobilitas penduduk. Pada dasarnya masyarakat melakukan mobilitas dengan tujuan mencari penghidupan yang lebih baik, mulai dari rasa aman, kemudahan hingga peningkatan ekonomi. Berkaitan dengan pandemik Covid-19 yang menyerang secara global, (Firdaus & Wijayanto, 2020) melakukan penelitian mengenai

Tinjauan Big Data Mobilitas Penduduk Pada Masa Social Distancing dan New Normal Serta Keterkaitannya dengan Jumlah Kasus Covid-19, menggambarkan bahwa penerapan *social distancing* dan PSBB terbukti dapat menurunkan mobilitas penduduk dan menekan penambahan kasus Covid-19 di Jakarta. Selanjutnya (Nugroho & Kasuma, 2020) meneliti mengenai Analisis Perubahan Mobilitas Terhadap Proses Remediasi Dampak Covid-19 di Indonesia Menggunakan

Data Google Mobility menunjukkan bahwa terdapat perubahan mobilitas selama diterapkannya kebijakan terkait pemutusan rantai penyebarluasan kasus Covid-19 pada semua lokasi kegiatan masyarakat yang berisiko. Dengan diterapkannya kebijakan PSBB menyebabkan ruang gerak masyarakat menjadi terbatas sehingga perubahan mobilitas menjadi menurun. Namun setelah diterapkannya kebijakan New Normal mengakibatkan kenaikan mobilitas masyarakat.

Bab 11

Masalah Kependudukan di Indonesia

11.1 Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatatkan bahwa jumlah penduduk dunia pada tahun 2020 adalah sejumlah 7,7 miliar orang. Jumlah penduduk ini diperkirakan akan terus mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2050 diperkirakan jumlah penduduk dunia secara total mencapai 9,7 miliar orang. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2020 tersebut tersebar ke seluruh penjuru dunia, salah satunya adalah negara Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 dihasilkan pada sensus penduduk. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta orang. Selama periode tahun 2010 sampai dengan 2020 rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah sebesar 1,25 persen per tahun (BPS, 2020).

Jumlah penduduk yang mencapai 270,20 juta orang dengan laju pertumbuhan per tahun mencapai 1,25 persen tersebar ke seluruh Pulau yang ada di Indonesia. Namun pola persebaran tersebut tidak merata dengan konsentrasi terbesar terdapat di pulau Jawa dengan persentase kurang lebih 56,10 persen. Kemudian terbanyak kedua terdapat di Pulau Sumatera dengan konsentrasi

21,68 persen. Kemudian diikuti oleh Pulau Sulawesi, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara dan terakhir Maluku dan Papua dengan total konsentrasi total mencapai 22,22 persen.

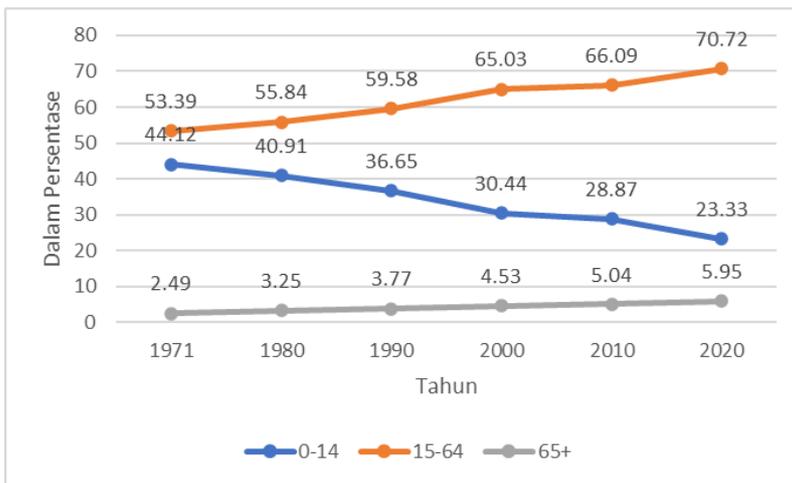
Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebesar 270,2 orang dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,25 persen. Jumlah penduduk Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar Nomor 4 setelah Negara Cina, India, dan Amerika Serikat (UN, 2019). Distribusi konsentrasi penduduk Indonesia yang masih berpusat kepada Pulau Jawa maka membawa dampak terhadap masalah yang dihadapi terkait kependudukan Indonesia.

Pertumbuhan penduduk yang masif di Indonesia memiliki beberapa dampak negatif. Berdasarkan hasil penelitian empiris sebelumnya ditemukan tujuh konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk, di antaranya adalah potensi konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi yang menurun, terjadinya kemiskinan dan ketimpangan, pendidikan, ancaman kesehatan, pangan, kerusakan lingkungan dan migrasi internasional (Todaro and Stephen, 2015). Pada bagian atau bab ini akan diuraikan terkait masalah kependudukan yang dihadapi oleh Indonesia dampak dari pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak terkait beberapa aspek yang akan dilihat, namun fokus bab atau bagian buku ini lebih menekankan kepada dampak negatif kependudukan terkait permasalahan ekonomi yang ditimbulkan. Hasil akhirnya diharapkan bagian atau bab ini dapat memberi masukan kepada pihak terkait khususnya dalam pengambilan kebijakan terkait masalah kependudukan yang dihadapi oleh Indonesia.

11.2 Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kependudukan di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri ledakan penduduk yang terjadi di Indonesia dapat menjadi pisau bermata dua. Jumlah penduduk yang besar khususnya penduduk di usia produktif dengan *range* umur 15 sampai dengan 64 tahun sedang mengalami tren yang sangat meningkat. Gambar 11.1 menunjukkan tren peningkatan komposisi umur penduduk di Indonesia periode tahun 1971 sampai dengan tahun 2020. Data BPS menunjukkan bahwa komposisi umur antara 15 sampai dengan 64 tahun pada tahun 1971 sebesar 53,39 persen,

namun komposisi usia produktif ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 komposisi tersebut menjadi sebesar 70,72. Peningkatan komposisi penduduk usia produktif ini dapat memberikan dampak dua, pertama jika diberi modal pendidikan dan kesehatan yang baik maka dapat menjadi aset utama bangsa bagi pertumbuhan ekonomi. Namun jika komposisi usia produktif yang besar ini tidak memiliki SDM yang baik maka justru dalam menjadi masalah tersendiri bagi bangsa khususnya terkait kependudukan.

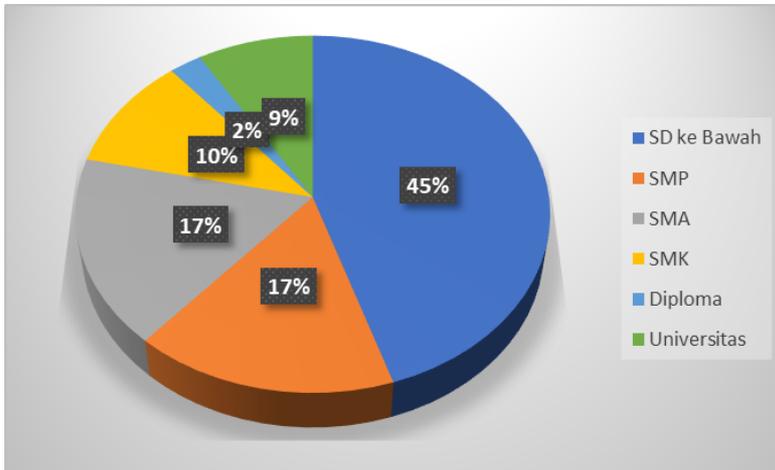


Gambar 11.1: Komposisi Penduduk Indonesia berdasarkan usia (BPS, 2020)

11.2.1 Peningkatan Jumlah Penduduk dan Tingkat Kualitas SDM

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa komposisi penduduk usia produktif yaitu antara usia 15 sampai dengan 64 tahun yang sangat besar dari segi jumlah memiliki permasalahan dalam hal terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Data BPS menunjukkan bahwa hanya sekitar 12,33 persen dari populasi penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tinggi (Diploma ke atas), Masih terdapat 38,89 persen dari total penduduk yang bekerja merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah dan 18,27 persen dari total penduduk yang bekerja merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) (lihat Gambar 11.2).

Berdasarkan paparan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tenaga kerja yang tercermin dari tingkat pendidikan masih menjadi kendala dan permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah.



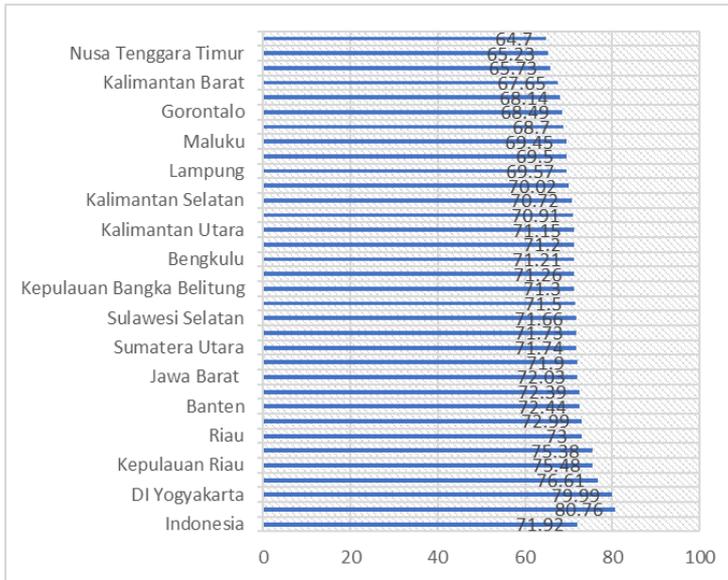
Gambar 11.2: Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan (BPS, 2020)

Laporan yang dikeluarkan oleh The World Bank tahun 2020 khusus mengenai pendidikan di Indonesia, ada beberapa masalah yang masih membelenggu pendidikan di Indonesia. Permasalahan tersebut salah satunya adalah mutu atau kualitas pendidikan yang masih rendah sehingga belum memenuhi target kualitas pendidikan. Masalah berikutnya yang juga menjadi masalah vital bagi perkembangan pendidikan di Indonesia adalah masih terjadinya ketimpangan pembelajaran dan pendidikan antar wilayah, antar sekolah atau sesama sekolah.

Hal ini terjadi khususnya terjadi ketimpangan antara provinsi yang dekat dengan pusat pemerintah memiliki nilai pendidikan yang bagus, sedangkan provinsi yang berada jauh dari pusat pemerintahan di Indonesia bagian Timur masih mengalami nilai pendidikan yang masih rendah. Kombinasi berbagai masalah pendidikan di Indonesia berujung kepada kualitas sumber daya manusia yang masih rendah (World Bank, 2020).

Namun catatan penting terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia salah satu indikator dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Provinsi di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan

secara agregat nasional dengan menggunakan perhitungan IPM metode baru terdapat tren peningkatan IPM dari periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2010 IPM Indonesia secara rata-rata sebesar 66,53, namun terus mengalami tren peningkatan hingga pada tahun 2019 IPM nasional secara agregat mencapai 71,92 (Lihat Gambar 11.3). Namun walaupun secara rata-rata agregat nasional IPM pada tahun 2019 mencapai 71,92 terdapat masih banyak Provinsi dengan IPM yang berada di bawah rata-rata IPM Nasional khusus Provinsi yang berada di kawasan Indonesia bagian timur. Sebagai contoh Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan lain sebagainya.



Gambar 11.3: Indeks Pembangunan Manusia Per Provinsi Tahun 2019 (BPS, 2020)

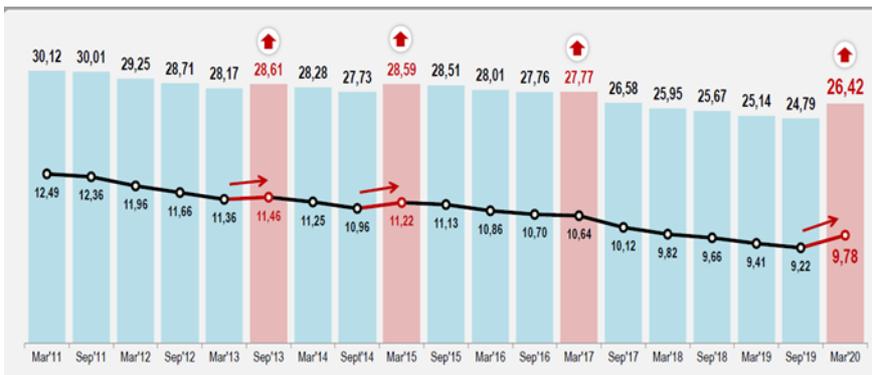
11.2.2 Kemiskinan

Masalah kependudukan yang masih menghadang di Indonesia adalah kemiskinan dan ketimpangan. Penelitian yang dilakukan oleh Wilde et al., (2014) mengenai peningkatan jumlah populasi terhadap kemiskinan menemukan bahwa peningkatan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. Lebih lanjut peningkatan populasi atau jumlah penduduk berdampak terhadap peningkatan kemiskinan

tersebut terjadi khususnya terhadap negara-negara berkembang dan negara yang memiliki tingkat pendapatan yang berpendapatan rendah hingga menengah (Carr-Hill, 2017). Penelitian empiris berikutnya menemukan hal yang sama bahwa peningkatan jumlah penduduk berdampak terhadap penurunan pendapatan per kapita sebuah negara. Penurunan pendapatan per kapita berarti menurunkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak terhadap semakin meningkatnya tingkat kemiskinan di suatu negara (Sinding, 2009). Indonesia sebagai salah satu negara yang masih berkembang dan masih memiliki tingkat pendapatan nasional berada di tingkat menengah juga tidak luput dari problematik terkait kemiskinan dan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia.

Data BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjumlah 270, 2 juta orang maka jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 terdapat sebesar 26,42 juta orang. Persentase penduduk yang termasuk kategori miskin di Indonesia mengalami proporsi meningkatkan sebesar 0,56 persen poin terhadap September 2019 menjadi sebesar 9,78 persen pada Maret 2020 (Lihat Gambar 11.4). Hal ini salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia (BPS, 2020).

Namun terlepas dari hal tersebut, berbagai penelitian empiris ditambah dengan data yang ada menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang masih sangat masif sangat berdampak terhadap peningkatan kemiskinan. Hal ini yang masih menjadi problematik kependudukan yang terjadi di Indonesia.



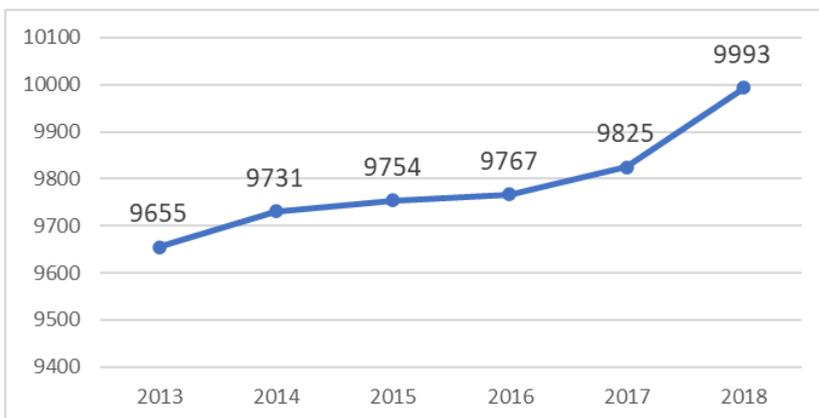
Gambar 11.4: Perkembangan Jumlah Orang Miskin dan Persentase Kemiskinan di Indonesia Periode Maret 2011 – Maret 2020 (BPS, 2020)

Pada saat yang bersamaan peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali berdampak terhadap semakin meningkatnya ketimpangan yang terjadi antar wilayah, antar provinsi di Indonesia.

11.2.3 Kesehatan

Peningkatan jumlah penduduk yang di suatu negara berdampak terhadap semakin meningkatnya permasalahan kesehatan yang harus dihadapi dan dipersiapkan oleh negara tersebut. Risiko semakin meningkat masalah dalam kesehatan akan semakin meningkat jika disertai dengan semakin meningkatnya penduduk yang semakin menua dengan dependen populasi yang semakin meningkat di negara tersebut (Lamnisos et al., 2021). Permasalahan kesehatan juga semakin meningkat jika fasilitas kesehatan yang dimiliki negara tersebut memiliki jumlah yang terbatas (Sharp et al., 2020). Hal ini juga dirasakan oleh Indonesia,

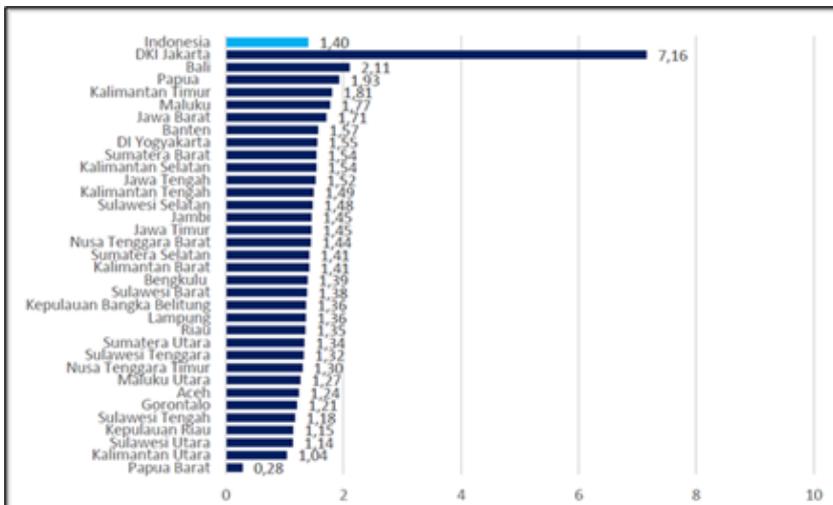
Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan kesehatan seperti fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan kondisi karakteristik geografis wilayah yang dimiliki oleh Indonesia menimbulkan permasalahan utama terkait dengan permasalahan kesehatan di Indonesia. Ketersediaan faktor penawaran dari fasilitas kesehatan dan tenaga dokter dalam mendukung program kesehatan nasional masih belum mencukupi dan belum merata di setiap provinsi di Indonesia (Misnaniarti et al., 2017). Kondisi kesehatan ini tentu sangat mengkhawatirkan khususnya disparitas pelayanan kesehatan yang dialami oleh penduduk di Indonesia.



Gambar 11.5: Jumlah Puskesmas di Indonesia Periode Tahun 2013-2018

Gambar 11.5 menunjukkan bahwa data jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas kesehatan pertama yang menyebar di hampir seluruh Indonesia memang mengalami jumlah peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah Puskesmas berjumlah 9.655 meningkat pada tahun 2018 menjadi 9.993. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah distribusi Puskesmas yang masih belum merata di seluruh Indonesia. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kesehatan sebagai pusat kesehatan pelayanan primer meningkat namun pemenuhan rasio Puskesmas terhadap kesehatan masih terjadi ketimpangan di Provinsi di Indonesia.

Data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada Gambar 11.6 di bawah. Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan Provinsi dengan rasio Puskesmas per kecamatan di Indonesia yang paling tinggi yaitu 7,16, angka ini menunjukkan bahwa dalam 1 kecamatan terdapat lebih dari 7 Puskesmas yang ada. Pada saat yang bersamaan, Provinsi Papua Barat memiliki angka rasio Puskesmas per kecamatan hanya 0,28, angka ini berarti bahwa dalam 1 kecamatan terdapat kurang dari 1 Puskesmas.



Gambar 11.6: Rasio Puskesmas per Kecamatan di Indonesia tahun 2019 (Kementerian Kesehatan, 2019)

Padahal secara nasional angka tersebut haruslah berada di atas 1. Selain ketersediaan minimal 1 Puskesmas di setiap kecamatan yang ada di seluruh Provinsi di Indonesia, maka aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang timbul di Provinsi.

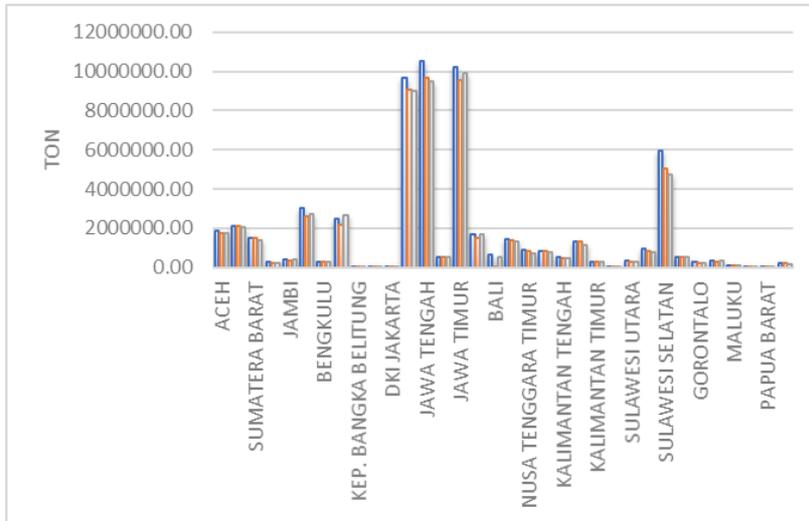
Faktor tersebut di antaranya adalah kondisi karakteristik geografis yang berbeda setiap Provinsi, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, dan terakhir kondisi sosial ekonomi dan kemajuan provinsi tersebut. Provinsi Papua Barat menjadi salah satu contoh di mana aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan masih sangat rendah.

11.2.4 Pangan

Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa terdapat 800 juta penduduk dunia mengalami kelaparan. Hal ini dapat terjadi karena ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran bahan makanan yang ada di seluruh dunia. Banyak negara ditemukan bahwa keamanan pangan atau *food security* menjadi ancaman serius. Tambahlah faktor perubahan cuaca, kemiskinan, konflik sosial mendorong terjadinya ancaman bagi *food security* yang dialami oleh suatu negara (Cheeseman, 2016).

Ketersediaan pangan akan menjadi permasalahan serius akibat dampak pertumbuhan jumlah penduduk tanpa terkendali dan penurunan produksi bahan pangan khususnya yang berasal dari hasil pertanian (Reisch et al., 2013). Permasalahan terhadap keamanan pangan juga dapat terjadi di negara kita Indonesia jika sistem ketahanan pangan tidak dipersiapkan dengan baik dan benar. Produksi bahan pangan khususnya tanaman padi yang merupakan bahan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia dapat dilihat di Gambar 11.7. Data produksi padi di hampir seluruh Provinsi di Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 secara agregat mengalami tren penurunan.

Hal ini dapat terlihat dari total produksi padi tahun 2018 sebesar 59,2 juta ton padi mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 54,6 juta ton padi. Provinsi Papua mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar -25,6 % pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2018. Tren penurunan produksi pangan khususnya padi yang menjadi bahan kebutuhan pokok masyarakat harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Penurunan produksi dapat berdampak terhadap kondisi penawaran padi di pasar dapat menjadi kurang dan dapat mengganggu keamanan pangan di Indonesia, hal ini dikarenakan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang rata-rata 1,25% per tahun membutuhkan tambahan produksi pangan.



Gambar 11.7: Produksi Padi Menurut Provinsi Tahun 2018 – 2020 di Indonesia (BPS, 2020).

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 270,20 juta orang, dengan laju pertumbuhan per tahun adalah sebesar 1,25 %. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahun tentu membawa dampak atau permasalahan tersendiri bagi kependudukan. Permasalahan kependudukan yang dirasakan oleh Indonesia menurut penelitian empiris terdapat beberapa dampak akibat peningkatan jumlah penduduk tersebut. Permasalahan kependudukan tersebut di antaranya adalah permasalahan sosial dan ekonomi kependudukan di Indonesia. Permasalahan sosial dan ekonomi tersebut seperti yang telah diuraikan antara lain adalah tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kemiskinan, kesehatan dan pangan.

Pemerintah bersama *stakeholder* terkait harus dapat mengeluarkan kebijakan dan program terkait kendala dan permasalahan kependudukan yang dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan kualitas SDM, kemiskinan, kesehatan dan pangan harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif. Harus dapat dilakukan penanganan yang terintegrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Hasil akhirnya diharapkan dapat mencegah timbulkan permasalahan kependudukan terkait dengan hal yang diuraikan diatas.

Bab 12

Kaitan Demografi Dengan Pembangunan Ekonomi

12.1 Pendahuluan

Tantangan untuk mengestimasi peran struktur dan dinamika demografi terhadap perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan pembangunan di paruh kedua abad ke-20 yaitu perbedaan pola demografis. Kawasan Eropa timur misalnya, terlihat pola kesuburan sumber daya alam, secara historis sangat berbeda dengan Eropa barat. Varian penduduk dalam struktur usia selama dekade terakhir akan membantu mengidentifikasi peran demografi untuk pertumbuhan ekonomi (Barro,1997).

Menurut model pertumbuhan neoklasik (Solow, 1956) pertumbuhan populasi berkurang serta pertumbuhan ekonomi karena struktur modal. Berbagai penelitian menggunakan data lintas negara menemukan pengaruh yang tidak signifikan dari pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 1960-an sampai dengan tahun 1970-an. Penelitian (Barro, 1991,1997) memperkenalkan variabel demografis antara lain pertumbuhan, populasi kematian, ukuran usia dan kepadatan populasi. Menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam

waktu bersamaan serta tingkat pertumbuhan total populasi sebagai satu-satunya variabel demografis. Namun, bahwa demografi penting untuk pertumbuhan ekonomi, setelah seseorang mempertimbangkan perubahan dalam struktur usia, dianggap signifikan.

Landasan teoritis model ini dapat ditemukan dalam beberapa hal antara lain, a) siklus hidup model tabungan dan investasi dan (b) variasi usia tertentu dalam produktivitas tenaga kerja. Lebih secara khusus, penulis mengemukakan tentang bagaimana menurunkan tingkat pertumbuhan PDB per kapita pada tingkat usia kerja pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan total penduduk dan berbagai variabel lainnya. Hasil penelitian (Barro, 1991) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB per kapita karena usia kerja pertumbuhan penduduk atau sebaliknya negatif dan signifikan terhadap efek dari tingkat pertumbuhan total populasi. Seperti yang dikemukakan dalam (Kelley dan Schmidt, 2005) "Apa yang berubah dengan evolusi pemodelan pada 1990-an adalah lebih jelas saluran interpretasi dan ukuran perubahan demografis pada perekonomian".

Sejak Perang Dunia II, negara-negara berkembang mengalami transisi demografi dengan kecepatan dan waktu yang berbeda-beda (Lee, 2003). Selama standar transisi demografis masih berlaku maka pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada usia kerja pertumbuhan penduduk.

Untuk negara berkembang pada tahun 1960, jumlah penduduk Indonesia hanya 87.792.515 jiwa. Pada 2017, jumlahnya meningkat 193% menjadi 263.991.379 orang. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, seharusnya Indonesia memiliki potensi besar dalam menyediakan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Namun perkembangan perekonomian Indonesia yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan kondisi yang tidak linier dengan kondisi jumlah penduduk Indonesia. Kondisi ini terlihat dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2000-2018 dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN yang jumlah penduduknya lebih sedikit dari Indonesia.

Peran penduduk dalam pembangunan ekonomi dapat dijelaskan dalam tiga pandangan yang berbeda (Bloom dan Canning, 2001; Bloom dan Williamson, 1997). Ada pendapat yang pesimis, optimis, dan netral. Orang pesimis berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk akan menghambat pembangunan ekonomi. Pendapat ini didasarkan pada teori pertumbuhan penduduk dari Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus menjelaskan akan ada

kondisi di mana jumlah barang konsumsi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Pandangan kedua optimis, yang berpendapat bahwa penduduk merupakan sumber pertumbuhan ekonomi. Pendapat tersebut didasarkan pada konsep *human capital* yang menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapat terakhir merupakan pendapat netral berdasarkan beberapa hasil penelitian empiris di berbagai negara yang menunjukkan bahwa negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Artinya laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif, namun korelasi negatif ini tidak signifikan.

Penelitian sebelumnya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh aspek kependudukan. Variabel penduduk yang digunakan secara umum diwakili oleh indikator demografi, seperti laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, tingkat kesuburan, dan angkatan kerja. Namun indikator tersebut tidak menggambarkan hubungan antara satu indikator demografi dengan indikator demografi lainnya. Indikator demografi yang dapat merepresentasikan indikator demografi lainnya adalah indikator rasio ketergantungan.

Rosado et. al (2017) menjelaskan bahwa rasio ketergantungan merupakan indikator demografi yang ditentukan oleh aspek demografi lainnya. Rasio ketergantungan ditentukan oleh tingkat kesuburan, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, penduduk usia kerja, dan usia harapan hidup. Dengan kata lain, rasio ketergantungan menggambarkan kondisi dinamika kependudukan secara lebih komprehensif dibandingkan dengan indikator demografi lainnya.

12.2 Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN

Dalam perkembangan teori pertumbuhan ekonomi, kependudukan selalu dijadikan salah satu aspek yang menentukan pertumbuhan ekonomi di samping ketersediaan sumber daya alam, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Dalam model pertumbuhan (Solow, 1956) dijelaskan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian dan memengaruhi total output barang dan jasa suatu negara (Mankiw, 2016). Selanjutnya dalam teori pertumbuhan endogen dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi merupakan salah satu fungsi dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia merepresentasikan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang lebih baik akan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut teori pertumbuhan endogen, tenaga kerja digunakan sebagai variabel yang menentukan pertumbuhan ekonomi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sama seperti teori pertumbuhan endogen, disebutkan juga bahwa selain modal dan teknologi dalam teori pertumbuhan baru, tenaga kerja baik dari segi kuantitas maupun kualitas memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Mankiw, 2016).

Populasi merupakan salah satu faktor di sisi penawaran yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Boldeanu dan Constantinescu, 2015). Beberapa penelitian yang menggunakan laju pertumbuhan penduduk sebagai faktor yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di beberapa negara menunjukkan adanya hubungan yang positif antara laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan ekonomi (Guga, Alikaj, dan Zeneli, 2015; Klasen dan Lawson, 2007; Peterson, 2017; Zhuang dan Juliana, 2010). Indikator populasi lain yang digunakan sebagai variabel yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah indikator angkatan kerja. Penelitian sebelumnya di Sri Lanka menunjukkan bahwa angkatan kerja memiliki pengaruh paling besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Sri Lanka, selain variabel lain seperti utang luar negeri dan derajat keterbukaan ekonomi (Paudel, Perera, dan Paude, 2009).

Sejalan dengan penelitian di Sri Lanka, penelitian lain di Pakistan menunjukkan bahwa angkatan kerja dan perdagangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Pakistan, sedangkan pinjaman luar negeri tidak berkorelasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara ini (Hasan dan Butt, 2008). Penelitian lain menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di negara-negara Eropa meningkatkan efisiensi agregat ekonomi dan berpotensi meningkatkan pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut (Ozerkek, 2013).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kondisi rasio ketergantungan suatu negara ditentukan oleh aspek demografi lainnya, termasuk angka fertilitas dan mortalitas. Kedua aspek ini akan menentukan laju pertumbuhan penduduk alami suatu negara. Selama kurun waktu 1961 hingga 2017, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 1961, laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 2,6% dan turun menjadi 1,1% pada tahun 2017 (Bank Dunia, 2019). Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh penurunan angka kelahiran (angka fertilitas total). Pada tahun 1960, Total Fertility Rate (TFR) Indonesia adalah 5,6%. Artinya, pada tahun 1961 rata-rata terdapat 6 anak yang lahir untuk setiap perempuan di Indonesia. Pada tahun 2016 TFR di Indonesia turun menjadi 2,3. Artinya pada tahun 2016, rata-rata wanita Indonesia melahirkan 2 orang anak.

12.2.1 Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja di negara-negara berkembang seperti kawasan ASEAN relatif sangat rendah. Prinsip produktivitas marginal yang menurun (Di-minishing Marginal Produktivitas/DMP) yakni sekiranya terjadi peningkatan jumlah faktor variabel berupa tenaga kerja. Sedangkan jumlah faktor lainnya seperti modal, tanah, serta bahan baku tidak berubah. Ini berarti bahwa rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja bisa disebabkan karena kekurangan faktor input komplementer seperti kekurangan modal atau kurang baiknya manajemen yang profesional (Sanusi, 2001).

Atas dasar argumentasi di atas berarti bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan cara melakukan mobilisasi tabungan dalam negeri dan bantuan modal dari luar negeri. Hal ini ditujukan dalam upaya peningkatan investasi yang baru bagi produk barang-barang modal serta investasi di bidang pendidikan dan latihan agar keterampilan pengelolaan makin bertambah. Di samping itu memang diperlukan pula adanya perubahan-perubahan kelembagaan untuk memaksimalkan potensi investasi manusia dan fisik yang

mencakup berbagai aktivitas seperti; reformasi sistem sewa tanah, pajak perseroan, kredit dan struktur perbankan, menciptakan serta memperkuat administrasi yang independen, jujur dan efisien, serta upaya memperbaharui struktur pendidikan dan program latihan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Secara singkatnya bahwa tingkat kehidupan dan produktivitas yang rendah di suatu negara merupakan suatu fenomena sosial dan ekonomi yang satu sama lainnya saling terkait serta saling memperkuat sendiri, dan merupakan manifestasi serta sebagai penyebab utama adanya keterbelakangan di negara-negara Dunia Ketiga. Hal ini ada kaitannya dengan teori yang membahas mengenai *Circular and Cumulative Caution* di negara-negara berkembang yang didasarkan pada interaksi antara tingkat hidup dan produktivitas yang rendah.

12.2.2 Pertumbuhan Penduduk dan Beban Ketergantungan

Pada tahun 1985 jumlah penduduk dunia sekitar 4,8 miliar orang. Dari jumlah tersebut tiga perempatnya hidup di negara-negara berkembang/Dunia Ketiga, dan kurang dari seperempatnya hidup di negara-negara maju. Dari dua kelompok itu terjadi perbedaan dalam hal tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang sangat mencolok.

Tingkat kelahiran di negara-negara berkembang umumnya sangat tinggi yakni sekitar 35-40 setiap 1.000 orang penduduk. Sedangkan di negara-negara kurang maju dari setengahnya. Begitu pula tingkat kematian di negara-negara berkembang relatif tinggi dibandingkan dengan di negara-negara maju. Tingkat kematian di negara-negara berkembang terjadi setiap 1000 penduduk per tahunnya. Oleh karena dilaksanakannya program perbaikan kesehatan serta pengawasan terhadap aneka rupa penyakit menular di negara-negara berkembang, maka tingkat kematian antara negara berkembang dan negara maju lebih kecil dibandingkan dengan perbedaan tingkat kelahiran. Tentu hal ini berakibat pertumbuhan jumlah penduduk per tahunnya di negara-negara berkembang makin besar.

12.2.3 Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat hidup di negara-negara berkembang yakni kurangnya penggunaan tenaga kerja yang efisien

dibandingkan dengan di negara-negara maju. Penggunaan tenaga kerja di bawah standar disebabkan faktor pertama yakni keadaan setengah menganggur (*under employment*) penduduk kota maupun desa yang bekerja dibawah jam kerja normal (kerja harian, mingguan atau musiman). Termasuk pula yang tergolong bekerja secara normal dengan waktu penuh tetapi tingkat produktivitasnya rendah sehingga pengurangan jam kerja tidak berpengaruh terhadap total output. Faktor kedua yakni pengangguran terbuka yaitu penduduk yang mampu dan ingin bekerja tetapi tidak tersedia lapangan pekerjaan.

12.2.4 Ketergantungan terhadap Pertanian dan Barang Ekspor Primer

Hampir 80% dari jumlah penduduk di negara-negara berkembang tinggal di pedesaan, sedangkan di negara maju kurang dari 35%. Begitu juga angkatan kerja di negara-negara berkembang 66% bekerja di sektor pertanian, sedangkan di negara maju hanya 21%. Begitu juga sumbangan sektor pertanian terhadap GNP di negara-negara berkembang sekitar 32%, sedangkan di negara maju hanya 8%.

Terjadinya konsentrasi penduduk dan produksi dalam sektor pertanian dan produksi di negara-negara berkembang yakni pada tingkat pendapatan yang rendah dan prioritas pertama setiap orang yakni pangan, sandang, dan papan. Produktivitas pertanian rendah bukan hanya karena besarnya jumlah penduduk dibanding dengan luasnya tanah yang tersedia, juga karena teknologi yang digunakan di sektor pertanian di negara-negara berkembang sering masih bersifat primitif dengan organisasi yang buruk serta terbatasnya input yang berupa modal fisik serta kemampuan manusia (*human capital*).

Keterbelakangan teknologi disebabkan karena pertanian di negara-negara berkembang dikuasai oleh petani yang non-komersial. Perekonomian negara-negara berkembang umumnya lebih banyak berorientasi ke arah produksi barang-barang primer dibandingkan dengan barang sekunder (manufaktur) dan barang-barang tersier (jasa). Barang-barang primer itulah sebagai barang ekspor utama bagi negara-negara berkembang.

Pada tahun 1980 di seluruh negara-negara berkembang, produksi barang primer (makanan, bahan baku, minyak bakar, dan logam) mencapai hampir 80% dari jumlah eksportnya. Terkecuali ada beberapa negara sebagai negara

pengekspor minyak bumi serta hasil tambang/mineral lainnya. Hampir seluruh ekspor negara-negara berkembang berupa bahan baku dan makanan pokok.

12.2.5 Ketergantungan dan Kepekaan terhadap Luar Negeri

Umumnya di negara-negara berkembang, faktor utama yang memengaruhi terjadinya tingkat hidup yang rendah adalah pengangguran yang terus meningkat serta pendapatan yang tidak merata yakni distribusi kekuatan politik dan ekonomi yang tidak merata antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin.

Banyak negara kecil (sebagian besar dari 42 negara miskin) tingkat ketergantungan ekonominya sangat tinggi dan memiliki prospek yang kecil untuk berdiri sendiri. Menarik diri dari perekonomian dunia juga tampaknya tidak mungkin. Walau masih terdapat harapan untuk berdiri sendiri secara kolektif dengan cara menggabungkan kekuatan ekonominya. Kerja sama tersebut dapat memperkuat kekuatan bagi negara-negara kecil serta memungkinkan mereka lebih teliti lagi serta lebih selektif terhadap modal asing dan bantuan teknik.

12.3 Sifat-sifat Umum Negara Berkembang

Secara singkatnya Todaro juga memberikan ringkasan mengenai sifat-sifat umum dari negara-negara berkembang seperti berikut ini.

1. Di kebanyakan negara-negara berkembang pertumbuhan pendapatan nasionalnya rendah dan lambat.
2. Pertumbuhan pendapatan per kapita (Gross National Product/GNP) nya rendah dan boleh dikatakan tidak ada kemajuan.
3. Pola distribusi pendapatannya melenceng yakni 20% dari penduduk golongan atas menerima 5 hingga 10 kali pendapatan yang diterima oleh 40% golongan bawah.

4. Akibat adanya seperti yang tercantum pada butir 1 hingga butir 3 maka banyak penduduk Dunia Ketiga/negara berkembang menderita kemiskinan yang jumlahnya sekitar 850 juta hingga 1.200 juta per orang dengan pendapatannya kurang dari USD 100,- per orang setahunnya.
5. Banyak penduduk menderita karena kesehatan mereka yang buruk, kekurangan gizi, dan penyakit yang melemahkan tenaga serta tingkat kematian yang jumlahnya sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan di negara-negara maju.
6. Dalam bidang pendidikan terdapat fasilitas dan kurikulum pendidikan yang tidak relevan serta kurang memadai, tingkat kegagalan (drop out) sekolah yang tinggi serta tingkat yang melek huruf yang sangat rendah.

Interaksi antara semua sifat-sifat di atas cenderung memperkuat berlangsungnya kemiskinan, kebodohan, dan penyakit yang ke semuanya itu menjadi pembatas tingkat taraf kehidupan bagi penduduk di Dunia Ketiga.

Tabel 12.1: Laju Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Negara-negara ASEAN Tahun 2000-2018 (Bank Dunia, 2019)

No	Negara	Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata
1	Brunei Darussalam	0,80 %
2	Thailand	4,06%
3	Malaysia	5,09%
4	Indonesia	5,27%
5	Singapura	5,28%
6	Filipina	5,35%
7	Vietnam	6,45%
8	Laos	7,17%

9	Kamboja	7,79%
10	Myanmar	9,93%

Sumber daya manusia merepresentasikan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang lebih baik akan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut teori pertumbuhan endogen, tenaga kerja digunakan sebagai variabel yang menentukan pertumbuhan ekonomi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sama seperti teori pertumbuhan endogen, disebutkan juga bahwa selain modal dan teknologi dalam teori pertumbuhan baru, tenaga kerja baik dari segi kuantitas maupun kualitas memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Mankiw, 2016).

Dalam perkembangan teori pertumbuhan ekonomi, kependudukan selalu dijadikan salah satu aspek yang menentukan pertumbuhan ekonomi di samping ketersediaan sumber daya alam, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. dijelaskan oleh (Mankiw, 2016) bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian dan memengaruhi total output barang dan jasa suatu negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Bloom dan Canning (2001) menunjukkan bahwa divergensi demografis berdampak pada divergensi ekonomi, sedangkan jika setiap negara mendapatkan keuntungan dari bonus demografis, konvergensi demografis juga berdampak pada konvergensi ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan di beberapa negara Arab telah mengenali hubungan kausal antara variabel demografis dan variabel ekonomi. Variabel demografi terdiri dari rasio ketergantungan, jumlah penduduk usia kerja, dan tingkat pengangguran. Variabel ekonomi adalah pengeluaran pemerintah dan swasta di bidang kesehatan dan pendidikan, tingkat pendidikan penduduk, dan partisipasi perempuan dalam Pendidikan.

Bab 13

Kebijakan Kependudukan

13.1 Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk secara global semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi isu penting bagi negara-negara di dunia. Indonesia sebagai negara dengan urutan ketiga jumlah penduduk terbesar setelah Cina dan India memiliki masalah yang serius dengan kependudukan. Permasalahan kependudukan di Indonesia terlihat dari tingginya pertumbuhan penduduk, kurangnya keseimbangan penyebaran, dan struktur umur penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Masalah kependudukan berhubungan dengan kualitas, kuantitas, jenis kelamin, mata pencaharian, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persebaran penduduk. Ledakan pertumbuhan penduduk mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memengaruhi aspek kehidupan baik dari segi sosial budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan gangguan lingkungan karena tidak didukung dengan alam yang memadai, meningkatnya tindak kriminal akibat tingginya jumlah pengangguran, gelandangan, pengemis karena meningkatnya tingkat kemiskinan (Ekwarso and Sari, 2010) sedangkan menurut Junaidi dan Hardiani pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan ketersediaan pangan yang semakin terbatas, semakin berkurangnya sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, dan

meningkatnya pencemaran lingkungan (Junaidi and Hardiani, 2009). Pertumbuhan penduduk perlu diperhatikan karena tingkat pertumbuhan penduduk erat kaitannya dengan penyediaan anggaran untuk kesehatan, pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, dan ketersediaan pangan.

Oleh karena itu pengendalian perkembangan penduduk perlu dilakukan dengan kebijakan agar mewujudkan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan dukungan alam dan lingkungan. Pengendalian pertumbuhan penduduk diharapkan mampu mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan tertuang dalam Undang-Undang No.52 Tahun 20019 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013).

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian penduduk adalah melakukan kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatur, mengendalikan pertumbuhan, dan mengendalikan penyebaran penduduk. Kebijakan kependudukan dilakukan berhubungan dengan penetapan perkiraan jumlah, struktur, komposisi penduduk, pertumbuhan, dan penyebarannya karena berpengaruh terhadap demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Komponen dalam demografi tersebut seperti fertilitas, mortalitas, morbiditas, migrasi, ketenagakerjaan, perkawinan, aspek keluarga, dan rumah tangga (Hidayat, 2013).

Dalam merumuskan kebijakan kependudukan terdapat tiga variabel yang digunakan yaitu pengendalian kelahiran karena tingkat kelahiran yang masih tinggi, penurunan angka kematian khususnya tingkat kematian bayi dan ibu, dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Penerapan kebijakan kependudukan harus didukung dengan berbagai kebijakan ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum guna peningkatan kesehatan, kesempatan pendidikan, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Untuk mengendalikan perkembangan penduduk, kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan (a) Program keluarga berencana, (b) Adanya undang-undang perkawinan, (c) Pembatasan tunjangan aparatur sipil negara, dan (e) Melakukan penyuluhan tentang keluarga sejahtera. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Darwanto bahwa untuk memecahkan persoalan kependudukan maka pemerintah perlu memperhatikan keberhasilan program keluarga berencana, peningkatan sektor kesehatan,

program transmigrasi, memperluas akses pendidikan dan keterampilan, meningkatkan produksi pertanian, memperluas lapangan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia, dan meningkatkan peranan wanita (Darwanto, 2020).

13.2 Pengertian Kebijakan Kependudukan

Dalam Undang-Undang No.52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat (Undang-Undang No.52 Tahun 2009, 2009). Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan juga bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan upaya terencana yang dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk yang ada di Indonesia. Perencanaan pembangunan disusun berdasarkan pada data dan informasi kependudukan (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013).

Kebijakan pendudukan diartikan sebagai kebijakan untuk mengendalikan besar, komposisi, dan distribusi perkembangan penduduk Indonesia. Kebijakan kependudukan didasarkan pada semakin meningkatnya jumlah penduduk terutama usia muda, penyebaran penduduk yang tidak merata di wilayah Indonesia, kurangnya tingkat pendidikan, dan kesehatan masyarakat (Noor, 2015). Kebijakan kependudukan merupakan keputusan legislatif, program administrasi, dan usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengubah kecenderungan penduduk demi kepentingan kehidupan masyarakat dan kesejahteraan nasional (Mandas, Lengkong and Ruru, 2018). Sedangkan menurut Hidayat kebijakan pendudukan merupakan seluruh tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan yang didalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk (Hidayat, 2013).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1965 telah memiliki *the population commission* yang menjadi dasar yang nyata dalam penentuan kebijakan kependudukan. Kebijakan penduduk menurut PBB diartikan sebagai

langkah dan program yang dilakukan oleh negara untuk membantu tercapainya tujuan ekonomi, sosial, politik sehingga memengaruhi variabel demografi utama yaitu pertumbuhan penduduk serta perubahan ciri-ciri demografisnya.

Kebijakan kependudukan telah diatur di GBHN meliputi (a) Bidang pengendalian kelahiran, (b) Penurunan tingkat kematian terutama kematian anak, (c) Perpanjangan untuk harapan kerja, (d) Penyebaran penduduk yang seimbang, (e) Urbanisasi yang seimbang dan merata, dan (f) Perkembangan dan penyebaran angkatan kerja. Secara umum kebijakan penduduk harus ditujukan untuk (Hidayat, 2013):

1. Perlindungan kepentingan dan pengembangan kesejahteraan penduduk terutama untuk generasi masa depan.
2. Memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan apa yang terbaik bagi kesejahteraan diri, keluarga, dan anaknya.
3. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan pencarian pemecahan masalah kependudukan dengan melakukan pengendalian baik dari kelahiran, kematian dan perpindahan.

Pemerintah Indonesia dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melakukan kebijakan langsung dan kebijakan tidak langsung. Kedua kebijakan ini merupakan kebijakan yang berpengaruh terhadap tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi penduduk. Kebijakan langsung yang dilakukan pemerintah seperti KB, di mana adanya anjuran pemerintah satu keluarga cukup dua anak. Kebijakan tidak langsung seperti memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan peluang kerja sehingga secara tidak langsung menunda usia perkawinan dini (Noor, 2015).

13.3 Tujuan Kebijakan Kependudukan

Tujuan dari kebijakan kependudukan adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk terutama untuk generasi yang akan datang. Tujuan kebijakan kependudukan menurut Noor yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan pembangunan, kedua perilaku demografi yang merupakan

sejumlah tindakan individu, ketiga usaha untuk memaksimalkan utilitas kesejahteraan individu (Noor, 2015).

Kebijakan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup penduduk dan kebijakan kependudukan diharapkan memberikan kemungkinan kepada setiap orang untuk menentukan kehidupannya yang lebih baik. Kebijakan kependudukan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Undang-Undang No.52 Tahun 2009, 2009), Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Dalam merumuskan kebijakan penduduk, pemerintah perlu memperhatikan:

1. Kualitas penduduk;
2. Adanya stabilitas sumber kehidupan penduduk;
3. Menjamin adanya lapangan kerja, dan;
4. meningkatkan standar kehidupan yang lebih baik.

Menurut Noor, dalam menentukan tujuan kebijakan kependudukan harus meliputi lima aspek yaitu (Noor, 2015):

1. Pentingnya kualitas penduduk yaitu jumlah penduduk, struktur, komposisi, laju pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
2. Pentingnya kualitas penduduk yaitu status kesehatan, tingkat kematian, tingkat pendidikan dan angka kemiskinan.
3. Mobilitas penduduk di mana adanya tingkat urbanisasi dan migrasi yang menyebabkan penyebaran penduduk antar wilayah, desa/kota, dan antar pulau.
4. Pentingnya data dan Informasi kependudukan.
5. Penyerasian kebijakan kependudukan.

Komponen yang dilakukan dalam membentuk kebijakan penduduk antara lain adalah kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Ketiga komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut ini:

13.3.1 Kebijakan Tingkat Kelahiran

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan mengendalikan angka fertilitas dengan program Keluarga

Berencana. Kebijakan ini bertujuan untuk memengaruhi tingkat fertilitas yaitu menurunkan angka kelahiran. Menurut Efendi bahwa variabel yang memengaruhi tingkat fertilitas adalah usia perkawinan, proporsi wanita yang tidak menikah, perceraian pada usia reproduksi, tidak mengadakan hubungan seks dengan sengaja, frekuensi hubungan seks, kesuburan biologis, pemakaian alat kontrasepsi, dan lainnya (Effendi, 1991).

Penurunan tingkat fertilitas dilakukan dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Keluarga Berencana (KB), kebijakan ini dilaksanakan mulai dari pedesaan sampai perkotaan dan dianggap efektif dalam menekan pertumbuhan penduduk. Keluarga Berencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatur usia ideal perkawinan, kelahiran anak, jarak anak, usia yang ideal untuk melahirkan, mengatur kehamilan, dan melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi guna meningkatkan kehidupan keluarga yang lebih baik.
 - a. Pengaturan kehamilan, kebijakan dalam pengaturan kehamilan bertujuan untuk membantu pasangan suami istri agar melahirkan di usia yang ideal, memiliki jumlah anak dan mengatur jarak anak. Pengaturan kehamilan dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi.
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, konseling, pendidikan dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
 - c. Mempromosikan pentingnya air susu ibu dan menyusui secara inklusif untuk mencegah kehamilan enam bulan pasca kelahiran, meningkatkan kesehatan bayi dan kesehatan ibu.
2. Pembatasan usia perkawinan, tingkat fertilitas juga dipengaruhi oleh perkawinan. Umur perkawinan dini dapat menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Sehingga perlu adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak.
3. Salah satu cara yang dilakukan yang bersifat tidak langsung dengan melakukan pencabutan subsidi bagi aparatur sipil negara yang memiliki anak lebih dari dua anak.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ekwarso dan Sari bahwa kebijakan dalam penekanan angka kelahiran dapat dilakukan dengan meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan cara:

1. Mengendalikan tingkat kelahiran
2. Memberdayakan ketahanan keluarga dan kualitas lingkungan keluarga
3. Meningkatkan kualitas reproduksi remaja
4. Memperkuat kelembagaan dan jaringan keluarga berencana (Ekwarso and Sari, 2010).

Pengendalian tingkat kelahiran diarahkan pada usaha peningkatan pelaksanaan program KB dengan mengajak masyarakat untuk merencanakan keluarga sehingga mengendalikan angka kelahiran. Program keluarga berencana ini diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan usaha perencanaan dan pengendalian penduduk yang telah dilakukan (Hidayat, 2013).

13.3.2 Kebijakan Tingkat Kematian

Pemerintah menetapkan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Penurunan tingkat kematian merupakan suatu hak asasi manusia yaitu usaha yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian di samping melakukan upaya penekanan jumlah penduduk (Hidayat, 2013).

Menurut Effendi variabel yang memengaruhi tingkat morbiditas dan mortalitas adalah disebabkan karena:

1. Faktor ibu yaitu angka kematian ibu yang disebabkan karena usia melahirkan, jumlah anak, dan jarak kelahiran
2. Faktor pencemaran lingkungan baik dari udara, makanan, penularan penyakit, serangga pembawa penyakit
3. Faktor kekurangan gizi
4. Faktor luka seperti kecelakaan
5. Faktor pengendalian penyakit seperti usaha preventif perseorangan dan perawatan dokter (Effendi, 1991).

Kebijakan penurunan angka kematian dilakukan dengan memberikan prioritas pada penurunan angka kematian pada ibu saat hamil, melahirkan dan pasca melahirkan, penurunan angka kematian bayi dan anak. Usaha yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat kematian dengan cara perbaikan bidang kesehatan di mana pemerintah menjamin adanya pelayanan kesehatan sampai ke pelosok daerah, peningkatan kualitas pangan dan gizi, peningkatan pengetahuan masyarakat dan pendidikan, penyediaan air bersih dan kesehatan lingkungan.

13.3.3 Kebijakan Mobilitas penduduk

Kebijakan pendistribusian penduduk sudah dilakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Perpindahan penduduk yang dilakukan dari Jawa ke luar Jawa sebagai usaha redistribusi penduduk. Kebijakan ini dilanjutkan setelah Indonesia merdeka dengan adanya Undang-Undang No.3 tahun 1972 adanya perpindahan dilakukan dengan pertimbangan demografis yang bertujuan untuk:

1. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan daerah.
3. Melakukan keseimbangan penyebaran penduduk.
4. Pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
5. Pemanfaatan sumber daya alam dan tenaga manusia
6. Meningkatkan kesatuan dan persatuan.
7. Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Secara demografis persebaran penduduk Indonesia tidak merata kemana berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 masyarakat yang menghuni pulau Jawa sebanyak 57.5 persen dan yang paling kecil berada di pulau Maluku dan Papua sebanyak 2.6 persen (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013).

Kebijakan dalam penyebaran penduduk didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan (Undang-Undang No.52 Tahun 2009, 2009). Di mana kebijakan ini dilakukan dengan menghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan mobilitas penduduk harus

mempertimbangkan asa kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan (Ekwarso and Sari, 2010).

Menurut Ekwarso dan Sari ketimpangan yang terjadi dalam pembangunan menyebabkan adanya dorongan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, (Ekwarso and Sari, 2010). Perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) disebabkan oleh banyak faktor salah satunya untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan penghidupan yang layak. Untuk menanggulangi persebaran penduduk yang tidak merata dapat dilakukan dengan program transmigrasi. Transmigrasi yang dilakukan adalah pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber ekonomi yang ada di luar daerah, meningkatkan keseimbangan antara kependudukan dengan lingkungan hidup, mendorong pembauran antar suku dan masyarakat serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Di samping kebijakan transmigrasi yang dilakukan pemerintah membuka daerah industri baru di luar pulau Jawa. (Darwanto, 2020).

13.4 Meningkatkan Kualitas Penduduk Indonesia

Kualitas penduduk merupakan kondisi yang dilihat dari aspek fisik dan non fisik. Di mana aspek tersebut meliputi aspek tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, peluang kerja, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran sebagai manusia yang bertakwa, berkepribadian, berbudaya dan berkebangsaan serta kehidupan layak (Undang-Undang No.52 Tahun 2009, 2009). Kualitas penduduk juga dipengaruhi oleh keluarga yang berkualitas yang berdasarkan pada perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, maju, sehat, memiliki wawasan luas serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Kualitas penduduk Indonesia merupakan indikator dari sumber daya manusia di mana terdapat tiga indikator pengukuran kualitas penduduk di antaranya adalah tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan masyarakat (Siagian et al., 2020). Pembangunan keluarga yang berkualitas merupakan wujud dari kualitas hidup yang baik dalam lingkungan yang sehat.

Untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia maka beberapa kebijakan disusun sebagai berikut:

1. Meningkatkan program KB dan mendapat dukungan dari masyarakat.
2. Meningkatkan kesempatan mendapatkan pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
3. Menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
4. Meningkatkan program transmigrasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengatasi masalah kependudukan dengan perencanaan yang komprehensif melakukan pembangunan yang merata.
6. Mengatasi masalah pengangguran dan kesempatan kerja.
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No.52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pengembangan kualitas penduduk bertujuan untuk (Undang-Undang No.52 Tahun 2009, 2009):

1. Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara penduduk dengan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan manusia yang sehat jasmani, rohani, mandiri, cerdas, beriman, bertakwa serta memiliki etos kerja yang tinggi.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, agama, perekonomian, dan nilai sosial.
4. Peningkatan kualitas penduduk dengan pembinaan dan pemenuhan layanan penduduk yang dilakukan melalui komunikasi, informasi, edukasi serta penyediaan sarana dan prasarana.

13.4.1 Kebijakan pendidikan

Pendidikan merupakan tugas bersama pemerintah dan masyarakat. Pendidikan dilakukan baik pendidikan formal maupun nonformal yang dibangun oleh pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara (Siregar, Purba, et al., 2020). Kebijakan pendidikan dapat dilakukan dengan membangun sekolah-sekolah baru mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Kebijakan pendidikan baik di bawah Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan maupun Kementerian Agama mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013).

Kebijakan pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pemberdayaan wanita, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan kerja dan pelatihan kerja. Peningkatan pendidikan pada wanita juga dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk dan penurunan angka fertilitas (Junaidi and Hardiani, 2009).

13.4.2 Kebijakan Kesehatan

Pemerintah perlu menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai dan mudah diakses sampai ke pelosok desa. Usaha kebijakan kesehatan diharapkan mampu menurunkan tingkat kematian masyarakat:

1. Beberapa program peningkatan kesehatan masyarakat dimulai dari kebijakan untuk melakukan vaksinasi bagi anak-anak untuk menyelamatkan mereka dari berbagai penyakit berbahaya seperti hepatitis, polio, dan lainnya. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menurunkan tingkat kematian bagi anak dan ibu sehingga berpengaruh terhadap penurunan tingkat kematian penduduk secara keseluruhan.
2. Pembangunan kesehatan juga dilakukan dengan memperhatikan keadaan gizi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan anak.
3. Pembangunan kesehatan dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk pencegahan penyakit di samping penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
4. Penyebaran pelayanan kesehatan mulai dari tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan mulai dari puskesmas, rumah sakit, klinik keluarga berencana, usaha kesehatan sekolah,

kesehatan ibu dan anak, dan peningkatan mutu laboratorium kesehatan.

Beberapa upaya kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan antara lain adalah:

1. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.
2. Pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan.
3. Meningkatkan perbaikan gizi dan peningkatan kesehatan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup masyarakat.
4. Pengendalian, pengadaan serta pengawasan makanan, minuman dan obat yang beredar di masyarakat.
5. Meningkatkan manajemen kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kesehatan.

13.4.3 Kebijakan Tingkat Pendapatan

Kebijakan yang berhubungan dengan tingkat pendapatan dengan menyediakan lapangan kerja sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat terutama bagi wanita juga berdampak pada penurunan tingkat fertilitas (Junaidi and Hardiani, 2009). Kualitas penduduk juga merupakan komponen penting dalam pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pendapatan yang baik akan meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan sehingga menjadi potensi utama dalam pembangunan (Siregar, Sahir, et al., 2020).

13.5 Evaluasi Kebijakan Kependudukan

Evaluasi terhadap kebijakan publik guna mengatasi kependudukan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Undang-Undang No.52 Tahun 2009, 2009). Berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah hendaknya dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan program atau kebijakan publik. Pencapaian keberhasilan kebijakan kependudukan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia yang mana didasarkan pada

indikator pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013).

Menurut Mandas, Lengkong dan Ruru, evaluasi kebijakan kependudukan dapat dilakukan dengan cara efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsitas, dan ketepatan (Mandas, Lengkong and Ruru, 2018):

1. Efektivitas, efektivitas dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta meningkatkan sarana dan prasarana di setiap desa, kabupaten dan kota.
2. Efisiensi, adanya pembiayaan yang sebanding dengan pelayanan yang diberikan.
3. Kecukupan, adanya kerja sama yang baik dari masyarakat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menggunakan alat kontrasepsi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat
4. Pemerataan, peningkatan pemerataan akses kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5. Responsitas, meningkatnya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam kependudukan.
6. Ketepatan, program pemerintah dilakukan secara tepat untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Sedangkan menurut Hayati dan Alfana evaluasi yang dilakukan dalam kebijakan kependudukan dengan memperhatikan:

1. Pengendalian kuantitas di mana mengelola pertumbuhan penduduk dengan melakukan pengendalian angka kelahiran dengan memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
2. Peningkatan kualitas penduduk melalui peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan penyediaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

3. Pembangunan keluarga dengan melakukan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat tumbuh kembang anak, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga
4. mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumber daya alam pendukung
5. Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi dalam sistem informasi sebagai dasar dari perencanaan pembangunan
6. Melaksanakan pembangunan dengan sistem administrasi kependudukan yang maju, modern, transparan dan terkendali (Hayati and Alfana, 2016)

Daftar Pustaka

- Abella, M. I. (1995) Asian Migrant and Contract Workers in The Middle East. Edited by R.Cohen (ed). The Cambridge Survey of World Migration, Cambridge University Press.
- Achille, G. (1855) 'Ou Demographics Comparee'. New York: Keshinger Publishing, LCC.
- Adioetomo, S.M dan Samosir, Omas Bulan (2016) "Dasar-Dasar Demografi" Jakarta: Salemba Empat.
- Alene, G. D. dan Worku, A. (2009) 'Estimation of the total fertility rates and proximate determinants of fertility in North and South Gondar zones, Northwest Ethiopia: An application of the Bongaarts' model', Ethiop. J. Health Dev, 23(1), pp. 103–116.
- Andriani RA (2016) Faktro Penyebab Kematian Bayi diwilayah Kerja Puskesmas Ngombol Kab. Purworejo (Studi Kasus tahun 2015) Jurnal kesehatan Masyarakat (e-jurnal) volume 4, nomer 1, januari 2016 (ISSN: 2356-3346)
- Angeles, G. et al. (2001) A Meta-Analysis of The Impact of Family Planning Programs on Fertility Preferences, Contraceptive Method Choice and Fertility. Carolina.
- Anonim (2017) -. UIN Sunan Gunung Djati.
- Arif, M. et al. (2015) 'Mortalitas di Indonesia (Sejarah Masa Lalu dan Proyeksi ke Depan)'.
- Arini, I. A. (2001). Dampak Sosial Ekonomi Dinamika Mobilitas Penduduk Propinsi Bali (Sebelum dan Semasa Krisis Moneter). Majalah Geografi Indonesia, 15(2), 149-163.
- Ashoer, M. et al. (2021) Ekonomi Pariwisata. Yayasan Kita Menulis.

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2013) Profil Kependudukan Dan Pembangunan Di Indonesia tahun 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jakarta. Available at: <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>.
- Badan Pusat Statistik [BPS] (2020) Berita Remis Statistik 15 Juli 2020. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020) "Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Agustus 2020," Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. (2020) "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia: Februari 2020," Jakarta: BPS
- Bagoes, M. I. (2003) Demografi umum, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Bank Dunia. (2019) Ending Poverty, Investing in Opportunity. The World Bank Annual Report 2019.
- Barclay, G. W. et al. (2021) 'BIBLIOGRAPHY FOR HUMAN POPULATION ECOLOGY'.
- Barro, R. J. (1991) "Economic Growth in a Cross Section of Countries." *Quarterly Journal of Economics* 106(2): 407-444.
- Barro, R. J. (1997) *Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Barthos Basir (1999) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Baum, F. (2016) *The new public health*. Oxford University Press.
- Becker (1995) *An Economic Analysis of Fertility*. Stanford, California.
- Bidarti, A. (2020) *Teori Kependudukan*. Penerbit Lindan Bestari.
- BKKBN (2009) *Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014 dan Rencana Strategik Program Keluarga Berencana*. Jakarta.
- Bloom, D. J., dan Williamson, J. G. (1997) *Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia* (No. 6268). Cambridge.
- Bloom, D., dan Canning, D. (2001) *Cumulative Causality, Economic Growth, and the Demographic Transition*. In NBER Working Paper Series (No. 8685).

- Boldeanu, F., dan Constantinescu, L. (2015) *The Main Determinants Affecting Economic Growth*. *Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series V*, 8(2), 329.
- Bollen, K. A., Jennifer, L. G. dan Guy, S. (2002) *Socioeconomic Status, Permanent Income, and Fertility: A Latent Variable Approach*. Carolina.
- Bongaarts, J. (1978) 'A Framework for Analyzing The Proximate Determinants of Fertility.', *Population and Development Review*, 4(1), pp. 105–132.
- BPS (2019) www.bps.go.id, diakses tanggal 2 April 2021
- BPS (2020) 'Statistik Indonesia 2020', Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- BPS (2020) Hasil Sensus Penduduk 2020, Sensus Penduduk 2020.
- BPS Susenas 2020
- Budiarto E (2002) *Pengantar Epidemiologi*, EGC, Jakarta.
- Carr-Hill, R. (2017) 'Improving Population and Poverty Estimates with Citizen Surveys: Evidence from East Africa', *World Development*, 93, pp. 249–259. doi: 10.1016/j.worlddev.2016.12.017.
- Cheeseman, J. (2016) *Food Security in the Face of Salinity, Drought, Climate Change, and Population Growth, Halophytes for Food Security in Dry Lands*. Elsevier Inc. doi: 10.1016/b978-0-12-801854-5.00007-8.
- Daouli, J., Demoussis, M. dan Giannakopoulos, N. (2009) 'Sibling-sex Composition and Its Effects on Fertility and Labor Supply of Greek Mothers', *Economic Letters*, pp. 189–191.
- Darwanto, D. (2020) *Kebijakan kependudukan dalam usaha memecahkan masalah kependudukan dalam rangka memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat*. Cirebon. Available at: <https://jurnal.untagcirebon.ac.id/index.php/cendekia-jaya/article/view/73>.
- Davis, K. dan Blake, J. (1956) 'Social Structure and Fertility', *Economic Development and Cultural Change*, 4, pp. 221–235.
- Demografi, L. (1981) 'Dasar-Dasar Demografi', Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Desra E (2019) Detreminan Tingkat mortalitas di Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 1, Nomor 1 Januari 2019.
- Effendi, T. N. (1991) ‘Kebijaksanaan Kependudukan: Teori, Konsep, Dan Penerapannya Di Indonesia’, *Populasi*, 2(2). doi: 10.22146/jp.10782.
- Ekawati (2017) ‘Fertilitas Migran dan Faktor yang Memengaruhi Fertilitas di Jawa Barat’, *Polasip*, 25(2).
- Ekwarso, H. and Sari, L. (2010) ‘Penyerasian Kebijakan Kependudukan di Provinsi Riau’, *Jurnal Ekonomi*, 18(2), pp. 36–49.
- Faturochman dkk (2004) *Dinmika Kependudukan dan Kebijakan* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Firdaus, Z. F., & Wijayanto, A. W. (2020). Tinjauan Big Data Mobilitas Penduduk Pada Masa Social Distancing dan New Normal Serta Keterkaitannya dengan Jumlah Kasus Covid-19. *Seminar Nasional Official Statistics 2020* (pp. 265-275). Jakarta: Politeknik Statistika STIS.
- Freedman, R. (1962) ‘The Sociology of Human Fertility: a trend report and bibliography’, *Current Sociology*, 10–11(2), pp. 35–115.
- Freedman, R. (1979) ‘Theories of Fertility Decline: “a reappraisal”’, *Social Force*.
- Gheasi, M. and Nijkamp, P. (2017) ‘A brief overview of international migration motives and impacts, with specific reference to FDI’, *Economies*, 5(3), pp. 1–11. doi: 10.3390/economies5030031.
- Giyarsih, S. R. (1999). Mobilitas Penduduk Daerah Pinggiran Kota di Dusun Kadapiro dan Dusun Siderejo Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. *Majalah Geografi Indonesia*, 13(2), 141-155.
- Guga, K., Alikaj, L., dan Zeneli, F. (2015) Population, economic growth and development in the emerging economics. *European Scientific Journal*, 11 (10), 367–374.
- Guillard, A. (1855) ‘Eléments de statistique humaine ou démographie comparée, Paris: o’. A.
- Guillard, A. (2013) *Eléments de statistique humaine ou démographie comparée*. Ined.

- Hanafie, R. (2010) 'Pengantar Ekonomi Pertanian [internet].[diunduh 1 November 2017]', Yogyakarta (ID). CV Andi. Hal, 84.
- Hardati, P. (2018). *Mobilitas Penduduk Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pendekatan Keruangan*. Semarang: Unens Press.
- Harmadi, S. H. B. (2008) 'Pengantar Demografi', Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hasan, A., dan Butt, S. (2008) Role of trade, external debt, labor force and education in economic growth empirical evidence from Pakistan by using ARDL approach. *European Journal of Scientific Research*, 20 (4), 852–862.
- Hauser, P. M. and Duncan, O. D. (1959a) 'Demography as a body of knowledge', *The study of population: An inventory and appraisal*, edited by PM Hauser and OD Duncan, pp. 76–105.
- Hauser, P. M. and Duncan, O. D. (1959b) 'The nature of demography', *The study of population*, pp. 29–44.
- Hawthorn (1970) *Definisi Kependudukan atau Demografis*.
- Hayati, B. N. and Alfana, M. A. fahrudin (2016) 'Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Sleman Pasca Berakhirnya MDGs', *Natapraja*, 4(2). doi: 10.21831/jnp.v4i2.12620.
- Hidayat, N. (2013) 'Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia', *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), pp. 24–36.
- Hugo, G. (1995) 'International labor migration and the family: Some observations from Indonesia', *Asian and Pacific Migration Journal*, 4(2–3), pp. 273–301. doi: 10.1177/011719689500400206.
- Ida Bagus Mantra (2009) 'Demografi Umum, Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- Ilpaj, S. M. and Nurwati, N. (2020) 'ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMATIAN AKIBAT COVID-19', 3, pp. 16–28.
- Ismah, Z. (2018) 'Bahan Ajar Dasar Epidemiologi', UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MEDAN.
- Jati, W. R. (2015) 'Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia', *Populasi*, 23(1), pp. 1–19.

- Jellinek, L. (1986) *Sistem Pondok dan Migrasi Sirkuler*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jhingan M. .L (2014)*The Economic Of Development and Planning* : PT. Rajagrafindo Persada .
- Junaidi, J. and Hardiani, H. (2009) ‘Dasar--Dasar Teori Ekonomi Kependudukan’ . Hamada Prima.
- Junaidi, J. and Hardiani, H. (2009) *Dasar-dasar Teori Kependudukan*. Hamada Prima. Available at: https://repository.unja.ac.id/3787/7/buku_tek.pdf.
- Kartika, N. Y. dan Sari, U. M. (2020) ‘Analisis fertilitas di kalimantan selatan’ , *Jurnal Keluarga Berencana*, 5(01), pp. 16–26.
- Kartomo Wirosuharjo . (1986)*Kebijaksanaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta : FE UI 1986 .
- Keith, B. W. (1990) *The Economic Organization of the Household*. New York: Cambridge University Press.
- Kelley, A. C. dan R. M. Schmidt. (2005) “Evolution of recent economic-demographic modeling: A synthesis.”*Journal of Population Economics* 18(2): 275-300
- Kesehatan, K. (2019) *Profile Kesehatan Indonesia tahun 2019*, *Journal of Chemical Information and Modeling*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kesehatan, P. et al. (2019) ‘Pelaksanaan Registrasi Kematian dan Penyebab Kematian di Kota Ambon Tahun 2014’ , pp. 1–12.
- Khoerudin, H. (1992). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti.
- Klasen, S., dan Lawson, D. (2007) *The impact of population growth on economic growth and poverty reduction in Uganda* (No. 133). Georg-August-Universität Göttingen, Volkswirtschaftliches Seminar, Göttingen This.
- Kuncoro, Mudrajad. (2015) “Mudah Memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi,” Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lamnisos, D., Giannakou, K. and Jakovljevic, M. M. (2021) ‘Demographic forecasting of population aging in Greece and Cyprus : one big challenge for the Mediterranean health and social system long - term sustainability’ ,

- Health Research Policy and Systems. BioMed Central, pp. 1–9. doi: 10.1186/s12961-020-00666-x.
- Lee, E. S. (1991) Teori Migrasi. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Lee, R. D. (2003) “The demographic transition: Three centuries of fundamental change.” *Journal of Economic Perspectives* 17(4): 167-190.
- Lengkong, G. T. et al. (2020) ‘41 faktor – faktor yang berhubungan dengan kematian bayi di indonesia’, 9(4), pp. 41–47.
- Lilis Heri Mis Cich (2016) *Mozaik Demografi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Lucas, D. (2003) *Beginning Population Studies*. Canberra.
- Mandas, Is. S. T., Lengkong, F. D. J. and Ruru, J. (2018) ‘Evaluasi Kebijakan Kependudukan Program Keluarga Berencana Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi di BKKBN Prov Sulawesi Utara)’, *Jurnal Administrasi Publik*, 4(62), pp. 92–98.
- Mankiw, N. G. (2016) *Macroeconomics*. In *Animal Genetics (NINTH EDIT, Vol. 39)*. New York: A Macmillan Education Imprint New.
- Mankiw, N. G., D. Romer, dan D. N. Weil. (1992) “A Contribution to the Empirics of Economic Growth.” *Quarterly Journal of Economics* 107(2): 407-437.
- Mantra, I. B. (2000) *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mantra, I. B. (2000) *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Percetakan Nur Cahaya.
- Mantra, I. B. (2003) ‘*Demografi Umum Edisi Kedua*’, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mantra, I. B. (2003). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mantra, Ida Bagoes. (2010) “*Demografi Umum*,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marhaeni, A. (2018). *Pengantar Kependudukan (Jilid 1 ed.)*. Denpasar: CV. Sastra Utama.
- Marhaeni, A. (no date) ‘*FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA*’.

- Marhaeni(2018) Buku Pegangan pengantar kependudukan, Jilid I, ISBN: 978-602-74-788-4-8, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Denpasar.
- Marit, E. L. et al. (2021) Pengantar Ilmu Ekonomi. Yayasan Kita Menulis.
- Michael P Todaro ;Stephen C Smith (2015) Economic Development (Twelfth Edition).
- Michael P. Todaro. (2009) ‘ Pembangunan Ekonomi , Jakarta : Erlangga.
- Misnaniarti, M. et al. (2017) ‘Availability of facilities and health workers to support universal coverage of national health insurance’, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, 1(1), pp. 6–16.
- Moh. Yamin (1981)Dasar Dasar Demografi, Jakarta : Lembaga Demografi FEUI.
- Mubarak, W. dan N. chayatin. (2009) Ilmu Kesehatan Masyarakat,. Jakarta, Salemba Medika.
- Mulyadi, S. (2014) ‘Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan’, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munir. (2003). Studi Demografi. Yogyakarta: Nurcahaya.
- Munthe, R. N. et al. (2021) Sistem Perekonomian Indonesia. Yayasan Kita Menulis.
- Muta'ali, Lutfi. (2015) “Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan,” Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPPG) Universitas Gadjah Mada.
- Nangi, M. G., Yanti, F. and Lestari, S. A. (2019) Dasar Epidemiologi. Deepublish.
- Nations, U. (2001) World Population Prospects: The 2000 Revision. New York.
- Nations, U. (2019) World population prospects 2019, Department of Economic and Social Affairs. World Population Prospects 2019. New York: Department of Economics and Social Affairs Population Division. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12283219>.
- Noor, M. (2015) ‘Kebijakan Pembangunan Kependudukan Dan Bonus Demografi’, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah, 4(1), pp. 121–128.

- Nugroho, Y. D., & Kasuma, K. A. (2020). Analisis Perubahan Mobilitas Terhadap Proses Remediasi Dampak Covid-19 di Indonesia Menggunakan Dara Google Mobility. Seminar Nasional Official Statistics 2020 (pp. 344-348). Jakarta: Politeknik Statistika STIS.
- Oberai, A. . (1985) State Policies and Internal Migration: Studies in Market and Planned Economies. London: Croombelm.
- Ogawa, K. dan Akter, M. (2007) 'Female Labor Force Participation in Indonesia', *Journal of International Cooperation Studies*, 14(3), pp. 71–108.
- Ozerkek, Y. (2013) Unemployment and labor force participation: A panel cointegration analysis for European countries. *Applied Econometrics and International Development*, 13(1), 67–76.
- Paudel, R. C., Perera, N., dan Paude, R. C. (2009) Foreign Debt, Trade Openness, Labor Force and Economic Growth: Evidence from Sri Lanka. *The ICAFI Journal of Applied Economics*, 8(1), 57–64.
- Pembangunan, M. and Kependudukan, B. (2000) 'Sensus penduduk di indonesia', 11(1), pp. 17–34.
- Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
- Peterson, E. W. F. (2017) The role of population in economic growth. *SAGE Open*, 7(4), 1–15.
- Pollard, A. H., Yusuf, F. dan Pollard, R. G. N. (1982) Teknik Demografi. Terjemahan. Edited by Munir and Budiarto. Jakarta: Bina Aksara.
- Purba, B., Albra, W., et al. (2021) *Ekonomi Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Nainggolan, L. E., et al. (2020) *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Purba, D. S., et al. (2021) *Ekonomi Internasional*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Rahmadana, M. F., et al. (2021) *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Puspitosari, P. (2013). Kajian Mobilitas Penduduk Sirkuler di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Universitas Negeri Surabaya, 11-19.

- Rahmadana, M. F. (2014) 'Karakteristi Komuter dan Kualitas Hidup', pp. 1–8.
- Rahmadana, M. F. and Sagala, G. H. (2019) 'The brief data of the relation of living as commuters and quality of life', *Data in Brief*, 26. doi: 10.1016/j.dib.2019.104540.
- Rahmi, A., & Iwan Rudiarto. (2013). Karakteristik Migrasi dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Pedesaan Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. *Pembangunan Wilayah dan Kota*, 9(4), 331-342.
- Redaksi Ilmugeografi (2020) www.ilmugeografi.com, diakses tanggal 2 April 2021
- Reisch, L., Eberle, U. and Lorek, S. (2013) 'Sustainable food consumption: An overview of contemporary issues and policies', *Sustainability: Science, Practice, and Policy*, 9(2), pp. 7–25. doi: 10.1080/15487733.2013.11908111.
- Rosado, J. A., Alvarado Sánchez, I., Galindo Km, G., dan Vía, E. (2017) From Population Age Structure and Savings Rate to Economic Growth: Evidence from Ecuador. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(3), 352–361.
- Rusli, S. (2012) *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta.
- Said, R. (1983) 'Pengantar Ilmu Kependudukan', Jakarta: LP3ES.
- Samosir, O. B. and Rajagukguk, W. (2015) 'Demografi Formal'. UKI Press.
- Santoso, B. I., Hardati, P., & Erni Suharini. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Mobilitas Penduduk di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. *Edu Geography*, 1(7), 11-18.
- Sanusi, Bachrawi. (2001) *Hasil Tambang Minyak dan Gas Bumi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Saputra, W. (2010) 'KELURAHAN DEMANG LEBAR DAUN KECAMATAN ILIR BARAT I PALEMBANG'.
- Sari, A. P. et al. (2020) *Ekonomi Kreatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Severus, P. A. K. (2019) 'Pengaruh Pendidikan Tinggi, Kepadatan Penduduk, Mortalitas Bayi dan PDB Per-Kapita Terhadap Tingkat Fertilitas di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 7(2), pp. 85–94.

- Sharp, C. A. et al. (2020) 'Public acceptability of public health policy to improve population health: A population-based survey', *Health Expectations*, 23(4), pp. 802–812. doi: 10.1111/hex.13041.
- Shyrok, H. S. dan Siegel, J. S. (1971) *The Methods and Materials of Demography*. Washington DC.
- Siagian, V. et al. (2020) *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Edited by Alex Rikki & Janner Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Siah, A. K. dan Lee, G. H. (2015) 'Female Labour Force Participation, Infant Mortality and Fertility in Malaysia', *Journal of the Asia Pacific Economy*, 20(4), pp. 613–629.
- Sibanda, A. et al. (2003) 'The Proximate Determinants of the Decline to Below-replacement Fertility in Addis Ababa, Ethiopia.', *Studies in Family Planning*, 34(1), pp. 1–7.
- Sinding, S. W. (2009) 'Population, poverty and economic development', *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1532), pp. 3023–3030. doi: 10.1098/rstb.2009.0145.
- Siregar, R. T., Purba, S., et al. (2020) *Manajemen Bisnis*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Siregar, R. T., Sahir, S. H., et al. (2020) *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Edited by J. Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Solow, R. M. (1956) "A contribution to the theory of economic growth." *The Quarterly Journal of Economics* 70(1): 65-94.
- Statistik, B. P. (2016) *Indek Pembangunan Gender (IPG)*. Indonesia.
- Statistik, B. P. (2020) 'Berita resmi statistik 5 November 2020', Bps.Go.Id. Badan Pusat Statistik, pp. 1–52. Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>.
- Studies, M. et al. (2014) 'Household Registration , Economic Reform and Migration Author (s): Xiushi Yang Published by: The Center for Migration Studies of New York , Inc . Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/2546913> . Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance', 27(4), pp. 796–818.

- Styawan, D. A. (2021). PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF DEMOGRAFI. Seminar Nasional Official Statistics. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.716>
- Suasti, Y. (2015) 'Perubahan Komposisi Penduduk Kabupaten di Sumatera Barat', *Jurnal Geografi*, 4(1), pp. 1–15.
- Subri, M. (2003). *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subri, Mulyadi. (2018) "Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan," Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suharto, R. B. (2021) 'TEORI KEPENDUDUKAN'.
- Suleman, A. R. et al. (2021) *Perekonomian Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Sulistiyowati, N. and Irianto, J. (2016) 'Akurasi Sistem Registrasi Kematian dan Penyebab Kematian (Studi Tipikal Sejumlah Daerah di Indonesia) Masih Perlu Banyak Peningkatan : Sistem Registrasi Kematian dan Penyebab Kematian di Beberapa Daerah , Indonesia 2014', pp. 191–200.
- Sulistyawati, A. (2013) *Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Suwito. (2020). *Pengantar Demografi*. Malang: Ediide Infografika.
- Tamtiari, W. (2005) *Awig-awig Melindungi Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Tan, Tiang Goan. (1965) "Arti dan Tujuan Demografi," Jakarta: Lembaga Demografi FE UI.
- Tanzil. (2020). *Mobilitas Sirkulasi Dalam Masyarakat Lokal*. Kendari: Literacy Institute.
- Todaro, M. P. (2003) *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*. Edisi 1. Jakarta: Erlangga.
- Triyanto, W. S. (1990) 'Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia', Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tulchinski, T. and E. (2016) 'New Public Health An Introduction for 21 st Century'.

- Undang - Undang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006.
- Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.52 Tahun 2009 (2009) ‘Undang-Undang Republik Indonesia No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga’.
- Utomo B (2007) Dasar- dasar Demografi, lembaga Demografi fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wikipedia (2016) Kesuburan. Available at: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesuburan> (Accessed: 30 March 2021).
- Wilde, P., Llobrera, J. and Ver Ploeg, M. (2014) ‘Population density, poverty, and food retail access in the united states: An empirical approach’, *International Food and Agribusiness Management Review*, 17(SpecialIssueA), pp. 171–186. doi: 10.4324/9781315627137-10.
- World Bank (2020) *The Promise of Education in Indonesia*, The Promise of Education in Indonesia. Washinton DC: The World Bank. doi: 10.1596/34807.
- Yasin, M. and Adioetomo, S. M. (2010) ‘Demografi: Arti dan Tujuan’, *Dasar-Dasar Demografi* (hal: 1-19). Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, W. H. (2020) ‘Determinasi Fertilitas: Studi Kasus di Nusa Tenggara Barat’, *Social Sciences and Humanities*, 1(4), pp. 227–241.
- Zhuang, H., & Juliana, R. St. (2010). Determinants of economic growth: Evidence from American countries. *International Business & Economics Research Journal*, 9(5), 65–70.

Biodata Penulis



Dr. Drs. Bonaraja Purba, M.Si. Lulus Sarjana (Drs.) dari Universitas Negeri Medan (UNIMED), Magister Sains (M.Si.) Bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan Doktor (Dr.) Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Konsentrasi Ilmu Ekonomi Perencanaan dan Regional juga dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Sejak tahun 1987 hingga saat ini berkarir sebagai Dosen PNS di Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan (UNIMED).

Author dari 60 Buku ISBN/HKI Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis.

Email bonarajapurba@gmail.com dan bonarajapurba@unimed.ac.id



Arfandi SN, SE., M.M., lahir di Watampone, Kab.Bone pada tanggal 28 Oktober 1983. Pendidikan Terakhir Penulis tahun 2013 Studi pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Pada tahun 2008 memulai karir sebagai staf pengajar di STMIK AKBA Makassar di Prodi Komputerisasi Akuntansi, dan tahun 2016 diangkat menjadi Dosen Tetap IAIN Sorong dengan homebass di Program Studi Ekonomi Syariah.

Penulis merupakan Trainer Komputerisasi Akuntansi Zahir Accounting, menjadi Dosen Luar Biasa di UPBJJ Universitas Terbuka Sorong dan Universitas Papua, selain itu aktif di Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Daerah Sorong sebagai Sekretaris Umum, Editor In Chief Jurnal Ekonomi “At- Thariqah” Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Sorong, Beberapa karya Buku Ekonomi karya kolaborasi dalam satu tahun terakhir antara lain : Pemasaran Internasional, Sistem Perekonomian Indonesia,

Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Perekonomian Indonesia dan Bisnis, Manajemen Logistik dan Supply Chain Management.. Manajemen Konflik.



Elidawaty Purba, SE, M.Si lahir di Pematangsiantar 15 April 1964. Menyelesaikan studi S – 1 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan tahun 1988, , Selanjutnya melanjutkan Studi di Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan lulus tahun 1999. Saat ini aktif sebagai tenaga pengajar (Dosen Tetap) pada Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun . Mata kuliah yang diampu adalah Ekonomi Mikro, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Manajerial.



Dr. Samsider Sitorus, SST, MKes, Tempat dan Tanggal Lahir : Bukit Baringin / 09 Juni 1972, E-mail : samsidarsitorus@yahoo.co.id, Nomor Telepon /HP : 08126592472. Domisili di Kota Medan bekerja di Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Medan dan di berdayakan di S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Institute Helvetia Medan. Sudah menerbitkan beberapa artikel di Journal Internasional yang bereputasi berindeks Scopus dengan Id scopus 57194779166. Pernah mereview artikel di Journal yang berindeks Scopus dan menjadi reviwer di Jurnal Kesehatan Global Helvetia Medan. Buku yang telah di tulis ada 8 buku yakni Merdeka Menulis, Pemasaran Digital, Kesehatan Lingkungan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Obstetri dan Ginekologi untuk kebidanan, Keterampilan Dasar praktek Klinik, Konsep kebidanan, Asuhan kebidanan,



Pawan Darasa Panjaitan S.E., M.Si, lahir di Peatalun, Balige 28 Desember 1967. Menyelesaikan studi S-1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun pada tahun 1994. Selanjutnya merampungkan studi S-2 pada kampus yang sama dengan Prodi Perencanaan Wilayah. Penulis beraktifitas sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun dan sejak tahun 2019 diberi kepercayaan menjadi Sekretaris Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Simalungun. Suami Dra. H. Purba ini dapat dihubungi melalui email: pawerpanjaitan@gmail.com.



Darwin Damanik, SE, MSE lahir di Jakarta, 28 Desember 1981. Ia menyelesaikan studi S-1 (Sarjana) di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Lampung (FE UNILA) dengan konsentrasi Ekonomi Moneter pada tahun 2005. Selanjutnya, ia merampungkan studi S-2 (Magister) di Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dengan konsentrasi Uang dan Bank pada tahun 2008. Saat ini, ia tengah menempuh studi S-3 (Doktor) di Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU). Aktivitasnya sebagai Dosen Tetap dan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun di Kota Pematangsiantar. Selain itu aktif menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional, serta menjadi pernah menjabat tenaga ahli / konsultan di beberapa kegiatan Kab/Kota di Sumatera Utara. Mata kuliah yang diampunya adalah Ekonomi Makro, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Moneter & Kebanksentralan dan Perekonomian Indonesia. Beberapa buku yang pernah ditulisnya yaitu Pengantar Ekonomi Makro (Citapustaka Media, 2014), Sistem Perekonomian Indonesia, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Internasional, Perekonomian Indonesia, Perekonomian dan Bisnis Indonesia (Kita Menulis, 2021). Penulis dapat dihubungi melalui email: darwin.damanik@gmail.com atau HP: 085210371000.



Muhammad Iqbal Abdi Lubis lahir di Medan, pada 02 Februari 1994. Penulis adalah putra sulung dari pasangan Ahmad Sofyan Lubis (Rahimahullah) dan Nur Azizah. Penulis menamatkan SD pada tahun 2006, SMP tahun 2009, dan SMA tahun 2012. Pada Tahun 2012 penulis melanjutkan Pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertanian pada Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas, Padang pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis menyelesaikan Pendidikan Magister pada program

pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas, Padang pada tahun 2019. Penulis adalah staf pengajar (dosen) pada Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Arobisnis Perkebunan (STIP-AP) sejak bulan Mei Tahun 2020. Penulis aktif dalam menulis hasil riset pada Jurnal Nasional/Internasional dan Prosiding Internasional

(<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=YnAPdcoAAAAJ>). Selain itu, penulis juga aktif pada organisasi profesi sebagai anggota, yakni APTA (2020 – sekarang). Penulis dapat dihubungi pada alamat email m.iqbalabdilubis.ua@gmail.com atau iqbal_lubis94@stippap.ac.id dan atau alamat instagram ([_lubis94](#)).



Maisyarah. M , lahir di Aceh Tengah 19 Juni 1975, lulusan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Bukittinggi saya akrab dipanggil May, anak dari pasangan Muhammad (Ayah) dan Murni (Ibu), saya selain menjadi dosen pada program studi Ilmu kesehatan masyarakat juga aktif di Bisnis Digital walaupun tidak sebidang dengan keilmuan saya tapi merupakan sebuah

tantangan enterprenuer yang luar biasa dan sangat menarik untuk di pelajari, karena menjadi dosen yang aktif menulis merupakan ada kepuasan tersendiri terutama dalam bidang kesehatan masyarakat.



Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, SE., M.Si, lahir di Medan pada tanggal 14 September 1977. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi UMSU tahun 2000. Meneruskan studinya dan memperoleh gelas Magister Sains bidang Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala tahun 2004. Kemudian menyelesaikan program doktor Ilmu Perencanaan Wilayah pada tahun 2012 di Universitas Sumatera Utara. Saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan sejak tahun 2005 sampai sekarang. Kegiatan lain penulis saat ini adalah menjadi salah satu Wakil Ketua PMI Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2016. Selain itu penulis

juga menjadi konsultan pada lembaga konsultan Banyaneer yang berdomisili di Adelaide – Australia untuk monitoring dan evaluasi, baseline, midline dan endline survei yang dilakoninya sejak tahun 2010. Saat ini penulis juga memiliki kanal youtube dengan nama DOSEN BIASA. Kanal kreatif yang mengkombinasikan antara edukasi dan komedi yang siap menginspirasi.



Fastabiqul Khairad lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 06 Agustus 1995. Penulis memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Andalas pada tahun 2017 dan Magister Sains pada tahun 2018 melalui jalur Fastrack program Magister Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Andalas. Tahun 2019, penulis pernah bekerja di PT. Anom sebagai Food Safety Team Leader. Karir dosen dimulai sejak 2020, dan saat ini aktif sebagai Dosen Tetap di Universitas Medan Area, sekaligus memegang amanah sebagai sekretaris program studi Agribisnis.

Sebelumnya penulis telah menghasilkan buku Profil Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2016 dan buku Profil Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016.



Dr. Ari Mulianta Ginting, SE., MSE, adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ilmu Ekonomi Moneter. Penulis pada tahun 2020 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi dengan Konsentrasi Public Policy di Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti. Bekerja di Sekertariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi kepakaran Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian, Setjen DPR RI. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Honorer untuk Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta. Serta Penulis juga menjadi dosen tidak tetap untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Harapan (UPH), dan Dosen Pascasarjana Magister Ekonomi, di Universitas Trisakti. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail : ari.ginting@dpr.go.id.



Akhmad Muhammadin, SE., MM., M.Phil., Ph.D. adalah Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM-Bongaya) sejak tahun 2007 sampai sekarang. Konsentrasi Keilmuan Bidang Ekonomi : Manajemen Perbankan, Manajemen Strategi, Manajemen Pemasaran (Marketing), dan Studi Globalisasi dan Pembangunan. Lulus (S3) Universiti Kebangsaan Malaysia Tahun 2016, Lulus (S2) Universiti Kebangsaan Malaysia Tahun 2019, Lulus (S2) Universitas Muslim Indonesia Tahun 2006, Lulus (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM-Bongaya) Tahun 2000. Pernah bekerja di Perbankan selama 12 Tahun sementara menjadi tenaga pengajar. Selama menjadi Staf Pengajar beberapa Jurnal Internasional dan Nasional serta Proceeding yang bereputasi telah dipublikasikan termasuk kolaborasi dengan perguruan tinggi di luar negeri.



Hengki Mangiring Parulian Simarmata, S.Si., M.M., lahir di Pematangsiantar Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen pada tahun 2014 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 2015 diangkat menjadi Dosen Tetap di Politeknik Bisnis Indonesia Murni Sadar Pematangsiantar di Jurusan Administrasi Perkantoran dan dosen tidak tetap di Sekolah Tinggi Manajemen dan Akuntansi Indonesia. Penulis pernah menjadi dosen di

Universitas Prima Indonesia Medan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars dan AMIK. Fokus pengajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko Bank, Komunikasi Bisnis, Etika Bisnis, Public Relation, dan Administrasi Perkantoran. Fokus penelitian pada bidang Manajemen dan Pariwisata yang di terbitkan di jurnal nasional dan internasional dengan Author Sinta : 5998993 dan ID Scopus : 57215917254. Editor on Board di Journal MISSY (Management and Business Strategy), Reviewer di Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI). Fokus pengabdian masyarakat pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat petani, pelaku usaha mikro dan kecil. Dosen bersertifikat pendidik (Sertifikasi Dosen) tahun 2018 dan memiliki Sertifikat Kompetensi tahun 2019 dan 2020 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Peraih hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun 2019 dan tahun 2020 bidang Manajemen dan Pariwisata. Buku yang telah terbit hasil kolaborasi dibidang Manajemen, Marketing, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pariwisata, Kewirausahaan, Ekonomi dan Bisnis sebanyak 29 Buku.

Penulis pernah bekerja di Bank selama 7 tahun, Garuda Indonesia Airlines Medan, dan PT ISS Bandung. Aktif dalam berbagai organisasi profesi Dosen Indonesia sejak tahun 2018. Penulis juga merupakan Tim Diklat dan Penelitian di Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya (P4S) Pematangsiantar. Pemilik dan pengelola usaha mikro. Email : hengkisimarmata.mm@gmail.com. Google scholar : Hengki Mangiring Parulian Simarmata.

EKONOMI Demografi

Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk membantu para pembaca, memahami bahwa Ekonomi Demografi merupakan bagian tidak terpisahkan dan sangat penting dalam kelangsungan pembangunan ekonomi masa sekarang dan masa yang akan datang. Buku ini berisi materi yang dapat digunakan baik oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa, serta para pembaca umumnya untuk menambah wawasan berpikir dan ilmu yang berkenaan dengan ilmu ekonomi pembangunan.

Buku ini terdiri dari 13 Bab yang membahas tentang:

- Bab 1 Pendahuluan
- Bab 2 Sumber Data Demografi
- Bab 3 Pertumbuhan Penduduk beserta Variabel yang Memengaruhinya.
- Bab 4 Ukuran Dasar Demografi
- Bab 5 Komposisi Penduduk
- Bab 6 Angkatan Kerja
- Bab 7 Fertilitas
- Bab 8 Mortalitas
- Bab 9 Migrasi
- Bab 10 Mobilitas Penduduk
- Bab 11 Masalah Kependudukan
- Bab 12 Kaitan Demografi dengan Pembangunan Ekonomi
- Bab 13 Kebijakan Kependudukan



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

